



BUKU 5

Katalog BPS: 5106024

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR

AGRIBISNIS USAHA RUMAH TANGGA BUDIDAYA SAPI DAN TARGET SWASEMBADA



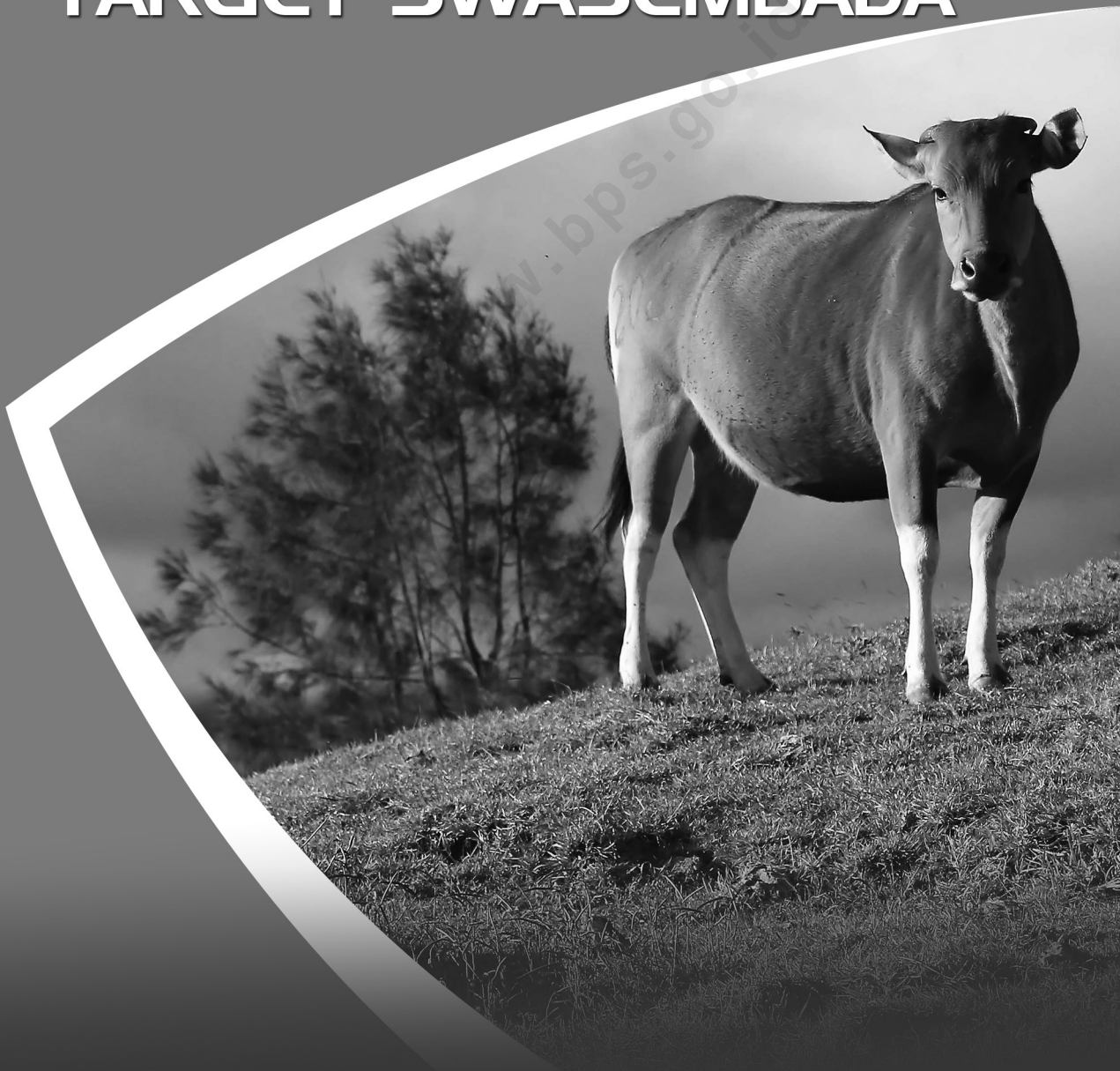
BADAN PUSAT STATISTIK



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)**

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR

AGRIBISNIS USAHA RUMAH TANGGA BUDIDAYA SAPI DAN TARGET SWASEMBADA



© Badan Pusat Statistik

**Analisis Tematik ST2013 Subsektor
Agribisnis Usaha Rumah Tangga Budidaya Sapi dan Target Swasembada**

ISBN : 978-979-064-869-2
No. Publikasi : 07310.1511
Katalog BPS : 5106024

Diproduksi : © Badan Pusat Statistik
Pengarah : Dr. Adi Lumaksono M. A. dan Dr. Suhariyanto
Penanggung jawab : Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.
Editor : Dr. Slamet Sutomo, Harmawanti Marhaeni, M.Sc.
Penulis : Dr.Ir. R. Hanung Ismono., M.P. , Dr.Ir. Erwanto., M.S. ,
Dr.Ir. Dyah Aring Hepiana Lestari., M.Si., Dr.Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti., M.S.,
Dr.Ir. Dwi Haryono., M.S., Dr. Kesuma Adhianto, Ir. Hasnizar Nasution., M.M.,
Hengki Eko Riyadi., SST SE., M.Si.
Desain : Rizal Herwin Wibowo, A. Md. Des, Oki Heryanto, A.Md., Zukha Latifah, S.ST
Dicetak oleh : CV. Nario Sari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015
xxiv +155 halaman; 17,6 x 25 cm

Kata Pengantar



Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempublikasikan tiga buku analisis hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), yaitu: Potensi Pertanian Indonesia yang merupakan hasil analisis hasil pencacahan lengkap tahun 2013; Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia yang disusun berdasarkan hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) 2013; dan Analisis Kebijakan Pertanian: Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013 yang memanfaatkan hasil Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian dan SPP. Publikasi tersebut mempublikasikan hasil analisis Sensus Pertanian yang bersifat umum.

Dalam rangka mendapatkan analisis lebih mendalam lagi dan bersifat komprehensif, disusunlah publikasi Agribisnis Usaha Rumah Tangga Budidaya Sapi dan Target Swasembada tujuannya adalah mengetahui perkembangan profil agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi rakyat menurut wilayah, dan mengetahui kinerja agribisnis usaha rumah tangga serta kelayakan usahanya; menganalisis perubahan stok pasif dan stok aktif sapi, terutama yang dikuasai rumah tangga peternakan rakyat, sebagai basis estimasi produksi daging sapi, dan mengetahui kontribusi usaha rumah tangga agribisnis sapi dan pencapaian target swasembada daging nasional; serta mengetahui daya dukung wilayah dalam pengembangan usaha rumah tangga agribisnis sapi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ST2013 hingga tersusunnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryamin', written over a horizontal line.

Dr. Suryamin

Kata Pengantar



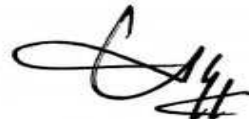
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan publikasi “AGRIBISNIS USAHA RUMAH TANGGA BUDIDAYA SAPI DAN TARGET SWASEMBADA” berjalan lancar. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, pelaku usaha, para perumus kebijakan, dan pihak lain yang membutuhkan gambaran tentang kondisi usaha rumah tangga budidaya sapi, khususnya sapi potong, serta target pencapaian swasembada daging. Selain itu juga diharapkan masyarakat/ pembaca dapat memahami lebih mendalam hasil Sensus Pertanian (ST2013) dan Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan (STU2014) berdasarkan kajian mendalam dari sisi akademik tentang data yang tersaji dalam sumber data tersebut.

Pada kesempatan ini Fakultas Pertanian Universitas Lampung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pusat Statistik atas kepercayaannya memberi kami kesempatan untuk melakukan kajian tentang analisis tematik ST2013. Sehingga dengan melibatkan tim pengkaji dari Fakultas Pertanian Unila, jargon ST2013: “menyediakan informasi untuk masa depan petani yang lebih baik”, dapat terwujud dan terlaksana.

Dalam penyusunan publikasi ini banyak pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Dr. Ir. Arief Daryanto dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bapak Adikelana Adiwoso, dari PT. Agro Giri Perkasa, Manajemen PT. Great Giant Livestock, Manajemen PT. Juang Jaya, serta semua pihak yang telah membantu, sehingga seluruh kegiatan penyusunan publikasi analisis tematik ST2013 ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya Fakultas Pertanian Unila berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2015
Dekan Fakultas Pertanian Unila,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wan Abbas Zakaria'.

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Kajian	5
1.3 Luaran Kajian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HASIL STUDI TERDAHULU	7
2.1. Agribisnis	9
2.2. Swasembada Sapi	11
2.2.1 Dinamika Ketersediaan Daging Sapi Nasional	14
2.2.2 Kinerja Usaha Peternakan Sapi Rakyat	20
2.3. Isu Strategis Pembangunan Peternakan	20
III. METODE KAJIAN	25
3.1 Sumber Data dan Pengambilan Sampel	27
3.2 Definisi Operasional	28
3.3 Metode Analisis	29
3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	29
3.3.2 Analisis Pendapatan	30
3.3.3 Analisis Efisiensi Pemasaran	31
3.3.4 Analisis koefisien korelasi harga	32
3.3.5 Elastisitas transmisi harga	32
3.4 Analisis Estimasi Supply dan dan Demand Daging Sapi	33

IV. DAGING DAN DAYA SAING BANGSA	35
4.1 Era Kompetisi Global	37
4.1.1 SDM Unggul dan Nutrisi Berimbang.....	40
4.1.2 Konsumsi Pangan Bergizi	41
4.2 Swasembada Daging Sapi	47
V. PROFIL USAHA SAPI POTONG RAKYAT.....	51
5.1 Rumah Tangga Usaha Peternakan	53
5.2 SDM Peternak.....	56
5.3 Kesejahteraan Peternak.....	59
VI. KINERJA AGRIBISNIS SAPI POTONG.....	65
6.1 Budidaya Ternak	67
6.2 Kelayakan Usaha.....	75
6.3 Pemasaran Ternak.....	81
VII. MENGEJAR SWASEMBADA DAGING	101
7.1 Perhitungan Konsumsi Daging Sapi Susenas-BPS.....	105
7.2 Perhitungan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi UGM – Apfindo	108
7.3 Perhitungan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi di Kemenko Perekonomian	109
7.4 Perhitungan Berbasis Dinamika Populasi.....	111
VIII. PERCEPATAN PENGEMBANGAN SAPI RAKYAT.....	117
8.1 Mutu SDM, Kelembagaan, dan Regulasi	119
8.2 Akselerasi Peningkatan Populasi Sapi	120
8.3 Peningkatan Produktivitas Sapi Potong	124
8.4 Pembiayaan Usaha Ternak Sapi Potong.....	125
8.5 Peningkatan Jasa Layanan Pendukung Agribisnis Sapi.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	131

Daftar Tabel

2.1	Konsumsi daging sapi per kapita per tahun dan konsumsi daging sapi nasional	15
2.2	Proyeksi suplai daging sapi nasional.....	17
2.3	Proyeksi jumlah ketersediaan dan konsumsi daging sapi	18
2.4	Data pemotongan sapi betina di RPH Singosari dan RPH Gadang, Malang Jawa Timur.....	18
2.5	Proyeksi jumlah kekurangan sapi dan induk di Indonesia.....	19
4.1	Komposisi PPH sebagai instrumen acuan perencanaan pangan B2S	44
4.2	Impor sapi dan daging sapi	49
5.1	Perbandingan Ruta usaha pertanian Indonesia pada tahun 2003 dan 2013.....	54
6.1	Harga daging sapi di tingkat produsen dan di tingkat pengecer, 2014	88
6.2	Hasil analisis regresi harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer, 2014.....	89
7.1	Konsumsi daging rumah tangga menurut jenis daging	105
7.2	Konversi berbagai jenis pangan ke bentuk daging segar	106
7.3	Konsumsi daging sapi/kapita/tahun rumah tangga perdesaan, perkotaan dan total konsumsi	107
7.4	Proyeksi Produksi dan konsumsi daging sapi tahun 2014-2024.....	108
7.5	Persentase Mutasi Sapi Potong terhadap Stok Awal Nasional, 2014	112
7.6	Perbandingan jumlah sapi nasional yang siap dipotong tahun 2010-2014.....	115
8.1	Jumlah perusahaan di bidang perbibitan dan penggemukan sapi potong tahun 2013	122

Daftar Gambar

2.1	Sistem Agribisnis.....	10
2.2	Trend dan proyeksi jumlah penduduk di Indonesia.....	14
2.3	Trend konsumsi daging sapi, ayam kampung, dan ayam ras	15
2.4	Perbandingan konsumsi daging sapi dan daging ayam ras di Indonesia menurut provinsi.....	16
4.1	Perbandingan konsumsi energi penduduk Indonesia dengan AKG standar menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012.....	45
4.2	Perbandingan konsumsi protein penduduk Indonesia dengan AKG standar menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012.....	45
4.3	Kontribusi protein berbagai pangan hewani dalam konsumsi protein dari pangan hewani	46
4.4	Kontribusi energi pangan hewani terhadap konsumsi energi pangan hewani.....	47
4.5	Persentase rumah tangga peternakan dan jenis ternak sapi yang dipelihara	48
5.1	Rumah tangga usaha peternakan berdasarkan jenis ternak utama yang dipelihara	55
5.2	Kontribusi pendapatan asal 4 rumah tangga utama dalam sektor pertanian.....	56
5.3	Persentase peternak Indonesia menurut ijazah tertinggi.....	57
5.4	Persentase peternak utama menurut umur	58
5.5	Sebaran status rumah yang ditempati peternak sapi (%)	60
5.6	Sebaran jenis atap terluas rumah peternak sapi potong (%).....	60
5.7	Sebaran jenis dinding terluas dari rumah yang ditempati peternak sapi potong (%).....	61
5.8	Sebaran jenis lantai terluas dari rumah yang ditempati peternak sapi potong (%).....	61
5.9	Sumber penerangan di rumah peternak sapi (%)	62
5.10	Bahan bakar memasak yang digunakan peternak sapi (%).....	63
5.11	Sumber air minum yang digunakan peternak sapi (%).....	63
5.12	Fasilitas buang air besar yang digunakan peternak sapi.....	64
6.1	Rumah tangga usaha sapi potong yang memiliki sarana produksi menurut jenis sarana produksi (%)	68
6.2	Profil rumah tangga usaha peternakan sapi potong berdasarkan tujuan utama perusahaan.....	69
6.3	Persentase lama berusaha rumah tangga usaha peternakan sapi potong	70
6.4	Persentase status penguasaan ternak di rumah tangga usaha peternakan sapi potong.....	71
6.5	Asal utama ternak pada rumah tangga usaha peternakan sapi potong (%)	71
6.6	Persentase jenis penyakit yang pernah terjadi di rumah tangga usaha peternakan	72

6.7	Persentase rumah tangga usaha peternakan berdasarkan pelaksanaan vaksinasi	73
6.8	Cara pemeliharaan sapi potong pada rumah tangga usaha peternakan	74
6.9	Struktur penerimaan usaha sapi potong per ekor (%) di Indonesia, 2013.....	75
6.10	Struktur penerimaan usaha sapi potong per ekor (%) per provinsi di Indonesia, 2013.....	76
6.11	Struktur biaya riil usaha sapi potong per ekor (%) di Indonesia, 2013	77
6.12	Struktur biaya seharusnya usaha sapi potong per ekor (%) di Indonesia, 2013.....	77
6.13	Perbedaan struktur biaya riil dan biaya seharusnya usaha sapi potong per ekor masing-masing komponen (%) di Indonesia, 2013	78
6.14	Pendapatan dan keuntungan per ekor usaha sapi potong per provinsi di Indonesia, 2013.....	80
6.15	Perbandingan R/C atas biaya riil dan R/C atas biaya seharusnya usaha sapi potong per ekor, 2013.....	80
6.16	Sarana angkutan yang digunakan untuk pemasaran (%)	81
6.17	Jenis pemanfaatan sapi potong (%).....	82
6.18	Tempat penjualan hasil dalam bentuk primer (%).....	82
6.19	Sebaran alasan utama penjualan sapi potong (%)	83
6.20	Perkembangan ternak yang dijual pada bulan Mei 2013-April 2014 (%).....	83
6.21	Sebaran bentuk produk utama sapi potong yang dijual (%)	84
6.22	Masalah-masalah yang dihadapi peternak dalam pemasaran (%)	84
6.23	Harga sapi di tingkat produsen dengan asumsi berat per ekor: 250 kg(Rp), 2014	85
6.24	Pemanfaatan produk sapi potong (%), 2014	86
6.25	Harga rata-rata pemanfaatan produk sapi di tingkat produsen, 2014.....	86
6.26	Perkembangan harga daging sapi di enam wilayah dan di Indonesia, 2010-2014.....	87
6.27	Alasan utama peternak sapi potong yang tidak menjadi anggota koperasi (%).....	92
6.28	Sebaran berbagai pelayanan yang diberikan koperasi peternak (%)	93
6.29	Alasan utama peternak sapi potong tidak menjadi anggota kelompok peternak (%).....	94
6.30	Jenis pelayanan yang diterima peternak dari kelompok peternak (%).....	95
6.31	Sebaran keikutsertaan peternak sapi potong dalam kemitraan (%).....	95
6.32	Manfaat yang diperoleh peternak sebagai anggota asosiasi (%).....	96
6.33	Sebaran sumber tambahan modal yang diterima rumah tangga peternakan sapi potong (%).....	96
6.34	Sebaran cara pembayaran bantuan modal (%).....	97
6.35	Sebaran alasan utama rumah tangga peternakan sapi potong tidak mengambil tambahan modal (%).....	97
6.36	Sebaran alasan peternak tidak mengikuti bimbingan/penyuluhan (%).....	98
6.37	Sebaran materi bimbingan/penyuluhan yang diterima rumah tangga peternakan sapi potong	99
7.1	Konsumsi daging sapi rumah tangga di Indonesia per provinsi menurut wilayah desa dan kota (kg/kapita/tahun).....	106
7.2	Kesepakatan angka produksi dan konsumsi daging sapi	110
7.3	Kebutuhan daging sapi nasional 2011-2015	110
7.4	Proyeksi produksi dan konsumsi serta tercapainya swasembada daging sapi nasional.....	113

Ringkasan Eksekutif

Era global diwarnai dengan kompetisi yang semakin ketat dan dinamis khususnya pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus bersinergi meningkatkan kapasitas, kinerja, daya saing, dan kemandirian bangsa. Dalam kerangka itu Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo merumuskan NAWACITA sebagai isu sentral pembangunan nasional menuju peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemandirian bangsa. Swasembada pangan berkelanjutan merupakan salah satu program yang harus segera direalisasi, termasuk swasembada daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu jenis pangan strategis yang harus dipacu peningkatan produksinya, karena saat ini defisit komoditas daging sapi makin melebar.

Konsumsi daging sapi/ kapita/ tahun merupakan angka penting dalam perhitungan swasembada daging sapi. Pada rapat di Kementerian Perekonomian bulan Agustus 2015 yang dihadiri pihak pemerintah, industri, asosiasi, dan perguruan tinggi disepakati satu angka acuan nasional yaitu sebesar 2,56 kg. Dengan menggunakan angka tersebut diperoleh jumlah produksi daging sapi nasional tahun 2015 sebesar 416,10 ribu ton dan kebutuhan daging sapi nasional sebesar 653,98 ribu ton. Dengan demikian, defisit daging sapi diperkirakan sebesar 237,88 ribu ton, yang setara dengan 36,4 persen dari kebutuhan. Defisit ini diperkirakan dapat dipenuhi dari impor daging sapi sebesar 95,16 ribu ton dan impor sapi hidup sebanyak 713,7 ribu ekor.

Permasalahan sentral peternakan sapi potong di Indonesia adalah populasi sapi yang sangat kecil dan skala usaha peternakan sapi rakyat yang juga sangat kecil. Pada tahun 2013 sebanyak 12.329.477 ekor (97,97 persen) ternak sapi potong berada di 5.078.979 rumah tangga usaha peternakan (Ruta). Sisanya sekitar 2,03 persen berada di perusahaan berbadan hukum, padagang, dan lainnya. Dengan demikian skala sapi potong di Ruta hanya berkisar 2 – 3 ekor per Ruta. Pertumbuhan populasi sapi potong nasional sangat lambat, hanya 5,33 persen per tahun. Lambatnya pertumbuhan populasi disebabkan laju pemotongan yang tinggi dan rendahnya kinerja usaha ternak secara umum. Dengan ukuran populasi yang kecil dan skala usaha yang juga kecil sangat sulit untuk menghasilkan pasokan daging sapi dalam jumlah cukup, sehingga defisit daging sapi terus meningkat.

Permasalahan peternakan sapi potong di Indonesia sangat kompleks, karena selain masalah aspek teknis internal juga banyak kaitannya dengan beragam masalah aspek eksternal. Namun, gambaran utuh permasalahan peternakan sapi potong di Indonesia dapat

diurai dari berbagai sisi termasuk dari profil usaha sapi potong rakyat, kinerja agribisnis sapi potong rakyat, serta pengaruh dinamika faktor eksternal termasuk dinamika *supply* dan *demand* daging sapi.

a. Profil Usaha Sapi Potong Rakyat

Jumlah Ruta peternakan pada tahun 2013 menempati urutan kedua setelah Ruta pertanian tanaman pangan. Berarti sebagian besar petani masih yakin usaha peternakan dapat memberikan manfaat terhadap masa depannya. Namun, ada hal yang perlu dicermati yaitu selama kurun waktu 2003 – 2013 terjadi penurunan yang cukup tajam pada jumlah Ruta peternakan, yaitu sebesar 30,3 persen. Persentase rumah tangga usaha peternakan sapi potong menempati jumlah tertinggi (37 persen) dari Ruta peternakan.

Struktur pendapatan Ruta pertanian tahun 2003 dan 2013 masih didominasi oleh Ruta tanaman pangan dan Ruta tanaman perkebunan. Sementara itu, sumbangan Ruta usaha peternakan pada kedua sensus tersebut berturut-turut 6,28 persen dan 5,80 persen. Berarti dalam 10 tahun kontribusi usaha peternakan mengalami penurunan sebesar 7,64 persen, sedangkan kontribusi 3 subsektor utama lainnya (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) mengalami peningkatan. Fenomena penurunan kontribusi subsektor peternakan dalam struktur pendapatan Ruta usaha pertanian perlu dicermati serius, karena penurunan tersebut erat kaitannya dengan kebijakan prioritas pengembangan komoditas.

Sekitar 79,32 persen peternak utama sapi potong rakyat hanya berpendidikan jenjang SD atau tidak tamat SD. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan peternak dalam belajar, penalaran, kewirausahaan, serta mengakses informasi dan paket teknologi sangat terbatas. Kondisi ini menyulitkan pengembangan skala usaha sapi potong menuju skala bisnis yang sarat dengan inovasi teknologi dan kewirausahaan. Mencermati kondisi tersebut ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, dalam jangka panjang perlu percepatan peningkatan mutu SDM melalui peningkatan dan perluasan akses pendidikan. Kedua, dalam jangka menengah perlu peningkatan dan perluasan jangkauan kegiatan penyuluhan pertanian melalui pengembangan program penyuluhan berbasis TIK atau *cyber extension*. Ketiga, perlu dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani, yang kelak menjadi pintu masuk program penyuluhan dan inovasi teknologi. Keempat, perlu percepatan pengembangan wirausaha baru agribisnis sapi potong melalui program inkubator bisnis atau sentra peternakan rakyat (SPR).

Sebanyak 66,71 persen peternak sapi potong rakyat berumur di atas 45 tahun. Berarti peternak sapi potong Indonesia didominasi oleh peternak dewasa dan berusia lanjut. Jumlah peternak di bawah umur 40 tahun hanya 19,77 persen. Hal ini mencerminkan usaha peternakan sapi potong belum menjadi pilihan menarik bagi generasi muda. Rendahnya minat generasi muda terhadap usaha sapi potong merupakan masalah penting yang akan menjadi kendala pengembangan usaha sapi potong ke depan. Mencermati profil struktur umur peternak sapi potong ada 2 hal yang dapat dipertimbangkan untuk kebijakan. Pertama, dalam jangka panjang perlu keberpihakan khusus untuk meningkatkan kualitas dan daya

tarik pendidikan vokasi pertanian. Kedua, dalam jangka pendek dan menengah dibutuhkan pengembangan wirausaha baru agribisnis sapi potong melalui program inkubator bisnis yang didukung dengan insentif modal usaha dengan skema yang progresif.

b. Kinerja Agribisnis Sapi Potong Rakyat

Persentase Ruta usaha peternakan sapi potong yang bergerak dalam usaha pembibitan (*breeding*) sapi potong sangat rendah, yaitu hanya 0,37 persen. Sebagian besar peternak memilih bergerak dalam usaha pengembangbiakan (75,84 persen), yaitu yang secara terbatas menghasilkan anak sapi dan membesarkannya sehingga menjadi sapi bakalan. Rendahnya minat peternak rakyat dan usaha peternakan berbadan hukum pada usaha pembibitan menjadi kendala serius dalam pembangunan peternakan sapi potong. Masalah ini sesungguhnya merupakan penyebab utama rendahnya penyediaan sapi bakalan berkualitas dari Ruta peternakan sapi potong di Indonesia. Kondisi ini harus segera diperbaiki dengan memberikan insentif khusus yang menarik kepada peternak rakyat atau usaha peternakan berbadan hukum untuk menekuni usaha pembibitan sapi potong. Insentif khusus yang menarik sangat diperlukan karena usaha pembibitan memerlukan investasi yang relatif besar dan berjangka panjang, dibandingkan dengan usaha penggemukan sapi potong.

Lama berusaha mencerminkan pengalaman peternak sapi potong dalam menekuni usahanya dan jumlah peternak yang baru mulai menekuni usaha peternakan. Sebanyak 56,79 persen peternak telah menekuni usaha sapi potong lebih dari 5 tahun. Jumlah peternak sapi potong yang telah menekuni usahanya lebih dari 10 tahun bahkan sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 33,03 persen. Peternak baru yang menekuni usaha sapi potong kurang dari setahun hanya 5,21 persen. Data profil lama berusaha mencerminkan beberapa hal menarik, yaitu: (a) dominasi peternak berpengalaman lama (berkorelasi dengan umur peternak) masih cukup tinggi; (b) persentase peternak baru termasuk cukup rendah sehingga ada indikasi usaha sapi potong masih kurang menarik; dan (c) usaha sapi potong cukup menjanjikan sehingga ada indikasi peternak yang sudah mencoba usaha banyak yang bertahan sampai lebih dari 5 tahun (56,79 persen).

Sebagian besar status penguasaan ternak sapi potong pada Ruta peternakan berupa milik sendiri (79,33 persen). Sebanyak 19,12 persen merupakan usaha bagi hasil, sisanya adalah ternak bantuan dan bentuk status lainnya. Data ini mengungkap bahwa sebagian besar sapi potong merupakan milik peternak sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan agribisnis sapi potong di Indonesia akan secara langsung berdampak kepada peningkatan kinerja usaha peternakan milik rakyat. Program ini tentu saja sangat efektif untuk meningkatkan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Lebih dari separuh ruta (88,63 persen) sudah memiliki sarana produksi kandang. Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan 66 persen ruta usaha ternak sapi potong yang menerapkan cara pemeliharaan ternak sapi potong menggunakan kandang ternak. Akan tetapi angka tersebut juga mencerminkan masih banyaknya ruta yang memelihara sapi potong tanpa kandang. Sarana ke dua terbanyak yang dimiliki ruta peternakan adalah kendaraan roda dua, kemudian diikuti oleh sarana lain-lain. Gudang

pakan hanya dimiliki oleh 12,04 persen rusa, demikian juga mesin pencacah, mesin pembuat pelet, mesin pencampur pakan, dan mesin giling pakan hanya dimiliki oleh sebagian kecil rusa saja. Kendaraan roda tiga atau lebih juga hanya dimiliki oleh 1,18 persen rusa.

Vaksinasi dalam budidaya ternak bertujuan untuk memberikan kekebalan (antibodi) pada ternak, sehingga dapat melawan antigen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Akan tetapi rusa usaha peternakan sapi potong yang tidak melakukan vaksinasi sangat tinggi, mencapai 89,31 persen.

Jenis penyakit yang diderita atau menyerang ternak sapi potong rakyat cukup banyak, meliputi *brucellosis*, *anthracks*, demam susu (*milk fever*), kembung perut (*bloat*), cacingan, dan berbagai penyakit lainnya. Jumlah rusa peternakan yang jumlah ternaknya pernah sakit mencapai 12,13 persen. Dari ternak yang pernah sakit tersebut, kejadian penyakit jenis kembung perut menduduki peringkat pertama (33 persen) disusul cacingan (25 persen).

1. Kelayakan usaha ternak sapi potong

Struktur penerimaan usaha ternak sapi potong menunjukkan bahwa sumbangan terbesar berasal dari perubahan bobot tubuh sapi. Secara nasional rata-ratanya mencapai 97,18 persen. Sementara itu, sumbangan penerimaan dari produk ikutan dan jasa peternakan sangat kecil.

Biaya yang dikeluarkan peternak sapi potong terdiri dari biaya pakan, upah tenaga kerja, biaya BBM, biaya listrik, biaya air, biaya pemeliharaan kesehatan, dan pengeluaran lain-lain. Biaya pakan terdiri dari biaya hijauan pakan ternak, pakan buatan pabrik/konsentrat, dan pakan lainnya (jerami, ampas tahu dan lain-lain). Upah tenaga kerja dibedakan menjadi upah tenaga kerja dibayar dan upah tenaga kerja tidak dibayar. Pengeluaran lain-lain mencakup perbaikan kecil barang modal, sewa lahan, sewa kandang, pajak tidak langsung, jasa peternakan, retribusi, bunga atas pinjaman, biaya angkutan, penyusutan barang modal dan lain-lain.

Struktur biaya riil usaha sapi potong per ekor di Indonesia menunjukkan bahwa persentase terbesar biaya yang dikeluarkan peternak sapi adalah biaya pakan (47,31 persen). Diikuti kemudian oleh pengeluaran lain-lain yang ternyata cukup besar (16,95 persen). Upah tenaga kerja yang dikeluarkan peternak ternyata hanya 2,80 persen. Persentase ini menempati urutan ke enam setelah pakan, pengeluaran lain-lain, BBM, pemeliharaan kesehatan, dan biaya listrik.

Struktur biaya seharusnya usaha ternak sapi potong, yang diperoleh dengan memperhitungkan seluruh input yang digunakan, menunjukkan bahwa persentase terbesar biaya yang dikeluarkan oleh peternak adalah tetap untuk pakan. Bahkan persentasenya naik dari 47,31 persen menjadi 57,78 persen. Perubahan terbesar terjadi pada persentase upah tenaga kerja. Persentase biaya tenaga kerja melonjak dari 2,80 persen menjadi 33,53 persen atau melonjak dari urutan ke enam menjadi urutan ke dua. Hal ini menegaskan bahwa

pemeliharaan sapi potong lebih banyak dikerjakan oleh tenaga kerja dalam keluarga yang tidak diupah.

Pendapatan usaha sapi potong adalah penerimaan usaha sapi potong dikurangi dengan biaya riil usaha sapi potong. Pendapatan usaha sapi potong di semua provinsi di Indonesia maupun secara nasional bernilai positif. Pendapatan paling tinggi dinikmati oleh peternak di Provinsi Jawa Timur, yaitu Rp 4.777.420,00 per ekor, sedangkan pendapatan terendah diperoleh peternak di Provinsi Gorontalo, yaitu Rp 659.410,00 per ekor. Rata-rata nasional menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh peternak adalah Rp 3.642.220,00 per ekor. Bila pada umumnya sapi potong dipelihara antara 120 – 150 hari, maka pendapatan peternak per ekor per bulan adalah antara Rp 700 ribu hingga Rp 900 ribu.

Keuntungan usaha sapi potong adalah penerimaan usaha sapi potong dikurangi biaya seharusnya usaha sapi potong. Hasilnya, hanya peternak di sembilan provinsi yang usaha sapi potongnya masih menguntungkan. Provinsi-provinsi yang masih memperoleh keuntungan adalah Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Peternak di 25 provinsi lain mengalami kerugian yang ditunjukkan oleh keuntungan yang negatif. Kerugian terbesar dialami oleh peternak di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu mencapai Rp 3.992.310,00 per ekor, sedangkan kerugian terkecil dialami oleh peternak di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 15.730,00 per ekor.

Walaupun demikian, secara nasional usaha sapi potong masih menguntungkan. Hal ini dilihat dari keuntungan yang positif sebesar Rp 522.790,00 per ekor. Akan tetapi besarnya keuntungan ini masih kurang memadai mengingat waktu pemeliharaan sapi potong yang umumnya berkisar antara 120 – 150 hari. Dengan keuntungan sekitar Rp 500 ribu per ekor maka hal ini berarti bahwa peternak hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp 100 ribu – Rp 125 ribu per ekor per bulan.

Berdasar biaya riil, R/C rasio usaha sapi potong di seluruh provinsi di Indonesia lebih besar dari 1 sehingga layak untuk diusahakan. Kelayakan usaha paling tinggi adalah yang dilakukan oleh peternak di wilayah NTT ($R/C = 25,97$), sedangkan kelayakan paling rendah adalah di Provinsi Gorontalo ($R/C = 1,71$). Secara nasional R/C rasio yang diperoleh sebesar 8,71. Berdasar biaya seharusnya, hanya usaha sapi potong di sembilan provinsi yang masih layak karena R/C rasionya masih lebih besar dari 1 yaitu Provinsi Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Usaha sapi potong di Provinsi Jawa Timur paling layak dengan $R/C = 1,76$. Usaha sapi potong di 25 provinsi lain menjadi tidak layak lagi diusahakan karena R/C rasio yang diperoleh lebih kecil dari 1.

2. Pemasaran

Sebagian besar peternak sapi potong (60,41 persen) belum pernah menjual hasil ternaknya. Jadi hanya 39,59 persen atau kurang dari separuh peternak sapi potong yang sudah pernah melakukan pemasaran hasil. Dari 39,59 persen peternak yang sudah melakukan pemasaran hasil tersebut, 6,88 persen peternak menggunakan sarana angkutan, sedangkan 32,71 persen peternak tidak menggunakan sarana angkutan. Sarana angkutan terbanyak adalah kendaraan bermotor roda tiga atau lebih.

Pemanfaatan sapi potong hanya sekitar 40 persen untuk dijual dalam bentuk primer, dijual dalam bentuk olahan, dan dikonsumsi sendiri. Sebagian besar (60 persen) ternyata adalah untuk manfaat lainnya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sebagian besar peternak memperlakukan sapi potong sebagai **“rojo koyo”**, sebagai tabungan atau aset, yang baru akan dijual atau dikonsumsi saat ada keperluan tertentu.

Bentuk produk utama sapi potong yang dijual peternak hampir seluruhnya (98,45 persen) adalah dalam bentuk ternak hidup. Penjualan dalam bentuk produk lain berupa daging, hasil olahan, dan susu sedikit sekali. Tempat penjualan sapi potong dalam bentuk primer sebagian besar adalah ke pedagang/pengumpul/blantik. Alasan utama terbanyak adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian besar peternak (92,22 persen) tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran. Hanya sebagian kecil peternak saja (7,78 persen) yang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi peternak bervariasi mulai dari masalah rendahnya harga, transportasi atau angkutan, isu wabah/penyakit, dan lain-lain.

Persentase ternak yang dijual oleh peternak berfluktuasi tiap bulannya. Dari bulan Mei 2013 hingga April 2014 terlihat bahwa persentase terendah adalah pada bulan Mei 2013. Berikutnya mengalami peningkatan tiap bulan hingga mencapai yang tertinggi adalah pada bulan Oktober 2013. Hal ini terkait dengan hari Idul Fitri. Setelah itu terlihat persentase penjualan ternak menurun kembali hingga mendekati posisi awal yaitu sekitar persentase yang dijual pada bulan Mei 2013.

Pada tahun 2014 rata-rata harga daging sapi di tingkat produsen adalah Rp 54.225,85 per kg sedangkan rata-rata harga daging sapi di tingkat pengecer adalah Rp 94.555,21 per kg. Jadi margin yang dinikmati oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran daging sapi ini rata-rata adalah Rp 40.329,36 per kg. Margin ini sangat tinggi. Apalagi bila dibandingkan dengan harga yang diterima oleh produsen.

Korelasi harga di tingkat produsen dan di tingkat pengecer cukup erat ($r=0,914$). Walaupun demikian, karena koefisien korelasi yang didapat masih lebih kecil dari 1, maka disimpulkan bahwa pembentukan harga di dua pasar belum terintegrasi sempurna. Hal ini diperjelas oleh elastisitas transmisi yang juga kurang dari satu yaitu 0,6282. Jadi perubahan harga di tingkat pengecer/konsumen hanya diikuti oleh perubahan harga yang lebih kecil di tingkat produsen. Oleh karena itu disimpulkan bahwa pemasaran daging sapi belum efisien.

Pasar daging sapi yang terjadi juga belum bersaing sempurna. Ada kecenderungan bahwa pasar yang terjadi adalah oligopsonistik atau bahkan monopsonistik.

3. Jasa layanan pendukung

Jasa layanan pendukung agribisnis sapi potong terdiri dari koperasi, kelompok ternak, kemitraan, asosiasi, bantuan permodalan, dan bimbingan/penyuluhan. Secara umum jasa layanan pendukung agribisnis ini masih sangat kurang. Oleh karena itu untuk pengembangan agribisnis sapi potong ke depan, jasa layanan pendukung ini harus dioptimalkan. Partisipasi dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan.

Hanya 4,49 persen peternak sapi potong yang menjadi anggota koperasi, sedangkan sebagian besar peternak (95,51 persen) tidak menjadi anggota koperasi. Alasan utama terbanyak ruta usaha peternakan sapi potong yang tidak menjadi anggota koperasi adalah karena belum ada koperasi di desanya. Alasan utama ke dua terbanyak adalah karena belum/tidak berminat. Hanya sebagian kecil saja (0,96 persen) dari ruta usaha peternakan sapi potong yang pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi, sedangkan sebagian besar peternak (99,04 persen) tidak pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi. Padahal pelayanan yang diberikan koperasi cukup lengkap dari hulu hingga hilir. Dari pengadaan bibit (anak) sapi, pengadaan sapronak, kredit uang, kesehatan ternak, pemasaran produksi, dan lainnya. Pelayanan terbanyak adalah pemberian kredit uang, kemudian diikuti terbanyak ke dua adalah pelayanan kesehatan ternak. Pelayanan dalam pengadaan bibit (anak sapi) dan pemasaran hasil yang terkait erat dengan ketersediaan daging sapi perlu ditingkatkan.

Peternak sapi potong rakyat yang ikut dalam kelompok sangat rendah, yaitu hanya 5,95 persen. Sisanya 94,05 persen tidak menjadi anggota kelompok peternak. Sebagian besar peternak (67,97 persen) tidak ikut kelompok karena belum ada kelompok peternak di desanya. Sebanyak 26,95 persen tidak ikut kelompok karena memang belum/tidak berminat. Kondisi ini senada dengan alasan utama peternak tidak menjadi anggota koperasi. Sebagian besar peternak (96,71 persen) tidak pernah mendapatkan pelayanan dari kelompok peternak, dan hanya 3,29 persen peternak saja yang pernah mendapat pelayanan kelompok. Jenis pelayanan terbanyak yang diterima peternak dari kelompok peternak adalah pelayanan kesehatan kemudian pengadaan pakan.

Sedikit sekali ruta peternakan sapi potong yang ikut program kemitraan, yaitu hanya 0,28 persen, sedangkan 99,72 persen peternak tidak mengikuti program kemitraan. Kemitraan dilakukan peternak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta. Sebagian besar kemitraan ternyata dilakukan dengan pihak swasta.

Peternak yang menjadi anggota asosiasi peternak juga sedikit sekali, yaitu hanya 0,19 persen. Sebanyak 99,81 persen tidak menjadi anggota asosiasi peternak. Padahal dengan menjadi anggota asosiasi, peternak bisa memperoleh beberapa manfaat yaitu memperoleh inovasi teknologi, memperoleh jaringan informasi pasar, dapat menyalurkan aspirasi, dan lainnya.

Hanya 5,57 persen ruta peternakan sapi potong yang mendapat bantuan tambahan modal, sedangkan 94,43 persen ruta tidak mendapat bantuan tambahan modal. Ruta peternakan sapi potong mendapatkan tambahan modal dari berbagai sumber yaitu bank/KUR/PUAP, PNPM, koperasi/kelompok, perorangan, dan lainnya. Sumber terbanyak ternyata adalah perorangan. Hal ini sejalan dengan kondisi sedikitnya peternak yang menjadi anggota koperasi maupun kelompok. Peternak juga terlihat belum terbiasa dengan lembaga keuangan formal seperti bank.

Bimbingan dan penyuluhan hanya dirasakan oleh 5,71 persen ruta peternakan sapi potong, sedangkan sebagian besar ruta (94,29 persen) tidak pernah mendapat bimbingan dan penyuluhan. Alasan terbanyak tidak mendapat bimbingan dan penyuluhan adalah tidak pernah ada penyuluhan, kemudian diikuti oleh alasan merasa tidak perlu.

c. Dinamika Supply – Demand dan Swasembada Daging

Swasembada daging sapi mengandung makna bahwa kebutuhan daging sapi nasional dapat dipenuhi dari produksi daging sapi dalam negeri. Dalam program swasembada daging sapi tahun 2014 makna tersebut dirumuskan dengan lebih moderat lagi, yaitu swasembada daging sapi dikatakan tercapai jika 90 persen dari kebutuhan daging sapi dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi daging sapi dalam negeri (PSDS 2014). Sisanya, terutama produk daging sapi yang berkualitas tinggi dapat diperoleh dari impor. Pada sisi lain, variasi angka estimasi produksi dan konsumsi daging sapi nasional yang dikeluarkan oleh berbagai sumber sangat tinggi. Padahal angka-angka tersebut sangat penting untuk perumusan kebijakan pemerintah. Kementerian Koordinator Perekonomian mengambil inisiatif untuk mengajak *stakeholders* merumuskan bersama angka kesepakatan untuk menghitung produksi dan konsumsi daging sapi nasional. Beberapa kesepakatan dicapai, yaitu:

- Perhitungan produksi daging sapi dilakukan menggunakan metode tidak langsung, yaitu dari perkiraan potensial stok dari populasi sapi potong.
- Data potensial stok: BPS 2,8 juta ekor; Kementan 2,4 juta ekor; Kemendag 2,0 juta ekor; dan Apfindo 2,3 juta ekor. Angka yang disepakati 2,4 juta ekor.
- Data kebutuhan/konsumsi daging sapi:

BPS: konsumsi daging sapi terkoreksi berasal dari: rumah tangga (Susenas) 0,36 kg/kapita/tahun; industri (survai IBS dan IMK) 0,08 kg/kapita/tahun; serta Horeka dan lainnya 2,12 kg/kapita/tahun. Dengan demikian total konsumsi daging sapi per kapita per tahun (tahun 2015) adalah 2,56 kg, setara dengan 3,8 juta ekor sapi atau 653,98 ribu ton daging.

Kementan: konsumsi daging sapi 1,7 kg/kapita/tahun, setara dengan 2,7 juta ekor atau 454,70 ribu ton daging.

Kemendag: konsumsi daging sapi 2,0 kg/kapita/tahun, setara dengan 3 juta ekor atau 510,9 ribu ton daging.

Berdasarkan beberapa ketentuan perhitungan tersebut di atas estimasi produksi sapi siap potong tahun 2015 2,4 juta ekor setara 416,1 ribu ton daging, sedangkan angka estimasi konsumsi mencapai 3,8 juta ekor setara 653,98 ribu ton. Dengan demikian defisit daging sapi pada tahun 2015 mencapai 1,4 juta ekor sapi setara 237,88 ribu ton daging sapi. Berarti kontribusi produksi dalam negeri hanya 63,2 persen dari kebutuhan. Data ini kembali lagi mengingatkan semua pihak bahwa percepatan pengembangan agribisnis sapi potong sudah menjadi agenda nasional yang mendesak. Tanpa komitmen kuat untuk menyusun *blueprint* percepatan pengembangan agribisnis sapi potong yang diikuti dengan implementasi secara konsisten maka akan sulit mencapai swasembada daging sapi.

d. Percepatan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong

Mutu SDM, Kelembagaan, dan Regulasi. Kapasitas dan integritas SDM (pelaku usaha dan aparatur) sangat menentukan kinerja pembangunan agribisnis sapi potong. Peningkatan mutu SDM peternak dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan lapang, dan pembekalan *entrepreneurship*. Peningkatan mutu dan kinerja SDM aparatur dilakukan melalui pelatihan berjenjang, studi lanjut, studi banding, dan lain-lain. Terkait peningkatan mutu SDM, pemerintah harus berupaya melibatkan partisipasi perguruan tinggi dan pelaku usaha (*entrepreneur*) sukses.

Penguatan kelembagaan peternak (kelompok peternak, gapoktan, dan koperasi peternak) sapi potong sangat strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing agribisnis. Melalui kelompok peternak sapi potong dapat dibangun aksi kolektif yang memungkinkan terwujudnya sinergi dan tercapainya skala bisnis yang lebih layak. Selain itu, kerjasama kemitraan harus terus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan inti-plasma dalam seluruh aktivitas agribisnis menuju peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Pada situasi kompetisi global yang semakin ketat, peran kebijakan dan regulasi sangat menentukan kemampuan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha merumuskan kebijakan dan menetapkan regulasi yang mampu mendorong tumbuhnya agribisnis peternakan sapi potong yang berdaya saing. Formulasi kebijakan juga harus disusun berdasarkan kajian lapang yang komprehensif, sehingga mudah diimplementasikan di lapang. Ke depan dukungan kebijakan dan regulasi harus ditangani dengan cermat untuk mengurangi berbagai distorsi yang terjadi pada setiap subsistem agribisnis (saprodi, budidaya, pascapanen/pengolahan, dan pemasaran hasil).

Akselerasi Peningkatan Populasi Sapi. Swasembada daging sapi merupakan permasalahan multi dimensi dan sangat dinamis, karena memiliki keterkaitan yang luas dengan banyak aspek. Namun, salah satu inti persoalan swasembada daging sapi di Indonesia adalah pada ukuran populasi sapi yang sangat kecil. Total populasi sapi potong sebanyak 14.824.373 ekor tahun 2011 merupakan jumlah yang sangat kecil. Peningkatan jumlah populasi sapi potong secara regular yang selama ini hanya berkisar 2–4 persen per tahun sangat sulit untuk mengejar laju peningkatan pertumbuhan konsumsi daging sapi nasional. Percepatan peningkatan populasi sapi potong nasional merupakan prasyarat

menuju swasembada daging. Mencermati bahwa 97.97 persen sapi potong berada di rumah tangga usaha peternakan maka basis upaya percepatan peningkatan populasi sapi potong harus bertumpu pada usaha peternakan sapi potong rakyat.

Negara yang sukses membangun pertanian biasanya meletakkan pengembangan bibit bermutu sebagai prioritas. Selama ini kegiatan perbibitan sapi potong di Indonesia lebih bertumpu pada produksi Rata peternakan. Padahal Rata tersebut memiliki skala usaha kecil (2–3 ekor) dengan praktik budidaya ternak kurang profesional, sehingga sulit diharapkan dapat menyediakan sapi bakalan berkualitas dalam jumlah cukup. Akibatnya agribisnis sapi potong di Indonesia selalu mengalami kesulitan sapi bakalan. Aspek perbibitan ternak harus dibangun lebih cepat untuk meningkatkan populasi. Pembangunan aspek perbibitan mencakup kebijakan perbibitan, pemuliaan ternak, inovasi teknologi reproduksi, serta pengadaan dan penyebaran bibit ternak unggul. Untuk mendorong tumbuhnya usaha perbibitan sapi potong diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pengembangan industri perbibitan sapi potong. Insentif khusus perlu segera dirancang untuk menarik banyak investor masuk ke industri perbibitan sapi potong.

Aspek reproduksi ternak merupakan faktor kunci suksesnya program peningkatan populasi ternak sapi potong. Reproduksi melalui kawin alam dan/atau inseminasi buatan sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala, meskipun pemerintah terus berupaya mengembangkan infrastruktur inseminasi buatan dan menambah tenaga inseminator. Peningkatan program reproduksi ternak berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah kelahiran. Program peningkatan reproduksi ternak sapi potong harus terus diperluas secara bertahap menuju kondisi ideal: satu induk menghasilkan satu anak dalam satu tahun. Pengembangan reproduksi dengan inseminasi buatan (IB) terbukti efektif dan ampuh untuk mengatasi kendala sebaran wilayah yang luas. Untuk meningkatkan keberhasilan program IB maka di provinsi/kabupaten/kota setiap tahun harus diprogramkan pelatihan kepada para tenaga inseminator dan penyediaan anggaran yang diperlukan.

Dalam situasi populasi ternak sapi potong nasional yang masih sangat kecil maka pengendalian laju pemotongan ternak lokal adalah sesuatu yang sangat strategis. Pemotongan ternak lokal harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga tidak mengganggu program peningkatan populasi. Lebih-lebih ternak betina produktif, yang menjadi basis peningkatan jumlah kelahiran anak sapi. Kebijakan impor sapi dapat menjadi pilihan yang bijaksana apabila dilakukan dalam kerangka melindungi populasi sapi nasional. Sesungguhnya laju pemotongan ternak lokal dapat dikurangi dengan meningkatkan bobot potong sapi hasil penggemukan, sehingga produksi daging per ekor sapi dapat lebih tinggi. Penyelamatan sapi betina produktif harus menjadi program prioritas, karena sapi ini merupakan wujud industri biologis penghasil anak sapi.

Sejak semakin maraknya kasus penyakit ternak yang berimplikasi luas terhadap produksi ternak dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) maka kesehatan hewan (keswan) dan kesmavet menjadi isu strategis dunia. Pengembangan agribisnis peternakan

sapi potong harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keswan dan kesmavet. Program pengelolaan keswan dan kesmavet harus berhasil mendorong peningkatan produktivitas ternak, mewujudkan produk ternak yang ASUH, dan menghindari penyebaran penyakit zoonosis. Dalam kaitan ini, upaya deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan pemberantasan penyakit ternak harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

Peningkatan Produktivitas Sapi Potong. Peningkatan produktivitas sapi potong merupakan upaya penting lain yang terkait langsung dengan swasembada daging sapi. Sapi potong lokal yang dihasilkan oleh Ruta peternakan memiliki bobot hidup yang relatif kecil menjelang dipotong. Selain karena rendahnya mutu genetik, bobot potong yang rendah tersebut dipengaruhi oleh mutu pakan, cekaman lingkungan, penyakit parasit, dan lain-lain.

Produksi ternak sapi potong sangat dipengaruhi oleh pakan. Peningkatan mutu pakan sangat strategis untuk mendorong peningkatan kinerja agribisnis sapi potong. Aspek pengelolaan pakan mencakup teknologi produksi hijauan pakan, teknologi pemanfaatan biomasa sisa usaha pertanian dan agroindustri, teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan, serta formulasi ransum berkualitas berbasis sumberdaya lokal. Permasalahan pakan ternak pada Ruta peternakan yang perlu dicermati dengan serius adalah kecukupan energi dan protein untuk menunjang produksi dan reproduksi ternak. Selain itu, pemerintah perlu memperbanyak bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk pengolahan dan pengawetan pakan ternak sapi potong. Kekurangan alsintan menyebabkan peternak tidak mampu menggunakan sumber daya hijauan pakan atau jerami padi untuk disimpan sebagai silase, sehingga kelangkaan pakan pada musim kemarau selalu menjadi permasalahan yang berulang setiap tahun.

Teknologi budidaya ternak terus berkembang dan sangat strategis untuk meningkatkan kinerja agribisnis sapi potong. Pembangunan aspek budidaya ternak mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan rancangan kandang ternak yang nyaman, pengelolaan ransum, pemanfaatan limbah kandang, pengendalian penyakit ternak, dan lain-lain. Pengaruh cekaman panas pada ternak di lingkungan tropis harus menjadi perhatian serius, karena dapat mengakibatkan pemborosan penggunaan energi yang berasal dari pakan. Pada kondisi cekaman panas (*heat stress*) maka sebagian energi asal pakan akan digunakan ternak untuk menetralsir pengaruh cekaman panas.

Pembiayaan usaha peternakan merupakan aspek strategis yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan peternakan sapi potong. Selama ini pembiayaan usaha masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi peternak sapi potong. Dengan demikian, pengembangan skema kredit pembiayaan usaha peternakan sapi potong harus dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif lembaga keuangan. Skema kredit yang dikembangkan hendaknya terdapat subsidi bunga, prosedur administrasi yang sederhana, dan waktu proses yang singkat. Skema subsidi hendaknya dialihkan dari subsidi saprodi (sarana produksi) menuju subsidi bunga bank. Asuransi kredit khusus untuk usaha peternakan sapi potong juga perlu dikembangkan.

Pemasaran Hasil dan Penyuluhan. Aspek pemasaran merupakan masalah besar yang dihadapi peternak sapi potong. Dalam rantai tataniaga sapi potong yang ada saat ini, posisi peternak rakyat sangat lemah dan peran belantik sapi sangat kuat. Masih dengan mudah dijumpai transaksi penjualan ternak sapi potong tidak menggunakan timbangan bobot tubuh, tetapi menggunakan metode taksiran terhadap postur tubuh ternak sapi. Kebijakan dan regulasi dalam pembangunan peternakan hendaknya secara langsung menimbulkan kepercayaan peternak/publik terhadap pemasaran produk. Penanganan masalah pemasaran produk mencakup kelayakan harga, jaminan sertifikasi produk, dan lain-lain. Kinerja penyuluhan pertanian di Indonesia cenderung semakin menurun sejak era reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh makin terbatasnya jumlah penyuluh dan makin menurunnya kapasitas penyuluh yang ada. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi program penyuluhan pertanian. Keterbatasan tenaga penyuluh sesungguhnya dapat diatasi dengan mengembangkan *cyber extension*. Namun, *cyber extension* masih menghadapi kendala karena infrastruktur TIK di daerah terpencil belum mendukung.

<http://www.bps.go.id>



1

Pendahuluan

BAB 1

Pendahuluan

“Target swasembada daging sapi yang dicanangkan pemerintah ternyata masih sulit dicapai pada tahun 2014.”



1.1 Latar Belakang

Target swasembada daging sapi yang dicanangkan Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata masih sulit untuk dicapai pada 2014. Produksi daging sapi pada tahun 2014 masih tercatat 453 ribu ton, sedangkan tingkat konsumsi daging diperkirakan mencapai 550 ribu ton. Pemerintahan baru Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla tidak secara eksplisit mencanangkan target swasembada sapi seperti pada pemerintahan sebelumnya. Namun, secara implisit, produksi daging sapi ditargetkan mencapai 755 ribu ton pada tahun 2019, atau ditargetkan mencapai pertumbuhan 10,8 persen per tahun, suatu target yang amat tinggi.

Persoalan utama pada ketidakberhasilan target swasembada daging sapi tersebut adalah karakter peternakan sapi rakyat yang masih jauh dari prinsip-prinsip bisnis moderen. Dengan pola manajemen usaha ternak selama ini, dengan skala kepemilikan sapi rakyat hanya 2-3 ekor, maka target-target peningkatan produksi daging sapi yang dicanangkan pemerintah terlalu sulit untuk dicapai. Pada saat target swasembada daging sapi itu ditetapkan oleh Pemerintahan sebelumnya, asumsi utama yang digunakan adalah jumlah populasi sapi dan kerbau hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011. Data PSPK 2011 menunjukkan bahwa populasi sapi dan kerbau pada 1 Juni 2011 berjumlah 16,7 juta ekor, dengan rincian populasi sapi potong mencapai 14,8 juta ekor; sapi perah 597,2 ribu ekor dan kerbau 1,3 juta ekor.

Populasi sapi potong di Jawa Timur berjumlah 4,7 juta ekor; Jawa Tengah 1,9 juta; Sulawesi Selatan 984 ribu ekor; NTT 778,6 ribu ekor; Lampung 742,8 ribu ekor; NTB 685,8 ribu ekor; Bali 637,5 ribu ekor; dan Sumatera Utara 541,7 ribu ekor. Populasi sapi perah terbanyak terdapat di Jawa Timur 296,4 ribu ekor, sedangkan populasi kerbau terbanyak di NTT sebanyak 150 ribu ekor.

Akan tetapi, hasil perhitungan Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST2013) menunjukkan bahwa populasi sapi dan kerbau hanya tercatat 14,2 juta ekor atau menurun 2,5 juta ekor. Provinsi yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah populasi sebanyak 3,8 juta ekor, kemudian Provinsi Jawa Tengah (1,7 juta ekor), dan Provinsi Sulawesi Selatan (1,1 juta ekor). Sedangkan provinsi yang memiliki sapi dan kerbau paling sedikit adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah populasi sebanyak 5 ribu ekor. Penurunan populasi sapi sebesar 2,5 juta ekor dalam 2 tahun tentu amat berpengaruh pada target-target besar produksi daging sapi di tingkat nasional, serta upaya pencapaian swasembada sapi, yang telah dicanangkan sekian tahun yang lalu. Indonesia berupaya melepaskan ketergantungan impor sapi yang hampir 40 persen berasal dari Australia dan Selandia Baru, dengan menetapkan target swasembada daging sapi tersebut.

Studi-studi tentang agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi tidak terlalu jelas dalam menggambarkan tingkah laku peternak pada suatu sistem produksi yang prospektif. Upaya besar untuk meningkatkan produksi daging sapi yang mampu memenuhi konsumsi daging di dalam negeri seakan menemui tembok besar, apalagi untuk mencapai target-target swasembada daging sapi. Demikian pula, kebijakan peningkatan produksi dan governansi program swasembada sapi secara umum seakan mengalami tantangan yang sangat serius. Lonjakan harga daging sapi di dalam negeri yang terjadi sejak tahun 2013 sampai 2015 - yang hampir mencapai dua kali lipat - tidak berhasil diturunkan dan distabilkan, walau pun impor sapi dan daging sapi telah cukup liberal dan nyaris tidak terdapat hambatan berarti. Hampir semua analisis ekonomi pertanian sepakat bahwa kenaikan harga daging sapi yang hampir mencapai dua kali lipat tersebut telah ikut "menguras" stok sapi di tingkat masyarakat. Persoalan lain yang menyelubungi sistem produksi, struktur pasar dan tataniaga sapi dan daging sapi di dalam negeri masih cukup pelik untuk segera ditanggulangi dalam waktu singkat.

Fenomena penurunan populasi sapi, beserta perubahan profil usaha rumah tangga budidaya sapi menurut hasil-hasil Sensus Pertanian, serta dinamika lingkungan ekonomi yang melingkupinya seharusnya dapat menjawab sekian pertanyaan strategis dalam agribisnis daging sapi dan kebijakan peternakan di Indonesia, misalnya:

- (1) Bagaimana perkembangan profil agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi rakyat menurut wilayah, dan bagaimana kinerja agribisnis usaha rumah tangga serta kelayakan usahanya?
- (2) Berapa besar perubahan stok pasif dan stok aktif sapi, terutama yang dikuasai rumah tangga peternakan rakyat, sebagai basis estimasi produksi daging sapi, serta berapa besar kontribusi usaha rumah tangga agribisnis sapi dan pencapaian target swasembada daging nasional?
- (3) Berapa besar daya dukung wilayah dalam pengembangan usaha rumah tangga agribisnis sapi?

1.2 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kinerja agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi dan target-target swasembada daging. Secara rinci, kajian ini bertujuan:

- (1) Mengetahui perkembangan profil agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi rakyat menurut wilayah, dan mengetahui kinerja agribisnis usaha rumah tangga serta kelayakan usahanya;
- (2) Menganalisis perubahan stok pasif dan stok aktif sapi, terutama yang dikuasai rumah tangga peternakan rakyat, sebagai basis estimasi produksi daging sapi, dan mengetahui kontribusi usaha rumah tangga agribisnis sapi dan pencapaian target swasembada daging nasional;
- (3) Mengetahui daya dukung wilayah dalam pengembangan usaha rumah tangga agribisnis sapi;

1.3 Keluaran Kajian

Keluaran dari kajian ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen utuh tentang kinerja agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi, serta relevansinya dengan target-target swasembada daging. Ekspektasi hasil akhir dari kajian ini adalah beberapa informasi dan hasil analisis yang komprehensif tentang:

- (1) Perkembangan profil agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi rakyat menurut wilayah, setidaknya yang melingkupi dua Sensus Pertanian 2003 dan 2013. Kinerja usaha rumah tangga agribisnis sapi dan kelayakan usahanya dalam suatu hasil analisis komprehensif

agribisnis usaha rumah tangga budidaya sapi yang mencakup penggunaan sarana produksi, tenaga kerja, berikut estimasi tingkat upah atau harga faktor produksi, serta jumlah produksi daging sapi pada estimasi harga yang berlaku. Informasi hasil ini juga memuat beberapa sumber pembiayaan usaha rumah tangga budidaya sapi, berikut kinerja pendapatan usaha antara usaha sapi yang menggunakan bakalan impor dan bakalan lokal;

- (2) Informasi komprehensif tentang perubahan stok pasif dan stok aktif sapi, terutama yang dikuasai rumah tangga peternakan rakyat. Penurunan populasi sapi sebesar 2,5 juta ekor dalam dua tahun tentu amat berpengaruh pada kinerja perubahan stok pasif dan stok aktif sapi di Indonesia. Informasi tersebut amat berharga sebagai basis estimasi produksi daging sapi. Profil kontribusi usaha rumah tangga agribisnis sapi dalam pencapaian target swasembada daging nasional, lengkap dengan informasi utuh tentang hambatan dan tantangan agribisnis sapi skala rakyat sebagai tumpuan target swasembada daging sapi. Profil di atas dapat diturunkan untuk menghasilkan rumusan strategi percepatan kebijakan pengembangan sapi rakyat, termasuk opsi kombinasi bakalan impor dan bakalan lokal, serta pembenahan struktur pasar dan tataniaga daging sapi di Indonesia.
- (3) Potret daya dukung wilayah dalam pengembangan usaha rumah tangga agribisnis sapi, terutama dalam kaitannya dengan potensi berbagai wilayah dalam mendukung usaha sapi rakyat dan penyediaan pakan, hijauan, dan ketersediaan padang penggembalaan.

2

Tinjauan Pustaka dan Hasil Studi Terdahulu

BAB 2

Tinjauan Pustaka dan Hasil Studi Terdahulu

"Impor daging sapi tidak dapat dihindari karena produksi nasional hanya mampu memenuhi 50-70 % kebutuhan konsumsi dalam negeri."



2.1 Agribisnis

Saragih (1998) menyatakan bahwa agribisnis merupakan cara baru dalam melihat atau menganalisis pertanian. Cara baru yang dahulu melihat pertanian secara sektoral, sekarang pertanian dilihat secara intersektoral. Dahulu melihat pertanian secara subsistem sekarang melihat secara sistem. Bila agribisnis usahatani dianggap subsistem, maka ia tidak terlepas dari agribisnis non-usahatani seperti agribisnis hulu dan hilir. Sistem agribisnis adalah bentuk moderen dari pertanian primer yang paling sedikit mencakup empat subsistem berikut yaitu:

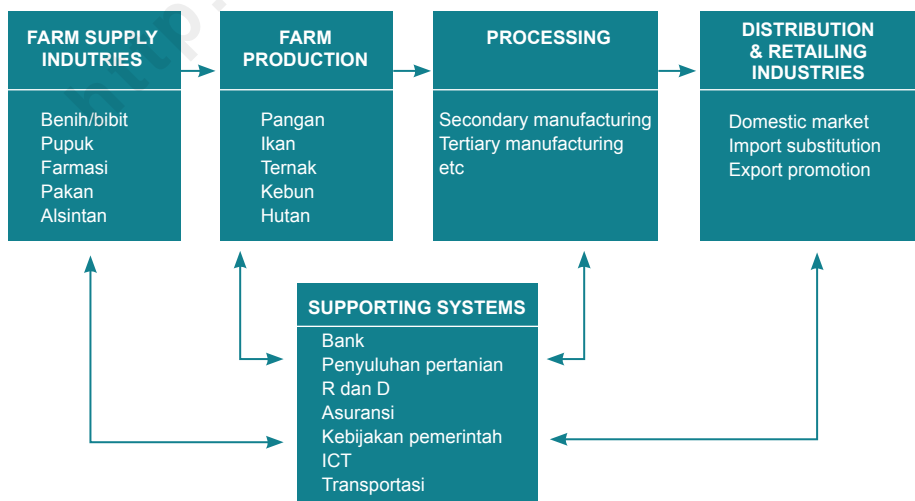
- (1) subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer (seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit/benih, alat dan mesin pertanian dan lain-lain);
- (2) subsistem usahatani (*on-farm agribusiness*) yang pada masa lalu disebut sektor pertanian primer;
- (3) subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik dalam bentuk yang siap untuk dimasak atau disajikan (*ready to cook/ ready for use*) atau siap untuk dikonsumsi (*ready to eat*) beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional; serta

- (4) subsistem jasa layanan pendukung seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, asuransi agribisnis, dan lain-lain.

Abidin (2007) mengemukakan bahwa untuk membangun agribisnis yang kompetitif dan menyejahterakan petani maka diperlukan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kebijakan pelayanan dasar bagi terciptanya iklim agribisnis yang kondusif antara lain:

- (1) penyediaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) bagi semua lapisan masyarakat produsen dan konsumen yang dapat mengefektifkan penyuluhan pertanian hingga pemasaran input maupun output pertanian;
- (2) penyediaan sarana transportasi publik yang cepat dan murah yang menjangkau daerah terisolir;
- (3) kebijakan yang mengarah kepada penguatan kemampuan keuangan dan investasi produsen melalui perbankan khusus pertanian;
- (4) pemberdayaan kembali lembaga penelitian dan pengembangan; serta
- (5) reformasi politik yang lebih bias kepada penguatan petani dan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sistem agribisnis tersebut dengan beberapa subsistemnya secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.
Sistem Agribisnis

Sumber: Abidin, 2007

Keseluruhan subsistem tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Apabila salah satu subsistem mengalami hambatan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak langsung terhadap subsistem yang lain. Pengembangan agribisnis secara keseluruhan ditentukan oleh pengembangan masing-masing subsistem dalam sistem agribisnis tersebut. Oleh karena itu koordinasi antar subsistem menjadi sangat penting.

Pembangunan peternakan dalam rangka mencapai swasembada daging sapi dapat dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis. Usaha rumah tangga budidaya sapi tidak hanya semata terfokus kepada subsistem budidaya (*on farm*) saja. Subsistem hulu hingga subsistem hilir juga harus diperhatikan dengan cermat. Selain itu, jasa layanan pendukung usaha rumah tangga budidaya sapi juga harus dikembangkan secara proporsional.

Subsistem hulu yang mencakup ketersediaan bibit ternak, pakan hijauan dan konsentrat, obat-obatan, serta bahan saprodi lainnya harus dibangun secara tangguh dan berbasis sumberdaya lokal. Subsistem budidaya juga harus ditunjang oleh manajemen pemeliharaan ternak yang baik serta didukung oleh inovasi teknologi budidaya yang efisien. Hal yang sama perlu juga dibenahi pada dua subsistem lainnya, yaitu subsistem pengolahan hasil dan subsistem pemasaran/ tataniaga.

Pada industri peternakan sapi, peran jasa layanan pendukung sangat menentukan keberhasilan pengembangan sistem agribisnis. Beberapa layanan pendukung yang masih terasa lemah dalam menunjang pengembangan agribisnis sapi potong antara lain: lembaga pembiayaan, SDM teknis peternakan (termasuk tenaga inseminator, tenaga kesehatan ternak, penyuluh, dan lain-lain.), jasa layanan kesehatan ternak (Poskeswan), infrastruktur transportasi, dan lain-lain. Pembangunan peternakan ke depan harus dirancang dengan memperhatikan saling keterkaitan antara empat subsistem tersebut, lengkap dengan dukungan layanan penunjang.

2.2. Swasembada Daging

Salah satu faktor penentu daya saing bangsa pada era global adalah kualitas SDM. Selain melalui program pendidikan yang berkualitas, keberhasilan pembangunan SDM sangat ditentukan juga oleh kecukupan pasokan zat-zat nutrisi melalui pangan yang berkualitas, termasuk pangan atau protein hewani. Oleh karena itu, jaminan kecukupan pasokan protein hewani menjadi sangat strategis untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Kebijakan yang menaungi upaya pemenuhan daging sapi nasional selama kurun waktu tahun 1982 s.d 2015 tertuang dalam berbagai

peraturan, mulai tingkat perundangan hingga tingkat departemen. Kebijakan tersebut meliputi (Feriyanto, 2010; Indriyani, 2011; Achmad, 2013; Rosiana dan Feriyanto, 2014):

1. SK Menteri Pertanian No. 750/KPTS/Um/10/1982 tentang syarat-syarat pemasukan bibit ternak dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, populasi, mutu ternak, dan pendapatan peternak.
2. SK Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/1997 tentang pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, perternakan dan perikanan. Kebijakan ini bertujuan agar mutu dan efisiensi produksi meningkat serta juga meningkatkan daya saing.
3. Undang Undang No. 5 tahun 1999, tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi usaha peternakan rakyat.
4. Permentan No. 20/Permentan/OT.140/42009 tentang pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan atau jeroan dari luar negeri.
5. Undang Undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan ini mengatur pengeluaran bibit/benih atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan RI dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri dan kelestarian ternak lokal dapat terjamin.
6. Permentan No. 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang syarat dan tatacara pemasukan dan pengeluaran benih, bibit ternak, dan ternak potong.
7. Program swasembada sapi tahun 2014. Merupakan program unggulan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal.

Lebih lanjut Rosiana dan Feryanto (2014) menyimpulkan bahwa program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) tahun 2014 tidak dapat diwujudkan. Kondisi ini dapat dilihat dari besaran impor yang berada pada kirsan 30—60% dari total pemenuhan daging sapi nasional. Padahal targetnya hanya sebesar 10%. Berdasarkan indikator daya saing, terjadi kecenderungan penurunan daya saing sapi potong di berbagai daerah. Dalam kurun waktu 1995—2013 nilai DRC semakin mendekati satu (0,55—0,96). Meskipun demikian, nilai DRC tersebut masih menunjukkan bahwa secara komparatif produksi sapi potong di Indonesia secara alamiah masih unggul, karena keberlimbahan sumber daya natural untuk pengembangan sapi potong nasional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2013 ditetapkan bahwa rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk pada tingkat konsumsi adalah 2.150 kkalori dan 57 gram. Dari 57 gram protein tersebut sebesar 10 gram adalah protein hewani (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Dalam pedoman pola konsumsi pangan beragam bergizi dan berimbang yang dituangkan dalam Pola Pangan Harapan ditetapkan bahwa kontribusi energi terhadap konsumsi energi total adalah 12 persen.

Swasembada daging sapi merupakan program yang sudah sejak lama dicanangkan dan dilaksanakan pemerintah, yaitu tahun 2005, 2010, dan 2014. Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi banyak kendala di lapang, sehingga dinilai kurang berhasil yang tercermin dari lambatnya pertumbuhan populasi sapi dalam negeri dan masih tingginya jumlah impor sapi dan daging sapi.

Dalam rangka pelaksanaan Program Swasembada Daging Tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014. Beberapa sasaran penting yang tercantum dalam Permentan No 19 Tahun 2010 adalah:

- (1) Meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta ekor tahun 2014, dengan rata-rata pertumbuhan 12,48%
- (2) Meningkatnya produksi daging sapi dalam negeri sebesar 420,3 ribu ton pada tahun 2014 atau meningkat 10,4% setiap tahunnya
- (3) Tercapainya penurunan impor sapi dan daging sapi sehingga hanya mencapai 10% dari kebutuhan konsumsi masyarakat
- (4) Bertambahnya penyerapan tenaga kerja sebagai dampak pertambahan populasi dan produksi sebanyak 76 ribu orang per tahun
- (5) Meningkatnya pendapatan peternak sapi potong minimal setara dengan UMR di masing-masing provinsi.

Beberapa sasaran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana program swasembada daging sapi berikutnya.

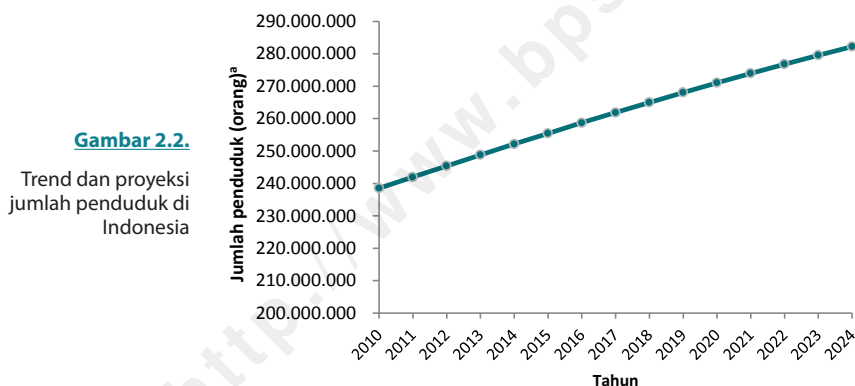
2.2.1 Dinamika Ketersediaan Daging Sapi Nasional

Dinamika ketersediaan daging sapi secara nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: subsistem kebutuhan daging sapi nasional, subsistem penyediaan daging sapi nasional, dan subsistem distribusi/ tataniaga daging sapi nasional.

(1) Subsistem kebutuhan daging sapi nasional

Dinamika kebutuhan nasional daging sapi sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk dan jumlah konsumsi daging sapi per kapita. Peningkatan konsumsi daging sapi per kapita sangat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya protein hewani (Dwiyanto, 2008).

Perkembangan jumlah penduduk Indonesia dan proyeksinya hingga tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.2. Dari Gambar 2.2. terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 1,43% per tahun. Pertambahan jumlah penduduk yang konsisten tersebut tentu saja berimplikasi langsung terhadap peningkatan kebutuhan daging sapi secara nasional.



Pada sisi lain, konsumsi daging sapi diprediksi terus meningkat sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk. Perlu pula dicermati bahwa upaya meningkatkan konsumsi protein hewani per kapita per tahun merupakan salah satu program unggulan pemerintah, meskipun berdasarkan data Susenas (2013) konsumsi protein hewani masyarakat sudah mencapai 12,67 gram per kapita per hari, yang berarti telah memenuhi standar yang besarnya 10 gram per kapita per hari. Dari jumlah konsumsi protein tersebut ternyata kontribusi daging sapi masih sangat kecil yaitu hanya satu persen. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi daging sapi per kapita per tahun adalah suatu keniscayaan dan tentu saja berimplikasi langsung terhadap peningkatan kebutuhan daging nasional. Data konsumsi

daging sapi per kapita per tahun sampai dengan tahun 2014 dan proyeksi konsumsi daging sapi nasional sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.1.

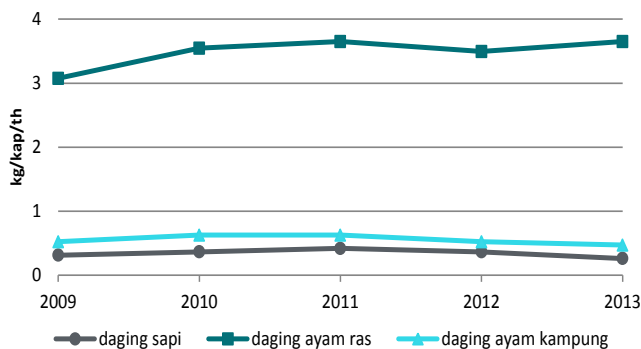
Tahun	Konsumsi daging sapi (kg/kapita/tahun)	Konsumsi daging sapi nasional (ton)
2010	1,76	418.248,73
2011	1,87	450.726,72
2012	2,09	510.937,42
2013	2,22	550.457,92
2014	2,36	593.516,62
2015	2,56	639.857,57
2016	2,72	684.884,27
2017	2,88	729.910,96
2018	3,04	774.937,66
2019	3,20	819.964,36
2020	3,36	864.991,05
2021	3,52	910.017,75
2022	3,68	955.044,45
2023	3,84	1.000.071,14
2024	4,00	1.045.097,84

Tabel 2.1.

Konsumsi daging sapi per kapita per tahun dan konsumsi daging sapi nasional

Sumber: BPS (2014^a). ST2013-L, diolah

Dengan semakin naiknya harga daging sapi menyebabkan konsumsi daging sapi sebagian akan digantikan oleh daging hewani yang lain terutama daging ayam ras. Diantara berbagai jenis daging, konsumsi daging ayam ras adalah yang tertinggi. Konsumsi daging sapi berada pada posisi ke empat diantara delapan jenis daging yang lain. Posisi pertama ditempati oleh daging ayam ras dengan rata-rata konsumsi per kapita per tahun sebesar 3,62 kg, dengan konsumsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 2.3. memberikan ilustrasi trend konsumsi tiga jenis daging dari tahun 2009 ke 2013.



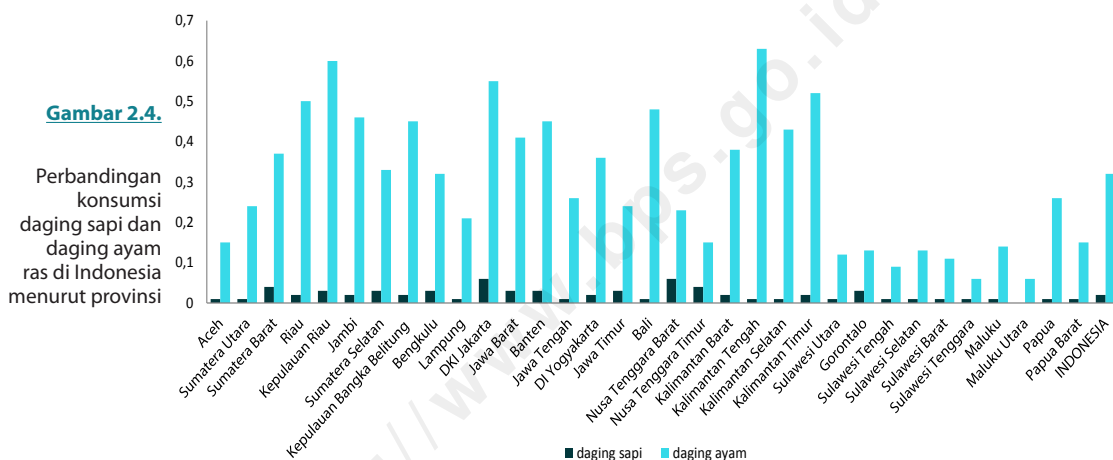
Gambar 2.3.

Trend konsumsi daging sapi, ayam kampung, dan ayam ras.

Sumber data: <http://www.pertanian.go.id/Indikator/tabe-15b-konsumsi-rata.pdf>

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa konsumsi daging ayam ras meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2012, sementara konsumsi daging sapi terus menurun. Konsumsi daging ayam kampung juga terjadi penurunan, namun demikian penurunannya lebih rendah dari pada daging sapi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa daging ayam ras potensial sebagai pensubstitusi daging sapi. Perbandingan jumlah konsumsi daging sapi dengan daging ayam ras di Indonesia menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 memperjelas hubungan antara konsumsi daging sapi dengan daging ayam ras. Apabila diperhatikan Gambar 2.4 terlihat bahwa konsumsi daging sapi relatif rendah di provinsi dengan konsumsi ayam tertinggi (Kalimantan Tengah). Demikian sebaliknya di provinsi dengan konsumsi daging sapi tertinggi, konsumsi daging ayam rasnya relatif rendah (Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).



Sumber data: Badan Pusat Statistik (2013^b)

(2) Subsistem penyediaan produk daging sapi nasional

Dinamika ketersediaan daging sapi nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah populasi dan kualitas sapi dalam negeri. Dinamika populasi sapi dalam negeri ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: (a) tingkat kelahiran ternak (*calf crop*), yaitu persentase sapi betina dewasa yang melahirkan anak per tahun; (b) tingkat pemotongan sapi untuk konsumsi; dan (c) tingkat kematian (mortalitas) sapi (Ensminger *et al.*, 1990).

Kualitas sapi tercermin dari bobot tubuh pada akhir penggemukan dan presentase karkas (Harmini *et al.*, 2011). Pencapaian bobot tubuh yang tinggi sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki ternak dapat diraih melalui penerapan manajemen pemeliharaan yang baik dan pemenuhan kebutuhan nutrisi secara berimbang. Optimasi bioproses nutrisi protein di rumen dapat menjadi teknologi alternatif untuk meningkatkan bobot akhir ternak sapi rakyat (Erwanto *et al.*, 2011).

Hasil penelitian Priyanti *et al* (2011) menunjukkan bahwa laju peningkatan populasi dan produksi daging sapi potong di wilayah sentra produksi menunjukkan nilai positif bervariasi antara 1 – 1,35% per tahun. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh peningkatan laju kenaikan populasi persilangan di wilayah-wilayah Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Hingga tahun 2024, produksi daging sapi di Indonesia diprediksi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Secara rinci proyeksi suplai daging sapi di Indonesia disajikan oleh Tabel 2.2.

Tahun	Produksi daging (ton)
2014	435.086,19
2015	446.180,61
2016	457.275,03
2017	468.369,45
2018	479.463,87
2019	490.558,29
2020	501.652,71
2021	512.747,13
2022	523.841,55
2023	534.935,97
2024	546.030,39

Tabel 2.2.
Proyeksi suplai daging sapi nasional

Sumber data: BPS (2014^b). ST2013-L, diolah

Keterangan: - Karkas: 50%

Produksi daging dan offal = 45% dari bobot potong

Faktor ke dua adalah impor ternak sapi hidup dan impor daging sapi. Selama 15 tahun terakhir, impor ternak sapi dan daging sapi menjadi salah satu instrumen penting untuk mencukupi ketersediaan daging sapi nasional. Meskipun dalam implementasinya, impor sapi dan impor daging sapi cenderung dikemas oleh pihak-pihak tertentu untuk dijadikan isu yang kontroversial.

Kajian Lubis dan Amzul Rifin (2014) menyimpulkan bahwa kebijakan impor paritas untuk daging beku tidak efektif untuk mengurangi fluktuasi harga daging sapi. Masyarakat dalam mengkonsumsi daging impor sangat mempertimbangkan status kehalalan daging sapi dari daerah asal. Upaya pengendalian fluktuasi harga dapat difokuskan kepada kebijakan impor bakalan dan sapi siap potong yang memberikan jaminan kehalalan dan menjaga kelangsungan usaha peternakan rakyat.

Menurut hasil kajian Tawaf dan Arief (2011) isu kontroversial tersebut sangat mungkin terjadi karena adanya perbedaan acuan data pada estimasi kondisi *supply* dan *demand*. Salah satu hal yang paling sulit adalah

melakukan estimasi potensi stok sapi potong. Terlebih lagi potensi stok tersebut dapat dirinci lagi menjadi stok sapi pasif (ada di peternak rakyat) dan stok sapi aktif (ada di perusahaan besar penggemukan sapi).

Proyeksi jumlah ketersediaan dan konsumsi daging sapi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tahun	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Selisih/kekurangan (ton)	Pemenuhan dari produksi dalam negeri (%)
2014	435.086,19	593.516,62	-158.430,42	73,31
2015	446.180,61	639.857,57	-193.676,96	69,73
2016	457.257,03	684.884,27	-227.609,23	66,77
2017	468.369,45	729.910,96	-261.541,51	64,17
2018	479.463,87	774.937,66	-295.473,79	61,87
2019	490.558,29	819.964,36	-329.406,06	59,83
2020	501.652,71	864.991,05	-363.338,34	58,00
2021	512.747,13	910.017,75	-397.270,62	56,34
2022	523.841,55	955.044,45	-431.202,90	54,85
2023	534.935,97	1.000.071,14	-465.135,17	53,49
2024	546.030,39	1.045.097,84	-499.067,45	52,25

Tabel 2.3.
Proyeksi jumlah ketersediaan dan konsumsi daging sapi

Sumber: Data Tabel 2.1 dan 2.2, diolah

Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa produksi daging sapi Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, atau dengan perkataan lain, terdapat kekurangan suplai daging sapi. Produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi konsumsi sekitar 50-70% saja.

Secara khusus perlu dicermati bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan serius pada pemotongan ternak sapi betina produktif. Pemotongan sapi betina produktif (PI₂ dan PI₃) di Indonesia masih tinggi. Sebagai contoh, hasil penelitian Soejosopoetro (2011) menemukan bahwa pemotongan sapi betina produktif masih cukup tinggi yaitu sebanyak 15.8% di RPH Singosari dan 26% di RPH Gadang, Malang Jawa Timur seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4.

No.	Umur (PI)	RPH Singosari		RPH Gadang	
		PO (ekor)	PFH (ekor)	PO (ekor)	PFH (ekor)
1	PI ₂	4	-	7	-
2	PI ₃	8	-	25	-
3	≥ PI ₄	14	50	35	56
Jumlah:		76		123	
Total keseluruhan:		199			

Tabel 2.4.
Data pemotongan sapi betina di RPH Singosari dan RPH Gadang, Malang Jawa Timur

Sumber: Soejosopoetro, 2011

Dengan adanya masalah seperti diuraikan sebelumnya, berakibat Indonesia masih kekurangan sapi maupun induk sapi. Karena produksi dalam negeri tidak mencukupi, kemungkinan perlu dilakukan impor. Pada Tabel 2.5 disajikan proyeksi jumlah kekurangan daging sapi, jumlah kebutuhan sapi dan induk sapi.

Tahun	Jumlah kekurangan daging	Jumlah kebutuhan sapi (ekor)	Jumlah kebutuhan induk (ekor)
2014	158.430.421	1.005.907	3.353.025
2015	193.676.957	1.229.695	4.098.983
2016	227.609.234	1.445.138	4.817.127
2017	261.541.511	1.660.581	5.535.270
2018	295.473.788	1.876.024	6.253.413
2019	329.406.064	2.091.467	6.971.557
2020	363.338.341	2.306.910	7.689.700
2021	397.270.618	2.522.353	8.407.844
2022	431.202.895	2.737.796	9.125.987
2023	465.135.172	2.953.239	9.844.131
2024	499.067.449	3.168.682	10.562.274

Tabel 2.5.
Proyeksi jumlah kekurangan sapi dan induk di Indonesia

Sumber: BPS (2014^b). ST2013-L, diolah

(3) Subsistem distribusi sapi potong dan daging sapi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang relatif luas. Sentra produksi ternak tidak tersebar merata, sehingga diperlukan transportasi laut dengan jarak tempuh yang jauh dan memerlukan waktu lama. Kondisi tersebut memerlukan dukungan infrastruktur transportasi laut dan darat yang baik, sehingga kesehatan ternak selama transportasi dapat terjamin secara layak. Sebagai gambaran selama 4 tahun (2008-2011) realisasi pengeluaran ternak dari Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 234.396 ekor (Winarso, 2014).

Transportasi laut dan darat memerlukan biaya yang cukup besar. Tjeppey *et al.* (1995) menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan dalam transportasi ternak potong meliputi biaya pemuatan dan bongkar (*loading* dan *unloading*), stasiun karantina dan jasa karantina, biaya transportasi laut dan darat, serta biaya-biaya teknis lainnya. Lebih lanjut, Ilham (2009) menambahkan bahwa pada keadaan tertentu, biaya transportasi akan semakin tinggi jika ada penerapan retribusi daerah (sumber PAD) yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/ kota.

Hasil penelitian Emhar *et al.* (2014) menemukan 3 aliran dalam rantai pasokan daging sapi di Kabupaten Jember, yaitu aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi yang tidak berjalan dengan optimal. Saluran distribusi daging sapi efisien berdasar nilai efisiensi pemasaran, margin pemasaran yang menguntungkan dan *shared valued* yang proporsional yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan setiap mata rantai. Rata-rata nilai tambah yang diperoleh usaha sapi potong adalah 36,24 % dari total output yang dihasilkan .

2.2.2 Kinerja Usaha Peternakan Sapi Rakyat

Kinerja usaha peternakan sapi rakyat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja usaha penggemukan sapi skala komersial. Capaian pertambahan bobot tubuh sapi potong rakyat masih berkisar 0.3 – 0.8 kg/ekor/hari. Sedangkan pada usaha penggemukan sapi skala komersial pertambahan bobot tubuh sapi harian sudah mencapai 1 – 1.4 kg per ekor. Tingkat capaian pertambahan bobot tubuh yang rendah pada usaha peternakan rakyat disebabkan oleh banyak hal, termasuk mutu bibit, manajemen pemeliharaan, kesulitan memenuhi kebutuhan pakan, pengelolaan kesehatan ternak, dan lain-lain.

Hasil penelitian Ekowati (2012) menjelaskan bahwa secara umum usaha ternak sapi potong rakyat di Provinsi Jawa Tengah masih menguntungkan. Secara khusus, produksi ternak sangat dipengaruhi oleh: (a) jumlah induk, (b) curahan waktu kerja, *service per conception* (jumlah perkawinan/IB per kebuntingan), (c) jumlah pakan hijauan, (d) jumlah pakan tambahan, dan (e) pengalaman beternak. Dijelaskan pula bahwa variabel yang sangat mempengaruhi pendapatan usaha sapi potong di Provinsi Jawa Tengah adalah: (a) harga pembelian induk, (b) jumlah sapi potong yang dipelihara, (c) harga pakan hijauan, (d) upah tenaga kerja, dan (e) bangsa ternak.

Hasil penelitian Sodiq dan Machfudin (2012) menunjukkan pemeliharaan sapi potong pada kelompok tani ternak di perdesaan bertujuan menghasilkan pedet dan bakalan (*cow calf operation*) serta usaha penggemukan (*fattening*). Produktivitas sapi *cow calf operation* sangat rendah dengan produktivitas pedet 6% dapa kebuntingan ke dua dan tingkat kematian pedet 25%. Hasil penggemukan sapi potong belum optimal yang diindikasikan kondisi BCS berkisar 3 sampai 6 dengan modus 4 (peranakan Ongole dan Sumba Ongole) dan 5 (persilangan Simental dan Charolais).

2.3. Isu Strategis Pembangunan Peternakan

Penyusunan program swasembada daging ke depan hendaknya memperhatikan dengan cermat isu-isu strategis pembangunan peternakan yang muncul dari hasil-hasil kajian sebelumnya. Secara umum, isu strategis pembangunan peternakan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) SDM Peternakan

Kapasitas SDM pelaku bisnis peternakan serta kualitas dan integritas SDM aparatur sangat menentukan kinerja pembangunan peternakan. Kebijakan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan harus memberi prioritas tinggi pada peningkatan mutu dan kinerja SDM. Peningkatan mutu SDM peternak dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan lapang. Peningkatan mutu dan kinerja SDM aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan berjenjang, studi lanjut, studi banding, dan lain-lain. Dukungan SDM berkualitas secara langsung akan meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan peternakan dan kinerja agribisnis peternakan.

(2) Kelembagaan dan Kemitraan

Sejak 20 tahun terakhir berkembang pesat pendekatan ekonomi kelembagaan dalam pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan peternak (kelompok peternak dan gapoktan) sangat strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis peternakan. Melalui kelompok peternak dapat dibangun aksi kolektif yang memungkinkan terwujudnya sinergi dan tercapainya skala bisnis yang lebih layak. Selain itu, kerjasama kemitraan harus terus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan inti – plasma dalam bisnis (termasuk pengadaan sarana produksi, budidaya, pascapanen, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil).

(3) Inovasi Teknologi Perbibitan

Produksi ternak ditentukan oleh mutu genetik dan pengaruh lingkungan (pakan, suhu, kenyamanan, penyakit, dan lain-lain). Dengan demikian, penggunaan bibit unggul menjadi faktor kunci keberhasilan dan daya saing bisnis peternakan. Aspek perbibitan harus dibangun lebih cepat. Pembangunan aspek perbibitan mencakup kebijakan perbibitan, pemuliaan ternak (seleksi dan persilangan), inovasi teknologi reproduksi, serta pengadaan dan penyebaran bibit ternak unggul.

(4) Inovasi Teknologi Pakan

Produksi ternak sangat dipengaruhi oleh masukan zat-zat nutrisi melalui pakan, bahkan kontribusi pakan dapat mencapai 70% dari biaya produksi. Peningkatan mutu pakan dan ransum sangat strategis untuk mendorong peningkatan kinerja bisnis peternakan. Aspek pengelolaan pakan yang strategis untuk dikembangkan mencakup inovasi teknologi produksi hijauan pakan, teknologi pemanfaatan biomasa hasil sisa usaha pertanian dan agroindustri, teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan, dan formulasi ransum berkualitas berbasis sumberdaya lokal, dan lain-lain.

Hal di atas sejalan dengan hasil penelitian Matondang dan Rusidana (2013) yang menunjukkan ketersediaan pakan merupakan aspek krusial dalam budidaya ternak. Untuk menjamin ketahanan pakan nasional, perlu langkah-langkah: pemberlakuan tarif ekspor bahan baku pakan, pembentukan institusi penyangga bahan baku pakan, pengembangan system kerjasama produksi pakan antarwilayah bagi wilayah padat ternak tetapi tidak memiliki lahan dan sebaliknya, pengembangan zona produksi hijauan pakan di perdesaan dan kesehatan hewan, pemetaan dan revitalisasi padang penggembalaan di NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan wilayah bukaan baru, pengembangan system mekanisasi pakan, subsidi harga bahan baku pakan, strukturisasi tata niaga bahan baku pakan, dan pengembangan system informasi pakan nasional.

(5) Inovasi Teknologi Budidaya Ternak

Teknologi budidaya ternak terus berkembang, termasuk perhatian publik terhadap aspek kesejahteraan ternak. Aspek budidaya ternak juga sangat strategis untuk diperhatikan guna peningkatan kinerja bisnis peternakan. Pembangunan aspek budidaya ternak mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan rancangan kandang ternak yang nyaman, pengelolaan ransum, pemanfaatan limbah kandang, pengendalian penyakit ternak, dan lain-lain. Pengaruh cekaman panas pada ternak di lingkungan tropis harus menjadi perhatian serius, karena dapat mengakibatkan pemborosan penggunaan energi yang berasal dari pakan.

(6) Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Sejak semakin maraknya kasus penyakit ternak yang berimplikasi luas terhadap produksi ternak dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) maka kesehatan hewan (keswan) dan kesmavet merupakan isu strategis dunia. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keswan dan kesmavet. Program pengelolaan keswan dan kesmavet harus berhasil mendorong peningkatan produktivitas ternak, mewujudkan produk ternak yang ASUH, dan menghindari penyebaran penyakit zoonosis. Dalam kaitan ini, upaya deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan pemberantasan penyakit ternak harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

(7) Pascapanen dan Pengolahan Hasil

Inovasi teknologi pada pascapanen dan pengolahan hasil sangat strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis peternakan. Melalui teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang tepat, dapat dicapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ternak. Selain itu, teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang baik akan mendukung perolehan produk ternak yang ASUH dan sesuai dengan permintaan pasar.

(8) Pembiayaan Usaha Peternakan

Pembiayaan Usaha Peternakan merupakan aspek strategis yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan peternakan. Selama ini pembiayaan usaha masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi peternak. Dengan demikian, pengembangan skema kredit pembiayaan usaha peternakan harus dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif lembaga keuangan. Dahri dan Hutagaol (2014) menyimpulkan bahwa Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) memiliki potensi besar untuk mendukung program swasembada sapi nasional. Skim kredit KKPE lebih sempurna dari skema KKP. Namun kelemahannya terletak pada akses kelompok peternak sasaran, sehingga realisasi kredit ini masih rendah. Realisasi kredit KKPE tahun 2014 baru mencapai 15%.

Skema kredit yang dikembangkan hendaknya terdapat subsidi bunga, prosedur administrasi yang sederhana, dan waktu proses yang singkat. Skema subsidi hendaknya dialihkan dari subsidi saprodi (sarana produksi) menuju subsidi bunga bank. Asuransi kredit khusus untuk usaha peternakan juga perlu dikembangkan.

(9) Pemasaran Hasil

Hasil beberapa kajian dan pengamatan lapang memperlihatkan bahwa aspek pemasaran merupakan masalah besar yang dihadapi peternak. Penanganan aspek pemasaran produk ternak sungguh sangat strategis. Kebijakan dan regulasi dalam pembangunan peternakan hendaknya secara langsung menimbulkan kepercayaan peternak/publik terhadap pemasaran produk. Pendekatan *market driven* dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan penting dalam penataan pasar produk-produk peternakan. Penanganan masalah pemasaran produk mencakup kelayakan harga, jaminan sertifikasi produk, dan lain-lain.

(10) Kebijakan dan Regulasi

Menghadapi situasi kompetisi global yang semakin ketat, peran kebijakan dan regulasi sangat menentukan kemampuan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha merumuskan kebijakan dan menetapkan regulasi yang mampu mendorong tumbuhnya bisnis peternakan yang berdaya saing. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan hendaknya meningkatkan motivasi dan keyakinan pengusaha untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Rangkaian kebijakan dan regulasi sangat diperlukan untuk mendorong pemantapan sub sistem input produksi, efisiensi proses produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil.





3

Metodologi Kajian

BAB 3

Metodologi Kajian

“Analisis yang dilakukan meliputi analisis pendapatan, analisis efisiensi pemasaran, analisis harga, dan analisis estimasi supply-demand daging sapi.”



3.1 Sumber Data dan Pengambilan Sampel

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah Sensus Pertanian 2013 (ST-2013) dan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP-2013). Sumber data utama berikutnya berasal dari data hasil Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan (STU-2013), Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK, 2011), Statistik Pemotongan Ternak 2014, Struktur Ongkos Usaha Sapi Potong, Watermark Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil, Susenas 2013, dan Sensus Indonesia 2015.

Secara khusus data yang digunakan untuk melakukan estimasi *supply and demand* bersumber dari:

1. Sensus Pertanian 2013
2. Laporan Triwulanan Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan (RPH/TPH) (Statistik Pemotongan Ternak, 2014)
3. Survei Peternakan Nasional (SPN) 2008
4. Survei Estimasi Parameter Mutasi Ternak (EPT) 2013
5. Survei Konsumsi Bahan Pokok (Susenas, 2013)
6. Statistik Indonesia, 2015
7. PSPK, 2011.
8. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), 2014 (Rata-rata meat yield per ternak adalah 170,14 Kg).

3.2 Definisi operasional

Usaha peternakan sapi potong adalah kegiatan yang menghasilkan produk peternakan sapi potong (melakukan pemeliharaan ternak sapi dengan tujuan sebagian/ seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/ keuntungan) atas resiko sendiri.

Peternak sapi potong adalah seseorang yang melakukan pemeliharaan sapi potong dengan tujuan sebagian/ seluruh hasilnya untuk dijual/ memperoleh keuntungan atas resiko.

Buruh usaha peternakan sapi potong adalah seseorang yang bekerja pada usaha pada bidang peternakan sapi potong dengan menerima upah/ gaji baik berupa uang maupun barang.

Kepala rumah tangga adalah salah seorang dari kelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau yang dianggap sebagai kepala di rumah tangga tersebut.

Rumahtangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha peternakan bila mengusahakan ternak sapi potong minimal 1 ekor atau lebih. Termasuk juga Pedagang ternak sapi potong yang melakukan penggemukan/pemeliharaan di atas 3-4 bulan.

Pengeluaran pakan ternak sapi potong adalah pengeluaran untuk pakan yang benar-benar telah dipakai selama setahun yang lalu. Pakan yang telah dibeli tetapi belum digunakan tidak dimasukkan sebagai pengeluaran pakan.

Pakan ternak dibedakan berdasarkan cara memperolehnya yaitu pembelian dan non pembelian, yang dimaksud dengan non pembelian adalah pakan ternak yang diperoleh dari pihak lain secara cuma-cuma misalnya dari pemberian orang lain dan produksi sendiri. Ternak yang merumput sendiri di padang rumput dan tempat lainnya.

Pengeluaran untuk Obat-obatan adalah pengeluaran untuk obat-obatan yang telah digunakan selama setahun yang lalu, termasuk yang dibeli tetapi sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Obat-obatan yang digunakan dapat berasal dari pembelian, buatan sendiri atau dari lainnya (misalnya, diberi pihak lain).

Nilai produksi ternak sapi potong adalah nilai produksi sebagai akibat pertambahan bobot/penggemukan sapi potong selama setahun.

Pendapatan usaha rumah tangga ternak sapi potong didefinisikan sebagai selisih antara nilai produksi dengan seluruh ongkos-ongkos produksi.

Sumber pendapatan utama adalah sumber pendapatan terbesar dari seluruh jenis pendapatan rumah tangga tersebut menurut jenis sumber pendapatan dan status pekerjaan.

Rumah tangga pemelihara ternak adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggotanya melakukan pemeliharaan ternak, tanpa melihat jumlah ternak dan tujuan pemeliharaan.

Kematian ternak sapi potong adalah jumlah ternak yang mati karena sakit atau kecelakaan seperti tertabrak kendaraan, terbenam, dimakan binatang buas, dan dimusnahkan. Mati karena dipotong/disembelih tidak termasuk dalam kategori mati, tetapi termasuk kategori pemotongan. Pemotongan adalah pemotongan ternak baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun dijual sebagian atau seluruhnya.

Pengurangan lain adalah pengurangan ternak yang disebabkan oleh: (1) Ternak yang diberikan kepada pihak lain sebagai bantuan, hibah, dan bagi hasil; (2) Penyerahan kembali ternak yang dibagi hasilkan kepada pemilik; dan (3) Ternak hilang karena dicuri atau sebab lain.

Kelahiran adalah lahir hidup, yaitu ternak yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak. Kelahiran tetap dicatat, walaupun pada saat pencacahan anak maupun induknya sudah tidak ada lagi (karena dijual, dipotong, dll).

Penambahan lain adalah penambahan ternak selain pembelian dan kelahiran, misalnya: (1) Ternak yang diterima dari pihak lain sebagai bantuan, hibah, dan bagi hasil; (2) Penerimaan dari pengembalian ternak bagi hasil; dan (3) Ternak yang ditemukan.

Stok awal adalah jumlah ternak yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat setahun yang lalu (dihitung satu tahun mundur mulai satu hari sebelum pencacahan).

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik terdiri dari tabel silang, grafik, maupun indikator proporsi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengkaji karakteristik rumah tangga usaha peternakan. Hal-hal lain yang dikaji melalui analisis statistik deskriptif antara lain profil usaha sapi potong rakyat dan analisis kinerja agribisnis sapi potong.

3.3.2 Analisis Pendapatan

Pendapatan usaha ternak sapi potong secara umum dihitung dengan rumus:

$$\Pi = TR - TC$$

$$\Pi = Y \cdot P_y - \text{--} BTT$$

dimana:

Π = pendapatan (Rp)

TR = *total revenue* atau penerimaan total (Rp)

TC = *total cost* atau biaya total (Rp)

Y = hasil produksi (kg)

P_y = harga hasil produksi (Rp)

X_i = faktor produksi ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

P_{xi} = harga faktor produksi ke- i (Rp)

BTT = biaya tetap total (Rp)

Analisis pendapatan ini dihitung berdasar biaya riil yang dikeluarkan peternak sapi potong maupun atas biaya yang seharusnya dikeluarkan peternak sapi potong. Biaya riil adalah biaya yang secara tunai dibayarkan oleh peternak sapi potong untuk berbagai faktor produksi yang digunakan dalam usaha ternak sapi potong. Biaya seharusnya adalah biaya tunai di atas ditambah dengan nilai faktor-faktor produksi yang tidak dibeli atau tidak dibayar secara tunai oleh peternak sapi potong tetapi digunakan dalam usaha ternak sapi potong. Nilai faktor-faktor produksi ini diperhitungkan seolah dibeli atau dibayar oleh peternak sesuai dengan harga yang berlaku. Faktor-faktor produksi tersebut misalnya hijauan dan tenaga kerja dalam keluarga.

Untuk mengetahui usaha ternak sapi potong menguntungkan atau tidak secara ekonomi dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara penerimaan dengan biaya (*Revenue Cost Ratio* atau R/C). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R/C = TR / TC$$

dimana:

R/C = nisbah penerimaan dan biaya

TR = total revenue atau penerimaan total (Rp)

TC = total cost atau biaya total (Rp)

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

Jika $R/C > 1$, maka usaha ternak sapi potong menguntungkan,

$R/C < 1$, maka usaha ternak sapi potong mengalami kerugian,

$R/C = 1$, maka usaha ternak sapi potong mengalami impas (Soekartawi, 2000).

R/C ini juga dihitung atas biaya riil dan biaya seharusnya.

3.3.3 Analisis Efisiensi Pemasaran

Analisis efisiensi pemasaran yang dilakukan meliputi analisis margin pemasaran dan analisis integrasi/keterkaitan pasar. Analisis keterkaitan pasar dilakukan melalui analisis korelasi harga dan elastisitas transmisi.

1) Analisis margin pemasaran

Menurut Hasyim (2012), efisiensi pemasaran pada masing-masing tingkat atau lembaga pemasaran dapat dilihat melalui besar margin pemasaran. Secara matematis margin pemasaran dirumuskan:

$$M = P_f - P_r$$

Keterangan:

M = margin pemasaran

P_r = harga rata-rata daging sapi di tingkat konsumen akhir (Rp/kg)

P_f = harga rata-rata daging sapi di tingkat peternak (Rp/kg)

2) Analisis integrasi/keterkaitan pasar

Keterkaitan antara dua pasar atau lebih yang tingkatnya berbeda dapat dicerminkan oleh hubungan harga antar pasar tersebut. Jika pembentukan harga antara kedua pasar tersebut terintegrasi maka struktur pasar bersaing sempurna. Analisis integrasi pasar secara vertikal dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana, sebagai berikut:

$$P_f = a + bP_r$$

Keterangan:

P_r = harga rata-rata daging sapi di tingkat konsumen akhir (Rp/kg)

P_f = harga rata-rata daging sapi di tingkat peternak (Rp/kg)

a = intersep

b = koefisien regresi

Selanjutnya keterkaitan pasar ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis koefisien korelasi harga dan elastisitas transmisi harga. Dari kedua analisis ini dapat diketahui efisiensi pemasaran daging sapi.

3.3.4 Analisis koefisien korelasi harga

Menurut Hasyim (2012), untuk menunjukkan apakah sistem pemasaran telah bekerja secara efisien atau pasar terintegrasi secara sempurna dapat digunakan analisis korelasi harga. Nilai koefisien korelasi tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{\left[n \sum_{i=1}^n (P_f \cdot P_r) \right] - \left[\left(\sum_{i=1}^n P_f \right) \left(\sum_{i=1}^n P_r \right) \right]}{\left[n \sum_{i=1}^n P_r^2 - \left(\sum_{i=1}^n P_r \right)^2 \right] \cdot \left[n \sum_{i=1}^n P_f^2 - \left(\sum_{i=1}^n P_f \right)^2 \right]}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi harga
- n = jumlah pengamatan
- Pf = harga rata-rata di tingkat petani produsen (Rp/kg)
- Pr = harga rata-rata di tingkat konsumen akhir (Rp/kg)

Apabila koefisien korelasi (r) mendekati satu, maka keeratan hubungan harga pada dua tingkat pasar sangat erat. Sebaliknya, bila koefisien korelasi (r) mendekati nol, berarti hubungan harga pada dua tingkat pasar kurang erat.

3.3.5 Elastisitas transmisi harga

Analisis ini menggambarkan sejauh mana dampak perubahan harga suatu barang di suatu tempat atau tingkatan berpengaruh terhadap harga barang itu di tempat lain atau tingkatan lain. Rumus elastisitas transmisi harga adalah sebagai berikut:

$$ET = \frac{\delta Pr_i}{\delta Pf} \cdot \frac{Pf}{Pr_i}$$

Karena P_f dan P_r berhubungan linier : $P_f = a + bP_r$

$$\frac{\delta Pf}{\delta Pr_i} = b \text{ atau } \frac{\delta Pr_i}{\delta Pf} = \frac{1}{b}$$

Keterangan:

- ET = elastisitas transmisi harga
- b = koefisien regresi

Kriteria pengukuran elastisitas transmisi harga menurut Hasyim (2012), yaitu:

$ET = 1$, maka laju perubahan harga di tingkat produsen sama dengan laju perubahan harga di tingkat konsumen, pasar yang berlaku adalah pasar bersaing sempurna, dan sistem pemasaran yang terjadi telah efisien.

$ET < 1$, maka laju perubahan harga di tingkat produsen lebih kecil daripada laju perubahan harga di tingkat konsumen dan pasar yang dihadapi adalah pasar tidak bersaing sempurna dengan adanya kekuasaan monopsoni atau oligopsoni.

$ET > 1$, maka laju perubahan harga di tingkat produsen lebih besar daripada laju perubahan harga di tingkat konsumen dan pasar yang dihadapi adalah pasar tidak bersaing sempurna.

3.4 Analisis Estimasi Supply dan dan Demand Daging Sapi

Pendekatan dinamika populasi dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan parameter mutasi ternak (BPS Indonesia, 2014^d). Definisi operasional parameter dalam survei ini adalah proporsi setiap komponen mutasi ternak terhadap stok awal ternak yang dipelihara di rumah tangga selama setahun yang lalu. Dinamika Populasi ternak pada tingkat rumah tangga dapat diestimasi berdasarkan informasi pergerakan mutasi ternak selama setahun. Formula penentuan estimasi populasi ternak yang diusahakan rumah tangga dapat dihitung melalui pergerakan mutasi ternak selama satu tahun, sebagai berikut:

$$P_t = P_0(1 - Sl - Am - Dt - Rd + By + Br + Ad)$$

(Sumber: BPS Indonesia, 2014^d)

Keterangan:

- Pt = Populasi ternak tahun ke-(t+1)
- P0 = Populasi ternak tahun ke-t (populasi ternak stok awal)
- Sl = Parameter penjualan
- Am = Parameter pemotongan
- Dt = Parameter kematian
- Rd = Parameter pengurangan lain
- By = Parameter pembelian
- Br = Parameter kelahiran
- Ad = Parameter penambahan lain.



4

Daging dan Daya Saing Bangsa

BAB 4

Daging dan Daya Saing Bangsa

*“Kekurangan
penyediaan daging
sapi dalam negeri
harus dipenuhi dengan
impor.”*



4. 1. Era Kompetisi Global

Era global diwarnai dengan kompetisi yang semakin ketat dan dinamis antar kawasan atau antar negara, khususnya di bidang ekonomi. Kemampuan suatu blok kawasan tertentu di bidang ekonomi akan berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas dan daya saing kawasan tersebut secara global. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kapasitas, kinerja, daya saing, dan kemandirian bangsa dalam segala bidang. Dalam kerangka itu Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah merumuskan NAWACITA sebagai program prioritas pembangunan nasional. Salah satu isu sentral NAWACITA adalah meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian bangsa. Implementasi NAWACITA tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif dan semangat kerja keras dalam percepatan pembangunan nasional.

Upaya pencapaian peningkatan produksi, daya saing, dan kemandirian bangsa seperti diuraikan di atas hendaknya tetap secara konsisten mematuhi kesepakatan global untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal* atau SDG Tahun 2030). SDG Tahun 2030 telah disepakati pada Sidang Umum PBB di New York bulan September 2015. Agenda baru pembangunan global (pasca MDG yang telah berakhir tahun 2015) memuat tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu: pembangunan manusia,

pembangunan ekonomi ramah lingkungan, dan pembangunan lingkungan yang lestari. Ketiga pilar pembangunan tersebut (dengan 17 target baru yang harus dicapai) tentu sangat relevan dengan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk subsektor peternakan.

Saat ini pangan dan energi telah berkembang menjadi isu strategis global yang sering mencuat ke permukaan dan menarik perhatian banyak pihak. Hal tersebut adalah suatu keniscayaan karena selama 20 tahun terakhir ada kecenderungan laju pertumbuhan produksi pangan dan energi dunia kurang mampu mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan penduduk. Padahal pangan dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, isu pangan dan energi termasuk sangat sensitif dan sejarah mencatat bahwa krisis pangan dan energi berimplikasi luas pada aspek politik dan keamanan. Krisis di bidang pangan dan energi harus dihindari karena niscaya akan mengganggu stabilitas nasional di bidang lainnya.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Secara implisit, amanah tersebut menuntut kesungguhan pemerintah dalam beberapa hal terkait pangan, termasuk: estimasi secara akurat kebutuhan pangan nasional, perencanaan secara cermat produksi pangan nasional, pengelolaan persediaan dan distribusi pangan nasional, serta memastikan keamanan pangan masyarakat (*food safety*). Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan pangan akan bermuara pada terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan seperti yang diimpikan dalam NAWACITA.

Terkait dengan pembangunan kemandirian dan kedaulatan pangan maka pemerintah harus terus berupaya keras mempercepat peningkatan kinerja pembangunan nasional di sektor pertanian dalam arti luas (termasuk tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan). Pembangunan pertanian secara berkelanjutan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh pihak, termasuk pihak eksekutif dan legislatif. Bentuk perhatian tersebut harus tertuang dalam kebijakan yang *pro*-pertanian. Kebijakan *pro*-pertanian hendaknya juga tercermin dalam politik anggaran. Alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pertanian masih sangat rendah. Sebagai gambaran, hasil studi World Bank memperlihatkan bahwa *government spending on agriculture* (GSA) di Indonesia masih berkatat pada angka 3-5% dari APBN (Armas, *et al.*, 2010).

Sejak masa penjajahan, sektor pertanian telah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Namun, peran tersebut dalam 15 tahun terakhir cenderung mulai menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode tahun 2003-2013, kontribusi sektor pertanian pada produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menurun dari 15,19% pada tahun 2003 menjadi

14,43% pada tahun 2013. Meskipun penurunan tersebut mencerminkan semakin menguatnya peran sektor lain dalam pembangunan ekonomi nasional, tetapi tetap perlu dicermati serius karena ada indikasi sektor pertanian menghadapi masalah yang terus berkembang semakin kompleks. Permasalahan tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan, infrastruktur, teknologi, tataniaga, regulasi, dll.

Peran sektor pertanian dalam penyiapan tenaga kerja masih sangat signifikan. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi yaitu 38,07 juta orang pada tahun 2013. Jumlah tersebut setara dengan 34.36% dari penduduk yang bekerja (Sakernas, Agustus 2013). Hal ini berarti sektor pertanian masih berpeluang menjadi salah satu tumpuan dalam pencapaian target pengentasan kemiskinan dalam SDG Tahun 2030. Namun, dua hal penting perlu dicermati yaitu pertumbuhan sektor pertanian masih di bawah sektor lainnya serta impor produk pertanian selama tahun 2003-2013 masih cukup besar, yaitu US\$ 3,34 miliar pada tahun 2003 dan meningkat menjadi US\$ 14,90 miliar pada tahun 2013.

Pemerintahan baru (Kabinet Kerja) memiliki komitmen tinggi untuk percepatan pembangunan sektor pertanian. Komitmen pemerintah untuk percepatan pembangunan pertanian harus didukung oleh semua pihak yang terkait (*stakeholders*), termasuk unsur birokrasi, industri, akademisi, dan masyarakat (*ABG-Plus*). Percepatan pembangunan pertanian harus menjadi gerakan kolektif, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergi antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam kaitan itu, sangat diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pertanian yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Melalui dokumen tersebut pihak-pihak terkait akan mengetahui arah dan kebijakan pembangunan pertanian serta mengetahui pula peran-peran apa yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi aktif dalam skema besar pembangunan pertanian nasional.

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan Sektor Pertanian. Sejak dahulu telah disadari bahwa usaha ternak memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan usaha tani tanaman. Komponen ternak dalam sistem usaha tani dapat menyediakan pupuk organik untuk tanaman. Sebaliknya, biomassa tanaman sisa panen dalam usaha tani serta hasil sisa pengolahan produk pertanian menjadi sumber utama pakan ternak. Hubungan sinergis tersebut harus terus dieksplorasi manfaatnya pada level rumah tangga pertanian menuju pengembangan sistem pertanian terpadu. Integrasi usaha ternak-tanaman (*crop livestock system*) sangat menunjang upaya untuk mewujudkan pembangunan pertanian secara berkelanjutan (*sustainable agriculture development*) yang berdaya saing.

Daya saing subsektor peternakan harus dibangun sejajar dengan subsektor lainnya di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan yang terlalu fokus pada komoditas tanaman pangan terbukti berdampak kurang baik terhadap perkembangan subsektor lain. Sebagai contoh, perkembangan usaha sapi potong di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Keteringgalan tersebut terjadi dalam semua aspek, termasuk basis populasi, mutu genetik ternak, reproduksi ternak, produksi bibit dan sapi bakalan, teknologi pakan, infrastruktur inseminasi buatan dan kesehatan hewan, sistem tataniaga, serta aspek lainnya. Populasi sapi potong sebanyak 12.329.477 ekor yang dipelihara oleh 5.078.979 rumah tangga usaha peternakan (BPS – ST2013) mencerminkan betapa kecilnya ukuran populasi sapi potong untuk negara sebesar Indonesia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa skala usaha rumah tangga usaha peternakan (RTUP) sapi potong di Indonesia hanya berkisar 2 – 3 ekor per RTUP.

Pemerintah harus segera membenahi agribisnis komoditas strategis sapi potong melalui program yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan partisipatif. Selain dikemas dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang, program tersebut harus juga didukung dengan rangkaian kebijakan dan regulasi yang memungkinkan agribisnis komoditas sapi potong tumbuh secara progresif. Pengembangan agribisnis sapi potong semakin penting jika dikaitkan dengan peran bisnis tersebut dalam peningkatan mutu SDM, pendapatan, kesempatan kerja, serta kegiatan bisnis yang terkait lainnya (industri pakan, obat-obatan, jasa layanan pendukung, dll.). Keterlambatan dalam pembangunan agribisnis sapi potong akan memperparah ketergantungan terhadap impor sapi dan daging sapi dan Indonesia bisa masuk dalam perangkap pangan (*food trap*) negara eksportir utama.

4.1.1 SDM Unggul dan Nutrisi Berimbang

Salah satu kata kunci peningkatan daya saing bangsa pada era global yang semakin kompetitif adalah 'inovasi teknologi'. Pada Perber Menegristek No 3 dan Mendagri No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dijelaskan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi dalam proses produksi. Melalui inovasi teknologi dapat dicapai peningkatan nilai tambah sumber daya secara efisien, sehingga produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan akan memiliki daya saing global, baik dari sisi kualitas maupun harga. Hal ini berarti kemampuan inovasi akan menentukan tingkat efisiensi produksi, kualitas, dan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk produk pertanian.

Faktor penentu utama kemampuan inovasi teknologi adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM). Pengalaman menunjukkan bahwa dalam 30 tahun terakhir beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura berhasil mendorong kemajuan ekonomi bangsanya secara

spektakuler. Bahkan kemajuan pembangunan ekonomi yang fenomenal tersebut dianggap sebagai era kebangkitan ekonomi Asia. Apabila dicermati, keberhasilan negara-negara tersebut ternyata bukan bertumpu kepada kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, tetapi lebih bertumpu kepada kualitas sumberdaya manusianya. Kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia, di mana kualitas SDM masih merupakan masalah utama pembangunan nasional.

SDM adalah pelaku utama kegiatan pengembangan teknologi dan proses inovasi teknologi di masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan kinerja SDM merupakan salah satu agenda pembangunan yang sangat penting di Indonesia. Negara-negara yang saat ini maju secara ekonomi memiliki catatan sejarah bahwa mereka memberikan prioritas utama pada peningkatan mutu SDM dalam program pembangunan nasionalnya. Karena itu komitmen untuk meningkatkan mutu SDM harus ditindaklanjuti oleh pemerintah secara serius dengan membenahi semua aspek yang terkait dengan pembangunan SDM unggul dan mengalokasikan anggaran yang cukup.

Selain melalui program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, aspek penting dalam pembangunan SDM unggul adalah kecukupan dan keberimbangan pasokan zat-zat nutrisi dalam makanan. Zat-zat nutrisi tersebut termasuk protein hewani yang dapat diperoleh dari produk ternak dan ikan. Protein hewani dikenal memiliki kualitas tinggi karena komposisi asam aminonya yang berimbang dan sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Fakta mencatat bahwa pada negara-negara yang telah memiliki tingkat konsumsi protein hewani tinggi akan memiliki SDM yang lebih unggul dari segi intelektualitas serta perkembangan dan kebugaran fisik. Perlu diketahui, nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tahun 2013 sebesar 68.4. Dengan nilai itu Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara dan peringkat kelima di ASEAN.

4.1.2 Konsumsi Pangan Bergizi

Pengembangan potensi jasmaniah manusia dapat diupayakan melalui pemberian asupan makanan dan minuman yang halal dan baik (sehat dan bergizi). Dengan makanan yang halal dan bergizi diharapkan manusia tumbuh dan berkembang secara sempurna dan sehat secara fisik dan mental (jasmani dan rohani). Makanan dikonsumsi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, yang dapat dikelompokkan untuk 3 tujuan yaitu kebutuhan terhadap tenaga, kebutuhan untuk pembangunan atau pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta kebutuhan zat gizi untuk mengatur proses-proses dalam tubuh. Dari kebutuhan terhadap ketiga kegunaan tersebut, maka zat gizi dikelompokkan menjadi tiga golongan

yaitu zat gizi sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur.

Terdapat berbagai macam zat gizi dalam makanan, yang secara umum dikelompokkan menjadi enam, yaitu: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan penggolongan menurut kegunaannya maka zat gizi dalam makanan dapat dipilah menjadi: zat gizi sumber energi (karbohidrat, protein, lemak), zat pembangun (protein, mineral, dan air), serta zat pengatur (protein, mineral, dan vitamin). Potensi jasmani manusia akan berkembang maksimal apabila tercukupi kebutuhannya terhadap ketiga golongan zat gizi tersebut.

Pada masa lalu kecukupan pangan akan dicapai apabila terpenuhi slogan empat sehat lima sempurna. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka slogan tersebut dirasa tidak tepat sehingga diganti dengan prinsip "Menu Seimbang". Menu seimbang adalah susunan beragam makanan yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh (Indriani, 2013). Dari prinsip menu seimbang terlihat jelas bahwa jumlah asupan zat-zat nutrisi harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan zat-zat nutrisi individu tertentu.

Keperluan terhadap zat gizi dapat dinilai secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, sejak tahun 1978 di Indonesia telah ditentukan "Angka Kecukupan Gizi rata-rata yang Dianjurkan" (AKG). Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan tersebut diartikan sebagai suatu kecukupan rata-rata zat gizi bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal (Indriani, 2013). Kecukupan zat gizi tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman kecukupan zat gizi orang Indonesia. Secara berkala terhadap AKG tersebut dilakukan peninjauan kembali, sehingga selalu tepat (sesuai) dengan dengan kondisi kesehatan masyarakat. Peninjauan kembali terhadap AKG tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali dan disosialisasikan pada kegiatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi.

Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk orang Indonesia terakhir ditetapkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012. Pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012 tersebut ditetapkan AKG rata-rata untuk energi adalah 2.150 kkal/kapita/hari dan untuk protein 57 gram/kapita/hari pada tingkat konsumsi dan 2.400 kkal/kapita/hari serta 63 gram/kapita/hari pada tingkat persediaan. Dari jumlah protein tersebut ditentukan 10 gram berasal dari produk pangan hewani, yaitu dari produk-produk peternakan dan perikanan.

Dalam rangka memenuhi prinsip menu seimbang maka diperlukan suatu pedoman. Untuk itu ditetapkanlah Pedoman Gizi Seimbang (PGS). PGS dimaksudkan untuk menyediakan pedoman makan dan berperilaku hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi anekaragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan

normal. Keanekaragaman pangan adalah anekaragam kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan air serta beranekaragam pada setiap kelompok pangan. Makanan beragam adalah berbagai makanan yang dikonsumsi beragam baik antar kelompok pangan maupun dalam setiap kelompok pangan (Indriani, 2013).

Makanan beragam sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap zat gizi karena pada prinsipnya tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi baru lahir sampai dengan umur 6 (enam) bulan. Oleh karena itu diperlukan pedoman operasional untuk mewujudkan pola pangan yang seimbang.

Pedoman keanekaragaman pangan mulai diperkenalkan secara internasional pada pertemuan para ahli yang diselenggarakan oleh Food and Agricultural Organization Office for Asia and the Pacific (FAO-RAPA) pada tahun 1989 di Bangkok. Pada pertemuan tersebut dikemukakan suatu hidangan dianggap baik bila mengandung 10-12 persen energi dari protein, 20-25 persen energi dari lemak, dan sisanya dari karbohidrat.

Para ahli di Indonesia, berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh FAO-RAPA menyusun pola pangan yang baik untuk Indonesia yang dikenal dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan pertama kali didefinisikan pada tahun 1996, yang selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perbaikan guna penyempurnaan, maka pengertian PPH dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 adalah susunan jumlah pangan menurut 9 (sembilan) kelompok pangan yang didasarkan kepada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Menurut Indriani (2013) seiring dengan perkembangan pemahaman terhadap pentingnya pencapaian PPH pada setiap rumah tangga maupun nasional maka saat ini PPH sudah merupakan salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan pangan. Komposisi PPH nasional dapat dilihat pada Tabel 4.1.

No	Golongan Pangan	gram	Kec. Energi (kkal)	Kontribusi Energi (%)	Bobot	Skor PPH Maks *)
1	Padi-padian	275	1000	50	0,5	25
2	Umbi-umbian	100	120	6	0,5	2,5
3	Hewani	150	240	12	2	24
4	Minyak dan lemak	20	200	10	0,5	5
5	Buah dan biji berminyak	10	60	3	0,5	1
6	Kacang-kacangan	35	100	5	2	10
7	Gula	30	100	5	0,5	2,5
8	Sayur dan buah	250	120	6	5	30
9	Lain-lain	0	60	3	0	0
Jumlah		2000	100		100	

Tabel 4.1.

Komposisi PPH sebagai instrumen acuan perencanaan pangan B25

Keterangan: *) hasil kali kontribusi energi (%) dengan bobot.

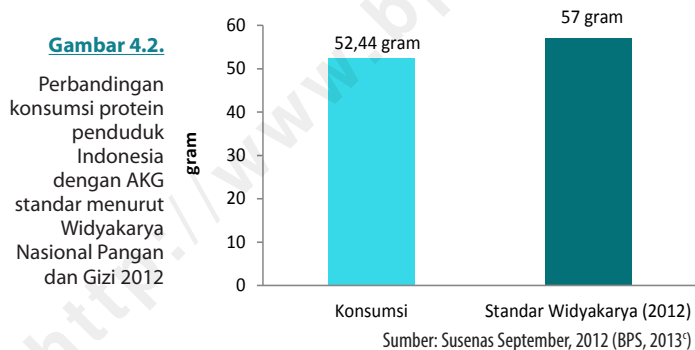
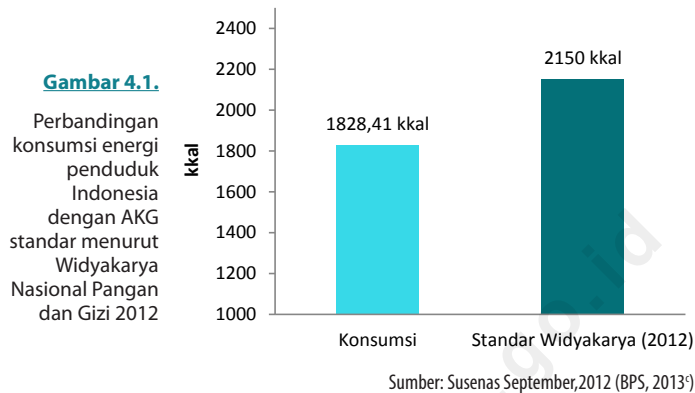
Sumber: Indriani (2013)

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kontribusi energi asal pangan hewani terhadap kecukupan energi adalah sebesar 12,0 persen. Perlu dicermati, walaupun kontribusi pangan hewani terhadap kecukupan energi tidak besar tetapi pangan hewani sangat penting untuk kesehatan dan menunjang tumbuh kembang. Menurut Sadono *et al.* (1989) telah lama diketahui bahwa makanan hewani mempunyai keunggulan dilihat dari:

- a. Mutu protein, komposisi asam amino esensial pangan hewani lebih lengkap dibandingkan dengan asam amino esensial yang dibutuhkan oleh berbagai golongan umur.
- b. Daya cerna, daya cerna disini terkait dengan daya cerna protein. Umumnya diperkirakan nilai cerna protein hewani lebih dari 90 persen, sedangkan protein nabati sekitar 70-80 persen.
- c. Sumber mineral yang mudah diserap. Berbagai mineral mendapat perhatian belakangan ini antara lain Fe yang terkait dengan masalah anemia, Zn yang terkait dengan pertumbuhan dan imunologi, Mg yang terkait dengan masalah penyakit jantung, dan Ca yang terkait dengan masalah osteoporosis. Makanan hewani merupakan sumber berbagai mineral termasuk empat mineral tersebut.

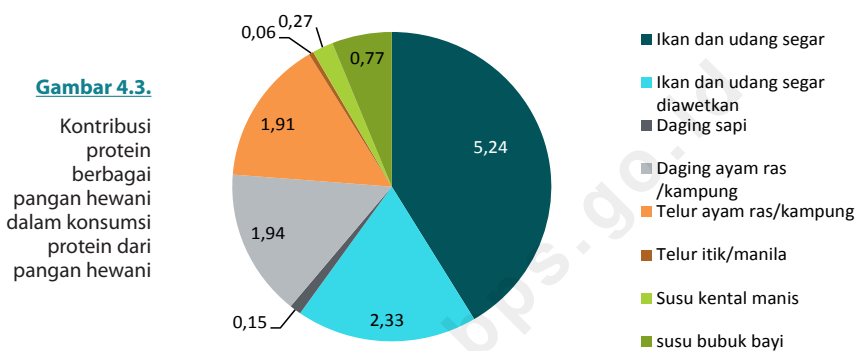
Kontribusi energi pangan hewani seperti yang tercantum dalam Tabel 4.1 adalah kontribusi dari pangan hewani keseluruhan mencakup berbagai jenis pangan antara lain ikan, daging (sapi/kerbau, ayam, babi, dan lainnya), telur, dan susu. Dari ketentuan dalam PPH tersebut sesungguhnya tidak terlihat besarnya kontribusi daging secara umum apalagi secara khusus daging sapi. Meskipun demikian kecukupan daging sapi tetap penting diwujudkan mengingat daging sapi telah menjadi salah satu bagian dalam pola pangan masyarakat.

Besarnya kontribusi daging sapi terhadap PPH lebih terkait dengan pola konsumsi pangan masyarakat. Pola konsumsi pangan masyarakat dapat dilihat dari hasil survei pola konsumsi. Badan Pusat Statistik secara berkala melakukan survei konsumsi tersebut yang dikenal dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Konsumsi energi dan protein masyarakat Indonesia masih di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan (Gambar 4.1 dan Gambar 4.2).



Pada Gambar 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa baik konsumsi energi maupun protein penduduk Indonesia masih berada di bawah standar AKG menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012. Apabila dibandingkan antara energi dan protein, ternyata defisit pemenuhan kebutuhan energinya lebih besar dari pada defisit pemenuhan kebutuhan protein. Tingkat kecukupan energi hanya terpenuhi 85 persen, sedangkan tingkat kecukupan protein telah terpenuhi sampai 92 persen. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi menetapkan bahwa standar konsumsi protein hewani adalah 10 gram/kapita/hari. Data konsumsi rumah tangga dari Susenas bulan September 2013 menunjukkan bahwa total konsumsi protein rumah tangga Indonesia adalah 12,67 gram, berarti telah memenuhi standar.

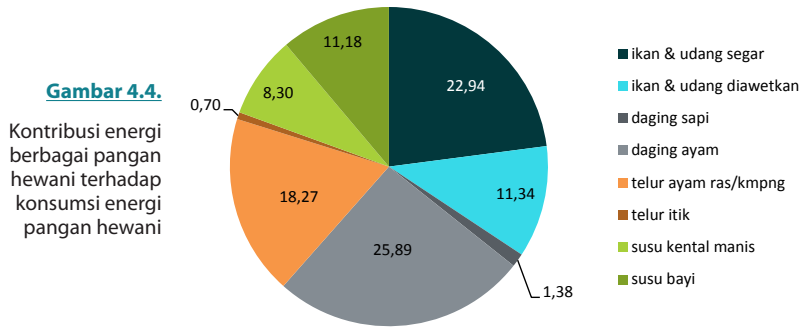
Kontribusi berbagai jenis pangan hewani terhadap konsumsi protein rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 4.3. Pada Gambar 4.3. terlihat bahwa kontribusi daging sapi terhadap konsumsi protein rumah tangga sesungguhnya masih sangat kecil, yaitu hanya 1 persen, sama dengan telur itik, dimana kontribusi tersebut adalah yang terkecil dibandingkan dengan pangan hewani lainnya. Masih rendahnya angka kontribusi daging sapi terhadap konsumsi protein hewani rumah tangga mencerminkan bahwa Indonesia harus terus berupaya meningkatkan konsumsi protein asal daging sapi. Dengan demikian, sangat beralasan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memacu peningkatan produksi daging sapi nasional. Lebih-lebih komoditas daging sapi sering menimbulkan gejolak ekonomi dan memicu peningkatan inflasi.



Sumber: Susenas September, 2012 (BPS, 2013)

Pada Pola Pangan Harapan telah ditentukan bahwa kontribusi energi dari pangan hewani adalah sebesar 12 persen. Namun kontribusi energi pangan hewani terhadap konsumsi energi total masih di bawah standar PPH yaitu hanya sebesar 7,50 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi pangan hewani dalam pola pangan penduduk masih harus ditingkatkan. Terlebih lagi bahwa konsumsi energi total dari hasil Susenas juga masih di bawah AKG yang dianjurkan.

Pangan hewani dalam pola konsumsi penduduk Indonesia terdiri dari berbagai kelompok yaitu ikan, daging, telur, dan susu. Untuk kelompok daging antara lain terdiri dari daging sapi, daging kerbau, daging babi, daging kambing, daging ayam serta unggas yang lain. Kontribusi energi berbagai jenis pangan hewani dapat dilihat pada Gambar 4.4. Gambar 4.4. menunjukkan bahwa kontribusi energi dari daging sapi terlihat masih sangat kecil yaitu dua persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsumsi daging sapi pada masa depan masih akan meningkat mengingat kontribusi relatifnya yang masih kecil dibandingkan dengan pangan hewani yang lain. Meskipun dari sisi kualitas protein semua pangan hewani tidak banyak berbeda, namun daging sapi tetap penting dalam pola pangan masyarakat.



Sumber: Susenas September, 2012 (BPS, 2013¹)

Dari Gambar 4.3. dan Gambar 4.4. jelas terlihat bahwa kontribusi daging sapi terhadap konsumsi zat gizi (protein dan energi) dibandingkan pangan hewani yang lain sangat kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran daging sapi dalam pencukupan zat gizi masih kurang bermakna. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi daging sapi dalam pola konsumsi pangan masyarakat menjadi sangat strategis dan perlu dipacu dalam upaya peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat.

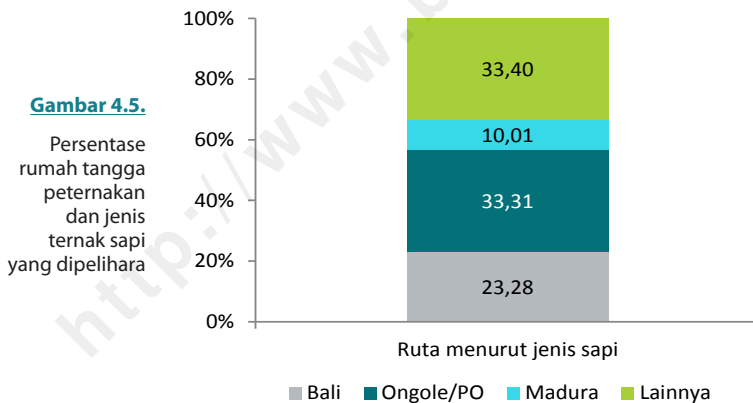
Dari sisi penyediaan, daging sapi banyak memiliki substitusi yaitu dengan pangan hewani yang lain baik dari kelompok daging maupun kelompok pangan hewani selain daging. Dari kelompok daging terdapat daging kambing dan ayam, serta dari kelompok pangan hewani yang lain terdapat ikan, telur, dan susu. Banyaknya substitusi daging tidak berarti daging tidak penting dalam perekonomian, terbukti dengan timbulnya gejala dalam masyarakat apabila penyediaan daging di pasar berkurang. Gejala di masyarakat tersebut terjadi oleh karena komoditas daging merupakan bagian penting dalam industri rumah makan dan restoran serta industri pangan olahan daging. Jumlah industri rumah makan, restoran, dan industri olahan daging sangat banyak di Indonesia, terlihat dari keberadaan industri-industri tersebut yang dimulai dari warung tegal, rumah makan padang, pedagang bakso, hingga *steak house*. Industri tersebut banyak menyerap tenaga kerja sehingga apabila terjadi guncangan ekonomi maka akan menimbulkan gejala pada masyarakat.

4.2. Swasembada Daging Sapi

Ternak sapi memiliki posisi yang sangat strategis di sebagian besar wilayah Indonesia karena tersedianya sumber pakan ternak sapi yang cukup banyak, terutama sumber pakan yang berasal dari biomasa sisa hasil pertanian dan sisa agroindustri. Selain itu, ternak sapi termasuk jenis

ternak yang sebagian besar kegiatan produksinya dilaksanakan oleh masyarakat petani (rumah tangga usaha peternakan). Pada tahun 2013 sebanyak 12.329.477 ekor (97,97%) ternak sapi di Indonesia berada di 5.078.979 (RTUP). Sisanya sekitar 2,03% berada di perusahaan berbadan hukum, padagang, dan lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengembangan sapi potong sangat sesuai untuk tujuan program peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan masalah kemiskinan. Kehidupan sebagian besar petani di perdesaan juga sudah sangat lekat dengan praktik budi daya ternak sapi.

Sapi juga dikenal sebagai jenis ternak yang sangat luas penyebarannya. Luas penyebaran tersebut sangat terkait dengan kemampuan ternak sapi yang cukup tinggi dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Di sebagian besar wilayah Indonesia dapat dijumpai berbagai jenis ternak sapi potong, antara lain sapi bali, sapi peranakan ongole (PO), sapi madura, dan sapi lokal lainnya. Selain itu, saat ini mulai banyak dikembangkan ternak sapi hasil persilangan antara ternak sapi lokal (biasanya PO) dengan sapi unggul asal impor (misalnya limousine, simental, angus, brahman, dll.). Potensi sumber daya tersebut sesungguhnya dapat dijadikan modal dasar untuk mengembangkan agribisnis sapi potong menuju swasembada daging nasional. Data persentase rumah tangga peternakan dan jenis ternak sapi yang dipelihara disajikan pada Gambar 4.5.



Sumber: Pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK), 2011

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa persentase sapi bali, madura, dan sapi PO mencapai 66,6%, sisanya 33,4% adalah jenis sapi lainnya. Jenis sapi lainnya termasuk sebagian kecil sapi lokal (selain sapi bali, madura, dan PO) dan sebagian besar sapi impor dan sapi persilangan (lokal x impor). Proses persilangan (baik melalui IB dan kawin alam) belum terarah dengan baik, sehingga saat ini mulai terjadi penyebaran sumber genetik ternak impor secara sporadis. Kondisi ini perlu dicermati karena dapat mengancam eksistensi sumber daya genetik sapi lokal. Karena itu, perlu difikirkan pengembangan kawasan atau zonasi penyebaran sumber genetik ternak impor.

Budi daya ternak sapi ditujukan untuk menghasilkan daging. Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat disukai oleh masyarakat. Namun, disayangkan ketersediaannya masih sangat terbatas sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Rendahnya ketersediaan daging sapi lebih disebabkan oleh populasi dan produktivitas sapi yang dicapai selama ini tidak memadai. Rendahnya populasi dan produktivitas sapi lokal menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan *grading up* sapi potong lokal dengan sapi impor dan bahkan mendatangkan ternak sapi betina impor.

Swasembada daging sapi pada hakekatnya merupakan tekad bersama untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri dengan produksi sapi lokal, sehingga membantu terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Swasembada daging sapi sudah lama didambakan pemerintah, agar ketergantungan terhadap impor (baik berupa sapi bakalan maupun daging sapi) semakin menurun dengan mengembangkan potensi sapi dalam negeri. Program ini mulai dicanangkan tahun 2000 dan sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali pengunduran target. Banyak hal menjadi penyebab gagalnya pencapaian target, antara lain: kurang akuratnya kalkulasi estimasi kebutuhan daging nasional, estimasi persediaan (stok), kurangnya dukungan anggaran, lemahnya infrastruktur peternakan, dll.

Selama 5 tahun terakhir impor daging sapi dan sapi hidup tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Data impor daging sapi dan sapi hidup (setara daging) selama 5 tahun terakhir disajikan Tabel 4.2. Pada Tabel 4.2 tersebut tampak bahwa angka total impor berfluktuasi cukup tajam dari tahun ke tahun dan tertinggi pada tahun 2010 dan 2014. Hal ini mencerminkan bahwa produksi daging dalam negeri juga mengalami fluktuasi yang tajam. Fluktuasi produksi daging sapi yang tajam tersebut merupakan fenomena yang rumit yang perlu dikaji secara akademik. Salah satu faktor penyebab fluktuasi tersebut sangat mungkin disebabkan ukuran populasi sapi nasional masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan daging sapi yang terus meningkat.

Tabel 4.2.
Impor sapi dan daging sapi

Tahun	Komoditas (000 ton)		
	Daging	Sapi hidup setara daging	Total
2010	140,1	210,7	350,8
2011	102,8	122,4	225,2
2012	40,3	101,4	141,7
2013	54,8	130,5	185,3
2014	104,9	246,8	351,7
2015 (Jan-Jul)	25,0	113,7	138,7

Sumber: BPS (2015^b)

Peningkatan permintaan daging sapi dalam negeri disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi daging sapi per kapita per tahun. Konsumsi daging sapi/kapita/tahun merupakan angka penting dalam perhitungan swasembada daging sapi. Banyak pihak yang terkait memunculkan angka estimasi konsumsi daging sapi/kapita/tahun, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS, Asosiasi Perusahaan Feedloter Indonesia, perguruan tinggi, lembaga lainnya. Dari angka-angka yang muncul dalam rapat di Kementerian Perekonomian bulan Agustus 2015, disepakati satu angka acuan nasional untuk perhitungan konsumsi daging sapi/kapita/tahun sebesar 2,56 kg.

Perhitungan lebih lanjut dengan menggunakan angka kesepakatan tersebut diperoleh angka produksi daging sapi nasional tahun 2015 sebesar 416,10 ribu ton dan kebutuhan daging sapi nasional sebesar 653,98 ribu ton. Defisit daging sapi sebesar 237,88 ribu ton dipenuhi dari impor daging sapi sebesar 95,16 ribu ton dan impor sapi hidup sebanyak 713,7 ribu ekor. Angka defisit daging sapi 237,88 ribu ton adalah setara dengan 36,4% dari kebutuhan daging sapi nasional. Pemenuhan kebutuhan dengan cara mengimpor dalam jumlah besar tentu saja tidak sejalan dengan Nawa Cita. Oleh karena itu, segala daya dan upaya harus segera dilakukan untuk secara bertahap mencapai swasembada daging sapi. Peluang swasembada daging sapi sangat mungkin dicapai karena tersedia sumber daya untuk mencapainya. Upaya yang diperlukan untuk mencapai swasembada daging tersebut sesungguhnya adalah komitmen kuat, strategi dan program yang tepat, serta konsistensi pelaksanaannya di lapangan.

Peningkatan konsumsi daging sapi akan terus terjadi bahkan akan diwarnai percepatan. Percepatan peningkatan konsumsi per kapita paling tidak dipicu oleh tiga hal, yaitu: (a) peningkatan konsumsi per kapita sebagai konsekuensi dari masih rendahnya angka konsumsi perkapita daging sapi penduduk Indonesia dibandingkan penduduk di negara berkembang lainnya; (b) perubahan gaya hidup masyarakat (*life style*); dan (c) pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai seminar, lokakarya, dan publikasi ilmiah para pemikir sepakat bahwa untuk mengatasi defisit pasokan daging sapi nasional yang semakin melebar, diperlukan program percepatan pembangunan agribisnis sapi potong. Permasalahannya adalah bagaimana wujud program percepatan tersebut yang cocok dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat berhasil efektif di Indonesia.

5

Profil Usaha Sapi Potong Rakyat

BAB 5

Profil Usaha Sapi Potong Rakyat

"Peternak sapi mayoritas berusia dewasa dengan pendidikan rendah."



1.1. Rumah Tangga Usaha Peternakan

Sebagian besar rumah tangga (Ruta) di Indonesia memiliki sumber pendapatan dari sektor pertanian. Sekitar 40% Ruta di Indonesia berusaha di sektor pertanian. Dari Ruta usaha pertanian, sebanyak 41,4% memiliki pendapatan >50% dari usaha pertanian dan 23,27% memiliki pendapatan 25%-50% dari usaha pertanian. Dengan demikian, sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian nasional. Dalam beberapa dekade ke depan sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

a. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan

Sampai tahun 2013, ternyata sektor pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yaitu dengan persentase sebesar 34,6 persen dari jumlah tenaga kerja. Pada saat yang sama sektor pertanian menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 14,43%. Besarnya peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja membuat sektor ini menjadi sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa pembangunan yang berpihak kepada sektor pertanian tentu akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah rumah tangga (Ruta) usaha pertanian yang terekam pada sensus pertanian tahun 2013 adalah sebesar 26,14 juta. Jumlah tersebut ternyata mengalami penurunan sebesar 16,3 persen jika dibandingkan dengan jumlah hasil sensus pertanian tahun 2003

yang mencatatkan angka 31,23 juta rumah tangga usaha pertanian (Tabel 5.1). Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu anggotanya minimal mengusahakan kegiatan pertanian dalam arti luas, termasuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Penurunan jumlah Ruta usaha pertanian sebesar 16,3% dalam 10 tahun perlu dicermati serius oleh pemerintah, dengan melaksanakan kajian khusus untuk mengungkap secara jelas fenomena sebenarnya yang terjadi.

Tabel 5.1.
Perbandingan Ruta usaha pertanian Indonesia pada tahun 2003 dan 2013

Uraian	Rumah Tangga Usaha		Perubahan (%)
	2003	2013	
Sektor Pertanian	31.232.184	26.135.469	-16,3
Subsektor Peternakan	18.595.824	12.969.210	-30,3
Jasa Pertanian	1.846.140	1.075.935	-41,7

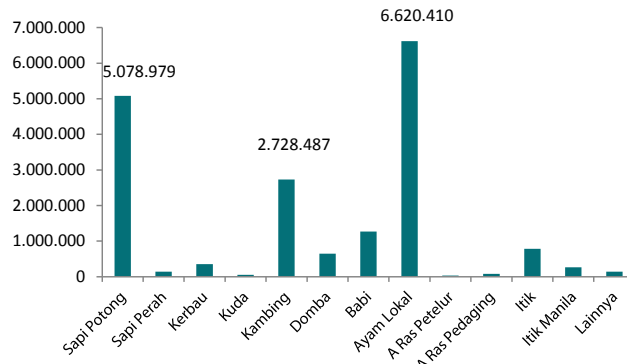
Sumber: BPS (2014^a). ST2013-L

Jumlah Ruta usaha peternakan pada tahun 2013 masih menempati urutan kedua setelah rumah tangga usaha pertanian tanaman pangan. Hal ini mencerminkan bahwa usaha peternakan masih merupakan pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagian besar petani masih yakin usaha peternakan dapat memberikan manfaat besar terhadap masa depan mereka. Namun, pada Tabel 5.1. terlihat bahwa selama kurun waktu 2003 – 2013 terjadi penurunan yang cukup tajam pada jumlah rumah tangga usaha peternakan, yaitu sebesar 30,3%. Hal ini perlu dicermati secara serius karena penurunan tersebut dapat mengindikasikan beberapa hal, yaitu: penurunan daya tarik usaha peternakan, penurunan daya dukung sumberdaya alam, serangan penyakit ternak, dan berbagai kemungkinan lainnya.

b. Persentase Ruta Berdasarkan Jenis Ternak Utama

Pada Gambar 5.1 disajikan grafik persentase rumah tangga usaha peternakan berdasarkan jenis ternak utama yang dipelihara. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa persentase rumah tangga usaha peternakan sapi potong menempati jumlah tertinggi (37%). Hal ini mencerminkan bahwa sapi potong masih merupakan komoditas utama pilihan banyak peternak. Total jumlah rumah tangga usaha sapi potong tersebut mencapai 5.078.979. Situasi ini sesungguhnya dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang pendekatan strategi pengembangan agribisnis sapi potong nasional menuju swasembada daging.

Gambar 5.1.
Rumah tangga usaha peternakan berdasarkan jenis ternak utama yang dipelihara.



Sumber: BPS (2014^b). ST2013-L

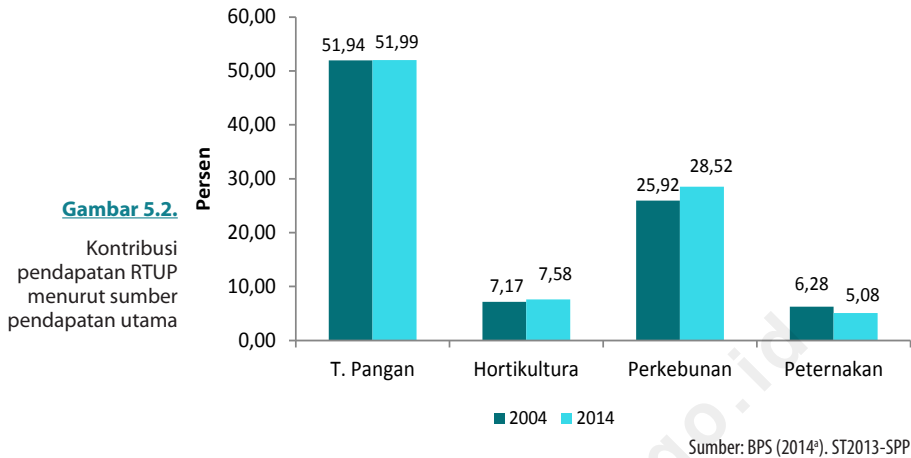
Pada sisi lain, selama kurun waktu 2003-2013 terjadi peningkatan jumlah perusahaan peternakan berbadan hukum. Berdasarkan hasil ST2013 tercatat sebanyak 629 perusahaan peternakan berbadan hukum. Angka tersebut meningkat 32,4% dari tahun 2003 yang berjumlah 475 perusahaan. Meskipun secara absolut masih dalam jumlah kecil, tetapi peningkatan jumlah perusahaan peternakan berbadan hukum sesungguhnya sangat positif untuk pembangunan peternakan di Indonesia. Kegiatan bisnis dalam bentuk perusahaan berbadan hukum umumnya berorientasi komersial dengan pengelolaan yang lebih profesional dan dalam skala bisnis yang efisien.

Hal lain yang patut dicermati untuk pengembangan ke depan, bahwa saat ini pemerintah mendorong tumbuhnya kegiatan usaha produksi sapi potong oleh peternak secara kolektif. Kegiatan produksi dapat dikelola pada tingkat kelompok tani atau gabungan kelompok tani, termasuk dalam kerangka sentra peternakan rakyat (SPR). Kelembagaan petani seperti ini sebagian besar belum berbadan hukum, sehingga harus segera dirancang program khusus untuk pendampingan penguatan kelembagaan peternak. Program SPR cukup strategis karena mendorong transformasi sebagian usaha ternak dari rumah tangga usaha peternakan menuju usaha peternakan kolektif berbadan hukum yang berskala menengah dan lebih efisien.

c. Kontribusi Pendapatan Ruta Usaha Peternakan

Struktur pendapatan Ruta Usaha Pertanian tahun 2003 dan 2013 masih didominasi oleh Ruta tanaman pangan dan Ruta tanaman perkebunan. Sumbangan Ruta usaha peternakan pada kedua sensus tersebut berturut-turut 6,28% dan 5,80% (Gambar 5.2). Berarti dalam 10 tahun kontribusi usaha peternakan mengalami penurunan sebesar 7,64%, sementara itu kontribusi 3 subsektor utama lainnya (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)

mengalami peningkatan. Fenomena penurunan kontribusi subsektor peternakan dalam struktur pendapatan Ruta usaha pertanian perlu dicermati serius. Kontribusi subsektor peternakan seharusnya meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan konsumsi produk hewani untuk membangun SDM unggul.

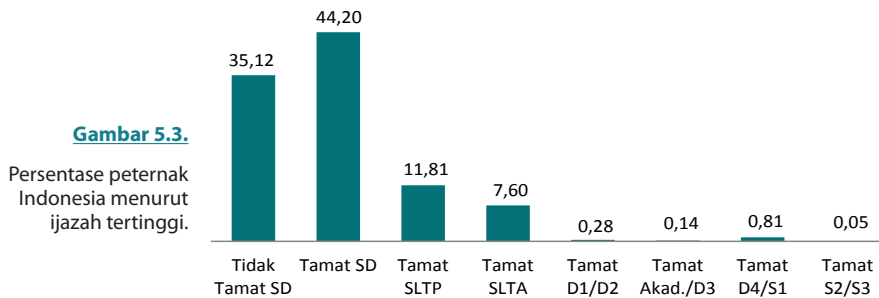


5.2. SDM Peternak

Sebagaimana terbukti dari hasil berbagai kajian, SDM yang bermutu adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan pertanian. Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM harus menjadi agenda prioritas dalam program swasembada daging. Profil SDM peternak sapi potong antara lain dapat dilihat dari aspek pendidikan, umur, dan jenis kelamin.

a. Profil Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) peternak pada rumah tangga usaha peternakan adalah pelaku utama usaha peternakan sapi potong di Indonesia, karena 97,85% (BPS, ST2013-L) populasi sapi potong dikelola oleh rumah tangga usaha peternakan. Kinerja usaha peternakan sapi potong sangat ditentukan oleh motivasi dan kualitas SDM pelaku usaha. Oleh karena itu, profil SDM peternak rakyat perlu dideskripsikan dengan jelas. Salah satu aspek penting penentu kualitas SDM adalah jenjang pendidikan tertinggi. Berdasarkan perolehan ijazah tertinggi profil SDM peternak utama sapi potong di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Sumber: BPS (2015⁹). ST2013-STU

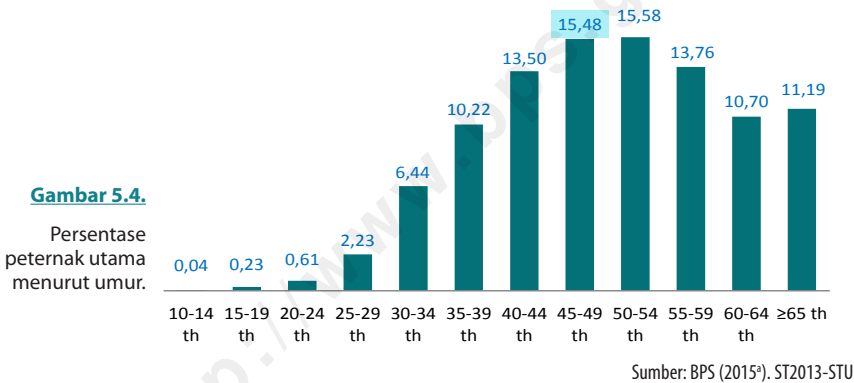
Pada Gambar 5.3 tampak bahwa sebesar 79,32% peternak utama sapi potong rakyat hanya berpendidikan jenjang SD atau tidak tamat SD. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan belajar secara mandiri, penalaran, kewirausahaan, serta kemampuan mengakses informasi dan paket teknologi inovatif pada peternak sapi potong rakyat sangat terbatas. Rendahnya jenjang pendidikan diyakini merupakan salah satu masalah penting yang menghambat pengembangan skala usaha pada rumah tangga usaha peternakan sapi potong menuju skala bisnis. Jumlah sapi yang dipelihara pada rumah tangga usaha peternakan sangat rendah, sehingga sampai saat ini usaha sapi potong belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan peternak rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2013, rata-rata jumlah sapi potong yang dipelihara pada rumah tangga usaha peternakan hanya 2-3 ekor per rumah tangga usaha peternakan (ST2013).

Mencermati masalah profil SDM rumah tangga usaha peternakan sapi potong seperti dijelaskan di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi topik diskusi. Pertama, dalam jangka panjang perlu dipercepat program peningkatan mutu SDM anak bangsa melalui peningkatan dan perluasan akses pendidikan, khususnya pada jenjang menengah (SLTP dan SLTA) dan perguruan tinggi. Kedua, dalam jangka menengah perlu upaya peningkatan dan perluasan kegiatan penyuluhan pertanian, khususnya tentang pengembangan agribisnis sapi potong. Untuk memperluas jangkauan kegiatan penyuluhan ke seluruh nusantara, sudah saatnya mengembangkan program penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau *cyber extension*. Ketiga, perlu dilakukan penguatan kelembagaan petani (*farmer institution*), terutama pembentukan dan penguatan kelompok peternak sapi potong, yang kelak dapat menjadi pintu masuk kegiatan penyuluhan dan inovasi teknologi. Keempat, perlu percepatan pengembangan wirausaha baru agribisnis sapi potong melalui program inkubator bisnis atau sentra peternakan rakyat

(SPR). Beberapa SDM potensial yang memenuhi kriteria dapat dimagangkan dalam inkubator bisnis sapi potong untuk dididik dan dilatih menjadi wirausaha baru. Kebijakan pembangunan peternakan ke depan harus memberi prioritas tinggi pada peningkatan mutu dan kinerja SDM. Dukungan SDM berkualitas secara langsung akan meningkatkan kualitas kinerja agribisnis peternakan sehingga secara langsung meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing global.

b. Profil Umur

Umur peternak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja dan percepatan pengembangan bisnis peternakan. Peternak berusia muda cenderung memiliki motivasi tinggi, berfikir lebih progresif dan dinamis, serta lebih berani mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru (inovatif). Oleh karena itu, profil usia SDM peternak pada rumah tangga usaha peternakan perlu dideskripsikan dan dianalisis dengan cermat. Profil SDM peternak sapi potong di Indonesia berdasarkan usia disajikan pada Gambar 5.4.



Pada Gambar 5.4 tampak bahwa sebanyak 66,71% peternak utama sapi potong rakyat berumur di atas 45 tahun, yang berarti populasi peternak sapi potong Indonesia didominasi oleh peternak dewasa dan berusia lanjut. Jumlah peternak di bawah umur 40 tahun hanya 19,77%. Hal ini mencerminkan bahwa usaha peternakan sapi potong ternyata belum menjadi pilihan menarik bagi generasi muda. Struktur umur seperti pada grafik di atas sesungguhnya kurang ideal untuk menjamin terwujudnya proses kesinambungan produksi sapi potong di Indonesia. Rendahnya minat generasi muda terhadap usaha sapi potong merupakan salah satu masalah penting yang akan menjadi kendala pengembangan usaha sapi potong ke depan. Terkait hal ini, program sarjana membangun desa (SMD) yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai strategis untuk menumbuhkan minat generasi muda di perdesaan terhadap budidaya peternakan.

Mencermati masalah profil struktur umur peternak sapi potong seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk perumusan kebijakan. Pertama, dalam jangka panjang keberpihakan khusus pemerintah dalam meningkatkan kualitas, daya tampung, dan daya tarik pendidikan pertanian (termasuk pendidikan menengah sederajat SLTA serta pendidikan tinggi sederajat politeknik dan universitas). Pemberian insentif beasiswa untuk calon siswa/mahasiswa berprestasi yang akan melanjutkan studi pada bidang pertanian dalam arti luas dapat menjadi salah satu program unggulan. Kedua, dalam jangka pendek dan menengah perlu pengembangan wirausaha baru agribisnis sapi potong melalui program inkubator bisnis yang didukung dengan insentif modal usaha dengan skema yang progresif.

c. Profil Jenis Kelamin

Sebagian besar peternak utama di rumah tangga usaha peternakan sapi potong berjenis kelamin laki-laki, yakni dengan persentase 92,69%. Hanya 7,31% peternak sapi potong berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa minat berusaha sapi potong tidak hanya dimiliki oleh peternak laki-laki saja. Angka 7,31% peternak sapi potong perempuan sesungguhnya termasuk sangat rendah. Padahal SDM perempuan sangat potensial untuk berkiprah banyak dalam usaha peternakan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan peternakan ke depan perlu juga memperhatikan perspektif gender. Walaupun kegiatan pemeliharaan sapi potong pada umumnya memang dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi peternak sapi potong yang handal.

2.3 Kesejahteraan Peternak

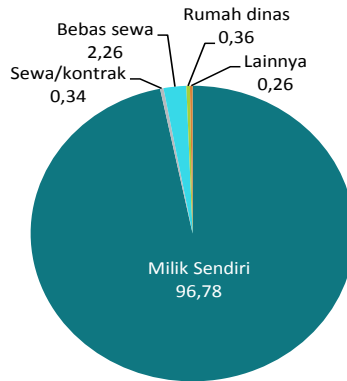
Kesejahteraan peternak sapi potong dapat dilihat dari status rumah yang ditempati beserta jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas dari rumah tersebut. Selain itu juga kesejahteraan peternak juga dapat dilihat dari sumber penerangan, bahan bakar memasak, sumber air minum, dan fasilitas buang air besar yang digunakan oleh keluarga peternak sapi.

a. Status Rumah

Data status rumah tangga usaha peternakan sapi potong disajikan pada Gambar 5.5. Pada Gambar 5.5 terlihat bahwa sebagian besar peternak sapi potong (96,78%) telah menempati rumah yang berstatus sebagai milik sendiri. Hanya 0,34% peternak yang masih menyewa atau mengontrak

rumah. Sisanya sebanyak 2,88% menempati rumah bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan peternak sudah cukup baik.

Gambar 5.5.
Sebaran status rumah yang ditempati peternak sapi (%)

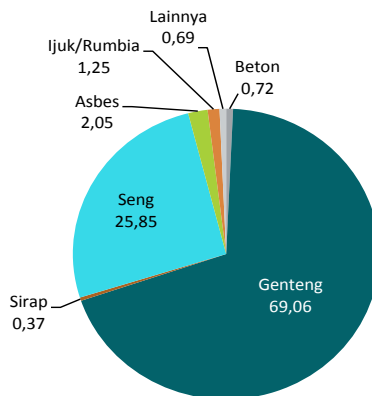


Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

b. Jenis Atap Terluas

Data sebaran jenis atap terluas rumah tangga usaha peternakan sapi potong disajikan pada Gambar 5.6. Pada Gambar 5.6 dapat dilihat bahwa atap rumah yang ditempati peternak sapi terbuat dari bahan yang cukup bervariasi, yaitu genteng, sirap, seng, asbes, ijuk/rumbia, beton, dan lainnya. Atap genteng merupakan jenis yang terbanyak (69,06%), diikuti kemudian atap dari bahan seng (25,85%). Walaupun masih terdapat rumah peternak yang beratapkan sirap (hanya 0,37%), maka berdasar jenis atap rumah peternak ini dapat dikatakan bahwa secara umum peternak sudah dalam tingkat kesejahteraan yang baik.

Gambar 5.6.
Sebaran jenis atap terluas rumah peternak sapi potong (%)



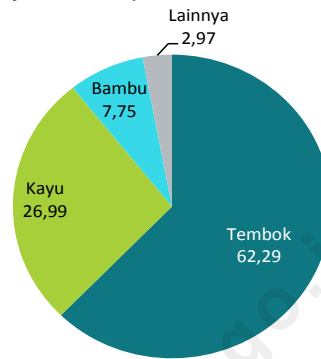
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

c. Jenis Dinding Terluas

Tembok merupakan jenis dinding terbanyak bagi rumah tangga peternakan sapi potong sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 5.7. Jenis dinding terluas yang terbanyak ke dua adalah dari kayu, sedangkan sisanya dari bahan bambu dan lainnya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar peternak sapi telah menempati rumah yang cukup permanen yang menunjukkan tingkat kesejahteraan peternak sudah baik.

Gambar 5.7.

Sebaran jenis dinding terluas dari rumah yang ditempati peternak sapi potong (%)



Sumber: BPS (2015*). ST2013-STU

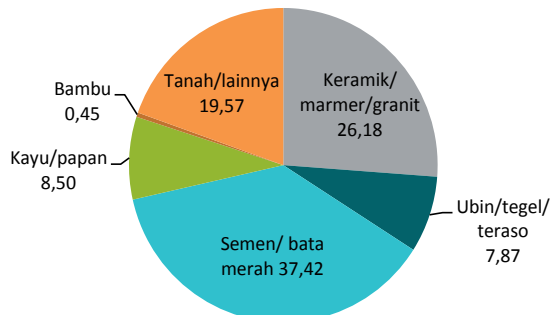
d. Jenis Lantai Terluas

Jenis lantai terluas rumah tangga peternakan sapi potong sangat bervariasi mulai dari yang berbahan tanah/lainnya hingga yang sudah berbahan keramik/marmer/granit. Jenis lantai terluas yang terbanyak adalah semen/bata merah, diikuti oleh jenis lantai keramik/ marmer/ granit, kemudian jenis tanah/lainnya. Selain itu terdapat jenis lantai berbahan kayu/papan, ubin/tegel/teraso, dan bambu seperti terlihat pada Gambar 5.8.

Dari kondisi lantai terluas rumah tangga peternakan sapi potong ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan peternak sapi potong tidak merata karena masih cukup banyak rumah peternak yang hanya berlantai tanah/lainnya (19,57%), akan tetapi sudah cukup banyak pula rumah peternak yang berlantai keramik/marmer/granit (26,18%). Walaupun demikian secara keseluruhan tingkat kesejahteraan peternak sapi sudah baik karena lebih dari 80% rumahnya berlantai bukan tanah/lainnya.

Gambar 5.8.

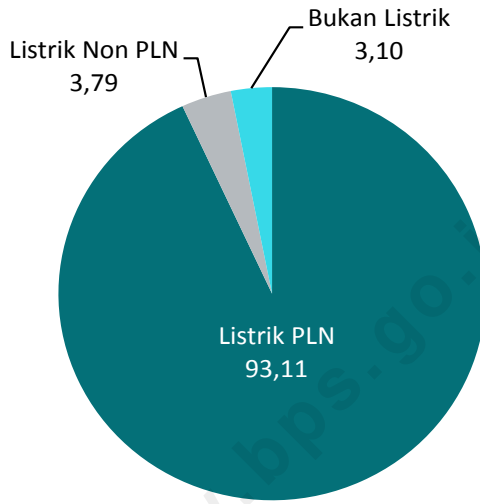
Sebaran jenis lantai terluas dari rumah yang ditempati peternak sapi potong (%)



Sumber: BPS (2015*). ST2013-STU

e. Sumber Penerangan

Hampir semua rumah tangga peternakan sapi potong sudah menikmati fasilitas listrik. Hanya 3,10% peternak yang sumber penerangannya bukan dari listrik. Sebagian besar peternak (93,11%) menggunakan sumber penerangan listrik PLN dan sebanyak 3,79% menggunakan sumber penerangan listrik non PLN (Gambar 5.9). Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek sumber penerangan di rumah tingkat kesejahteraan peternak sapi potong sudah baik.

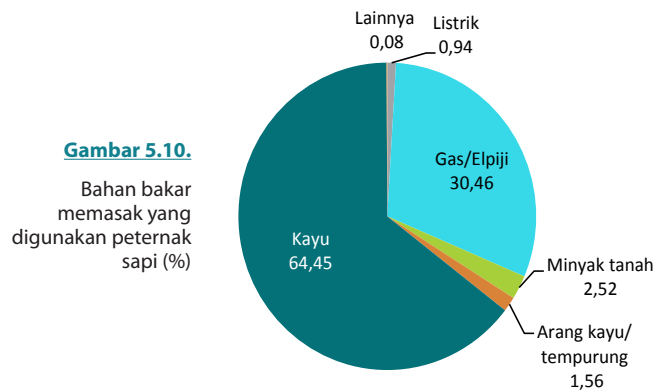


Gambar 5.9.
Sumber penerangan di rumah peternak sapi (%)

Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

f. Bahan Bakar Memasak

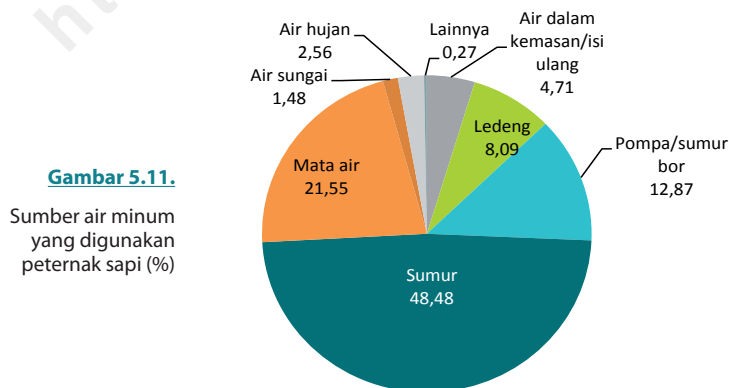
Sebagian besar rumah tangga peternakan sapi potong (64,45%) menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Bahan bakar untuk memasak kedua terbanyak yang digunakan adalah gas/elpiji (30,46%). Sisanya berturut-turut, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.10, menggunakan minyak tanah, arang kayu/tempurung, listrik, dan lainnya. Dari kondisi ini terlihat bahwa program pemerintah yang lalu untuk mengganti bahan bakar memasak menjadi gas/elpiji secara keseluruhan ternyata belum tercapai. Di sisi lain dikhawatirkan kayu yang digunakan oleh sebagian besar peternak sapi untuk memasak diperoleh dengan menebang pohon produktif. Oleh karena itu dilihat dari aspek penggunaan bahan bakar untuk memasak ini, tingkat kesejahteraan peternak sapi potong masih kurang baik.



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

g. Sumber Air Minum

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga peternakan sapi potong cukup beragam. Dari Gambar 5.11 terlihat bahwa hampir separuh (48,48%) peternak sapi sumber air minumnya berasal dari sumur. Berikutnya, sumber air minum terbanyak ke dua dan ke tiga adalah mata air (21,55%) dan pompa/sumur bor (12,87%). Lebih dari 12% peternak sudah menggunakan ledeng dan air dalam kemasan/isi ulang yang sudah terjamin dari aspek kebersihan/kesehatannya. Akan tetapi masih ada sekitar 4% peternak yang masih menggunakan air hujan, air sungai dan lainnya yang tidak terjamin kebersihan/kesehatannya. Walaupun demikian secara keseluruhan kesejahteraan peternak sapi dilihat dari aspek sumber air minum sudah baik karena lebih dari 95% peternak sudah menggunakan sumber air minum yang bersih/sehat.



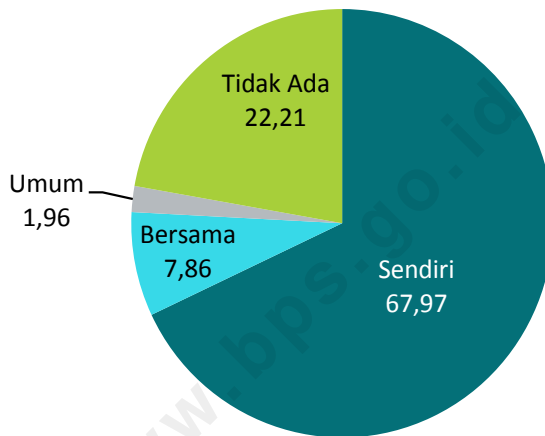
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

h. Fasilitas BAB

Data fasilitas untuk buang air besar (BAB) pada rumah tangga usaha peternakan sapi potong disajikan pada Gambar 5.12. Sebagian besar peternak (67,97%) sudah mempunyai fasilitas BAB sendiri. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan fasilitas BAB bersama maupun umum. Akan tetapi peternak yang tidak mempunyai fasilitas BAB masih cukup besar, yaitu sebanyak 22,21%. Selain karena belum mampu membuat fasilitas BAB, ada kemungkinan peternak yang tidak memiliki fasilitas BAB disebabkan belum memiliki kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran peternak dalam hal kesehatan dan kebersihan masih perlu ditingkatkan.

Gambar 5.12.

Fasilitas buang air besar yang digunakan peternak sapi



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

6

Kinerja Agribisnis Sapi Potong

BAB 6

Kinerja Agribisnis Sapi Potong

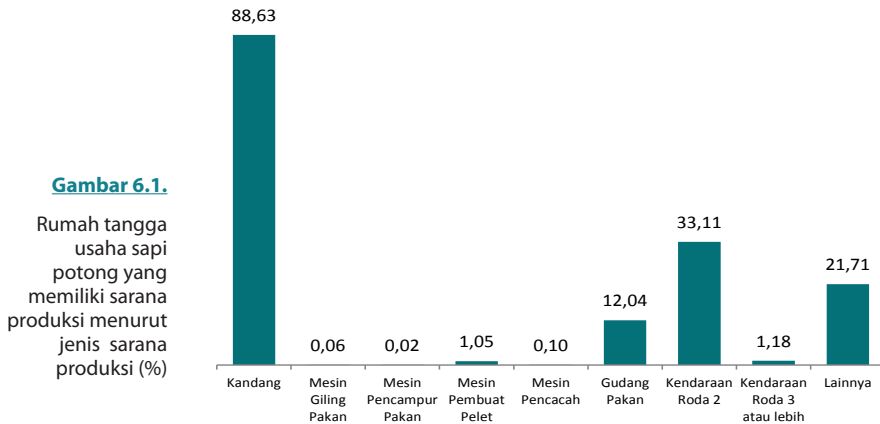
“Pemasaran sapi potong dianggap belum efisien karena perubahan harga di tingkat pengecer hanya diikuti perubahan harga yang lebih kecil di tingkat produsen.”



Agribisnis sapi potong mencakup rangkaian kegiatan bisnis dari hulu ke hilir, meliputi subsistem penyediaan sarana produksi ternak, budidaya ternak, pengolahan hasil ternak, dan pemasaran hasil ternak. Keempat subsistem tersebut harus ditunjang oleh subsistem sarana pendukung yang memadai. Kinerja agribisnis sapi potong tentu saja dipengaruhi oleh efisiensi dan produktivitas yang dicapai pada setiap subsistem yang ada. Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja agribisnis sapi potong diperlukan informasi yang akurat tentang keragaan masing-masing subsistem, yang meliputi potensi, permasalahan, alternatif solusinya, dll. Informasi tersebut sangat berguna untuk menyusun arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang tepat untuk pengembangan agribisnis sapi potong.

6.1 Budidaya Ternak

Kinerja agribisnis sapi potong sangat dipengaruhi oleh aspek budidaya ternak. Penerapan paket teknologi inovatif dalam budidaya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi ternak. Sarana produksi merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian peternak dalam kegiatan produksi. Sarana produksi ternak sapi potong terdiri dari bangunan kandang, mesin giling pakan, mesin pencampur pakan, mesin pembuat pelet, mesin pencacah, gudang pakan, hingga kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga atau lebih, dan lain-lain. Persentase rumah tangga usaha sapi potong yang memiliki sarana produksi ternak menurut jenis sarana produksi dapat dilihat pada Gambar 6.1.

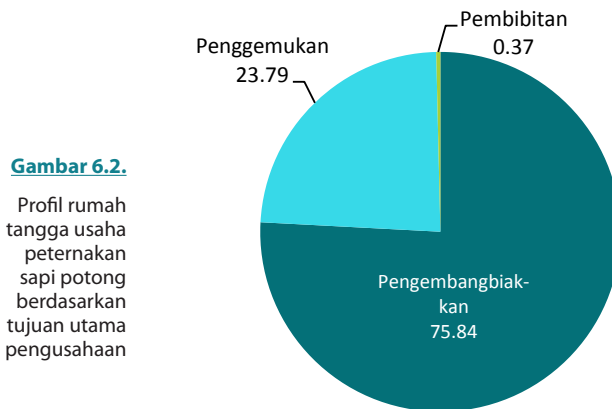


Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

a. Tujuan Usaha

Usaha ternak sapi potong dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan utama pemeliharaan ternak, yaitu untuk pembibitan (produksi bibit unggul), pengembangbiakan, dan penggemukan sapi potong. Profil rumah tangga usaha peternakan sapi potong berdasarkan klasifikasi tujuan tersebut disajikan pada Gambar 6.2. Pada Gambar 6.2 terlihat bahwa persentase RT usaha peternakan yang bergerak dalam usaha pembibitan sapi potong sangat rendah, yaitu hanya 0,37%. Sebagian besar peternak bergerak dalam usaha pengembangbiakan (75,84%), yaitu yang secara terbatas menghasilkan anak sapi dan membesarkannya sehingga menjadi sapi bakalan.

Rendahnya minat peternak rakyat dan perusahaan peternakan (usaha peternakan berbadan hukum) terhadap usaha pembibitan ternak sapi potong menjadi kendala serius dalam pembangunan peternakan sapi potong di Indonesia. Perlu dicermati bahwa penggunaan bibit unggul yang sedikit dan lemahnya usaha perbibitan merupakan faktor penentu utama kinerja usaha penggemukan sapi potong. Masalah ini sesungguhnya merupakan penyebab utama rendahnya penyediaan sapi bakalan dari RT usaha peternakan di Indonesia yang menyebabkan rendahnya jumlah dan mutu sapi bakalan yang dapat disediakan untuk usaha penggemukan sapi potong.



Gambar 6.2.

Profil rumah tangga usaha peternakan sapi potong berdasarkan tujuan utama pengusahaan

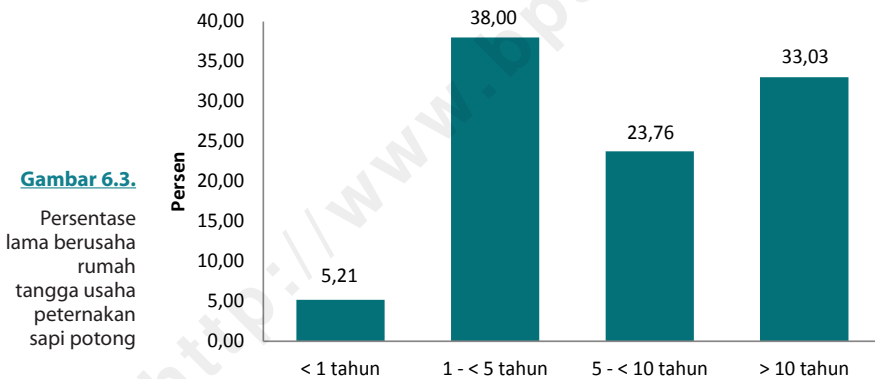
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Kondisi ini harus segera diperbaiki, termasuk dengan memberikan insentif khusus yang menarik kepada peternak rakyat atau usaha peternakan berbadan hukum untuk menekuni usaha pembibitan sapi potong. Insentif khusus yang menarik sangat diperlukan karena usaha perbibitan memerlukan investasi yang relatif besar dan berjangka panjang, dibandingkan dengan usaha penggemukan sapi potong. Kegagalan membangun usaha perbibitan sapi nasional akan menyebabkan ketergantungan terhadap sapi bakalan impor makin meningkat.

Terkait dengan pengembangan usaha perbibitan, konsep sentra peternakan rakyat (SPR) sangat cocok untuk menumbuhkan kapasitas rumah tangga peternakan untuk menghasilkan anak sapi dan sapi bakalan yang bermutu. Namun, pengembangannya secara progresif di berbagai wilayah nusantara harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian sumber daya genetik ternak lokal. Program persilangan melalui IB dan kawin alam sapi lokal dengan ternak impor harus terarah dan sedapat mungkin zonasi pengembangan bibit dikembangkan berdasarkan bangsa atau genetik ternak impor. Sebagai contoh, tahun 2015 dilakukan pengadaan sapi indukan unggul jenis brahman cross (BX) impor besar-besaran. Ternak tersebut seharusnya disebar ke daerah tertentu saja menuju pembentukan zona pengembangan, sedangkan daerah lain dikembangkan untuk jenis ternak lain, dan seterusnya.

b. Lama Berusaha

Lama berusaha mencerminkan pengalaman peternak sapi potong dalam menekuni usahanya. Selain itu lama berusaha juga mencerminkan jumlah peternak yang baru mulai menekuni usaha peternakan sapi potong. Pada Gambar 6.3 disajikan data persentase rumah tangga usaha peternakan sapi potong berdasarkan lama berusaha. Pada gambar tersebut tampak bahwa 56,79% peternak telah menekuni usaha sapi potong lebih dari 5 tahun. Jumlah peternak sapi potong yang telah menekuni usahanya lebih dari 10 tahun bahkan cukup tinggi, yaitu sebesar 33,03%. Peternak baru yang menekuni usaha sapi potong kurang dari setahun hanya 5,21%. Profil lama berusaha ini mencerminkan beberapa hal menarik, yaitu: (a) dominasi peternak berpengalaman lama (tentu saja berkorelasi dengan umur peternak) masih cukup tinggi; (b) persentase peternak baru termasuk cukup rendah sehingga ada indikasi usaha sapi potong masih kurang menarik; dan (c) usaha sapi potong cukup menjanjikan sehingga ada indikasi peternak yang sudah mencoba usaha banyak yang bertahan sampai lebih dari 5 tahun (56,79%).



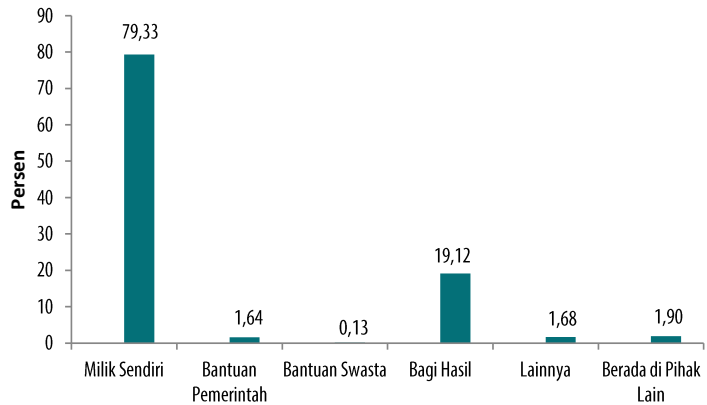
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

c. Status Penguasaan Ternak

Data status penguasaan ternak adalah hal yang sangat menarik, baik bagi pemerintah maupun pengamat ekonomi pertanian. Pada Gambar 6.4 disajikan data persentase rumah tangga usaha peternakan sapi potong berdasarkan status penguasaan ternak. Pada gambar tersebut tampak jelas bahwa sebagian besar status penguasaan ternak sapi potong berupa milik sendiri (79,33%). Sebanyak 19,12% berupa kegiatan bagi hasil. Data ini mengungkap bahwa sebagian besar sapi potong merupakan milik peternak atau dari kegiatan bagi hasilnya dengan pihak lain.

Gambar 6.4.

Persentase status penguasaan ternak di rumah tangga usaha peternakan sapi potong



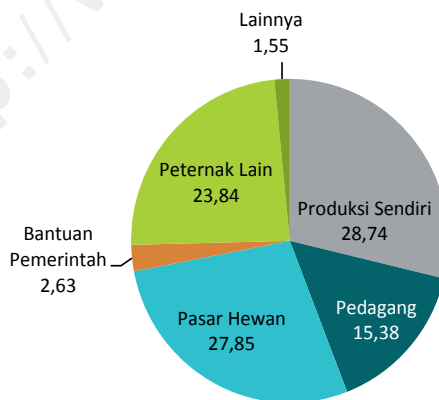
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

d. Asal Utama Ternak

Asal utama ternak sapi potong yang diusahakan peternak cukup beragam, yaitu dari produksi sendiri, membeli ke pedagang, membeli di pasar hewan, bantuan pemerintah, membeli dari peternak lain, dan lain-lain. Sapi potong yang terbanyak berasal dari produksi sendiri. Sapi potong yang dibeli dari pasar hewan hampir seimbang dengan yang berasal dari produksi sendiri, yaitu sekitar 28%. Sapi potong yang berasal dari peternak lain juga cukup besar yaitu hampir 24%. Selengkapannya asal utama ternak pada rumah tangga usaha peternakan sapi potong dapat dilihat pada Gambar 6.5.

Gambar 6.5.

Asal utama ternak pada rumah tangga usaha peternakan sapi potong (%)



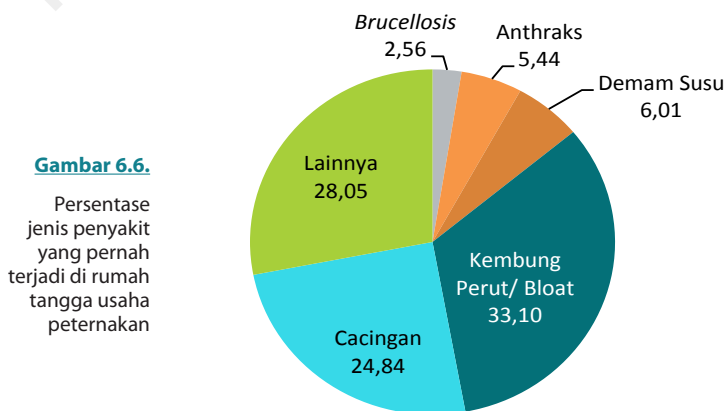
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

e. Penyakit Ternak

Sejak semakin maraknya kasus penyakit ternak yang berimplikasi luas terhadap produksi ternak dan kesehatan masyarakat veteriner, aspek kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) menjadi isu strategis dunia. Pembangunan peternakan harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keswan dan kesmavet. Program pengelolaan keswan dan kesmavet harus berhasil mendorong peningkatan produksi dan produktivitas ternak serta menghindari penyebaran penyakit zoonosis. Dalam kaitan ini, upaya deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan pemberantasan segala jenis penyakit ternak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jenis penyakit yang diderita atau menyerang ternak sapi potong rakyat cukup banyak, meliputi *brucellosis*, *anthraks*, demam susu (*milk fever*), kembung perut (*bloat*), cacingan, dan berbagai penyakit lainnya. Jumlah rumah tangga peternakan yang jumlah ternaknya pernah sakit mencapai 12,13%. Data serangan penyakit berdasarkan persentase rumah tangga usaha peternakan yang ternaknya pernah sakit pada tahun 2013 disajikan pada Gambar 6.6. Pada Gambar 6.6 tampak jelas bahwa kejadian penyakit jenis kembung perut menduduki peringkat pertama (33%) disusul cacingan (25%).

Penyakit kembung perut dan cacingan sangat mengganggu produksi ternak. Secara khusus, penyakit kembung perut sering berujung dengan berakhirnya hidup seekor sapi ternak (baik karena diputuskan dipotong atau mati sia-sia). Sedangkan kehadiran parasit cacing sudah jelas secara langsung mengganggu pasokan zat-zat makanan untuk produksi ternak, yang menyebabkan pertumbuhan ternak akan melambat. Mencermati data di atas, tampaknya kedua jenis penyakit dominan ini harus menjadi prioritas penanganan ke depan, karena penanganan kedua jenis penyakit tersebut lebih ke arah upaya perbaikan dalam manajemen budi daya ternak sapi potong.



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU, diolah

Penyakit kembung perut dan penyakit cacing pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan ternak. Karena itu penanganan penyakit tersebut harus bertumpu pada pemberdayaan peternak sehingga mampu menerapkan teknik budidaya yang baik. Terkait dengan penanganan penyakit ternak, perlu dievaluasi kebijakan pemerintah yang cenderung fokus kepada penyakit brucellosis, anthraks, penyakit mulut dan kuku, serta penyakit lainnya. Ke depan, pencegahan dan penanganan penyakit kembung perut dan cacingan harus lebih diprioritaskan di seluruh Indonesia.

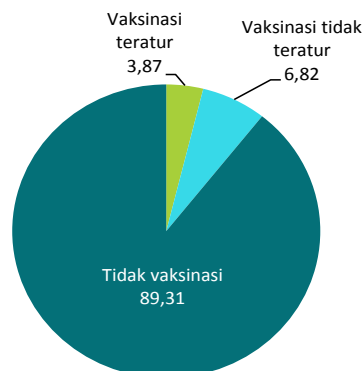
f. Vaksinasi

Pengendalian penyakit ternak adalah upaya mengurangi interaksi antara penyebab atau agen penyakit dengan ternak. Salah satu cara untuk melakukan pengendalian penyakit adalah ternak adalah dengan melakukan upaya pencegahan, antara lain dengan melakukan vaksinasi. Tujuan vaksinasi adalah memberikan kekebalan (antibodi) pada ternak, sehingga dapat melawan antigen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Vaksinasi adalah pemberian antigen untuk merangsang bekerjanya sistem kekebalan tubuh dalam menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa.

Data persentase rumah tangga usaha peternakan sapi potong yang melakukan vaksinasi disajikan pada Gambar 6.7. Pada gambar tersebut tampak bahwa persentase rumah tangga usaha peternakan sapi potong yang tidak melakukan vaksinasi sangat tinggi, mencapai 89.31%. Hal ini mencerminkan aspek pengelolaan kesehatan ternak sapi potong perlu dibenahi secara serius. Kemampuan peternak menerapkan program vaksinasi sangat terbatas. Pada sisi lain kemampuan dan daya jangkau dinas teknis terkait peternakan sangat terbatas dalam memberikan pelayanan vaksinasi. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan pos kesehatan hewan (Poskeswan) di seluruh wilayah Indonesia harus diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah.

Gambar 6.7.

Persentase rumah tangga usaha peternakan berdasarkan pelaksanaan vaksinasi



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

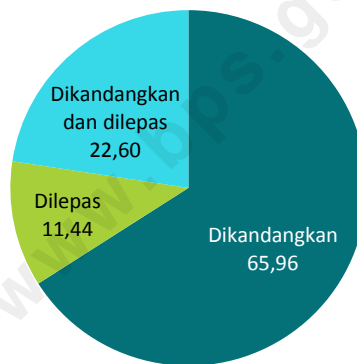
g. Cara Pemeliharaan

Teknologi budidaya ternak terus berkembang, termasuk perhatian publik terhadap aspek kesejahteraan ternak. Aspek budidaya ternak juga sangat strategis untuk diperhatikan guna peningkatan kinerja usaha sapi potong. Pembangunan aspek budidaya ternak mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan rancangan kandang ternak yang nyaman, pengelolaan ransum, pemanfaatan limbah kandang, pengendalian penyakit ternak, dll.

Pada Gambar 6.8 disajikan cara pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh rumah tangga usaha peternakan. Sudah 66% rumah tangga usaha peternakan sapi potong menerapkan cara pemeliharaan ternak sapi potong menggunakan kandang ternak. Hanya sekitar 11% saja peternak yang masih memelihara sapi potong dengan cara melepaskan ternak. Capaian ini sesungguhnya sudah mengembirakan, meskipun upaya pembinaan harus terus dilanjutkan khususnya kepada 11% rumah tangga usaha peternakan yang belum menggunakan kandang.

Gambar 6.8.

Cara pemeliharaan sapi potong pada rumah tangga usaha peternakan



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Secara khusus pada 89% (66% + 23%) rumah tangga usaha peternakan yang telah menggunakan kandang masih membutuhkan pembinaan, terutama pada aspek disain atau rancangan bentuk kandang yang dapat memberikan kenyamanan pada ternak sapi potong, khususnya di daerah tropis. Secara umum, ternak sapi potong di daerah tropis mengalami cekaman panas (*heat stress*) yang berpengaruh langsung terhadap produksi ternak. Pengaruh cekaman panas pada ternak di lingkungan tropis harus menjadi perhatian serius, karena dapat mengakibatkan pemborosan penggunaan energi yang berasal dari pakan.

6.2 Kelayakan Usaha

a. Struktur Penerimaan Usaha Sapi Potong

Penerimaan usaha sapi potong terdiri dari penerimaan dari perubahan bobot tubuh sapi, penerimaan dari produk ikutan, dan penerimaan dari jasa peternakan. Penerimaan dari perubahan bobot tubuh sapi diukur dari selisih antara bobot tubuh sapi saat panen dengan bobot tubuh sapi bakalan ketika mulai dipelihara dikalikan dengan harganya per kilogram bobot hidup saat penjualan. Penerimaan dari produk ikutan adalah penerimaan dari kotoran sapi yang bisa dimanfaatkan untuk kompos maupun biogas. Penerimaan dari jasa peternakan adalah penerimaan yang diperoleh bila sapi dimanfaatkan sebagai alat angkut maupun hewan bajak.

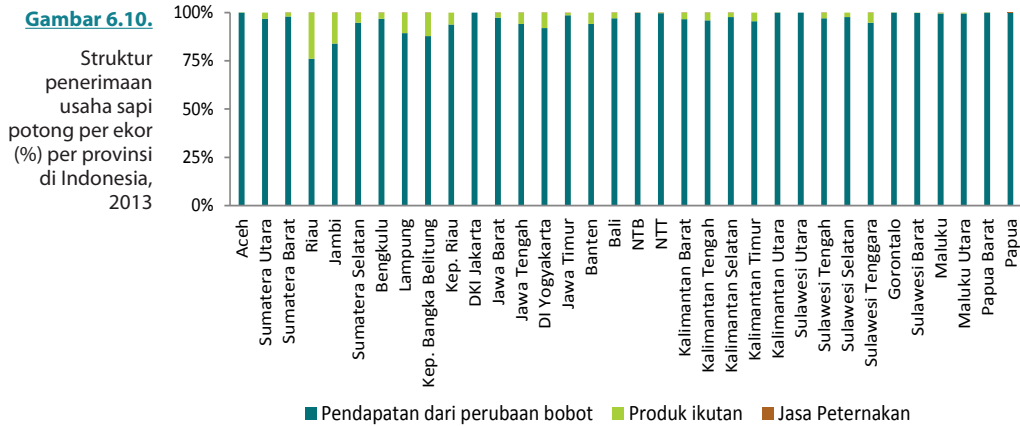
Struktur penerimaan usaha sapi potong per ekor di Indonesia pada tahun 2013 disajikan pada Gambar 6.9. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sumbangan terbesar penerimaan usaha sapi potong berasal dari perubahan bobot tubuh sapi. Secara nasional rata-ratanya mencapai 97,18%. Sementara itu, sumbangan penerimaan dari produk ikutan dan jasa peternakan sangat kecil. Bila dicermati per provinsi terlihat bahwa sumbangan produk ikutan yang terbanyak terjadi di beberapa provinsi di wilayah Sumatera, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka dan Belitung, serta Lampung. Di Pulau Jawa terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Secara rinci hal ini dapat dilihat pada Gambar 6.10.

Gambar 6.9.

Struktur penerimaan usaha sapi potong per ekor (%) di Indonesia, 2013



Sumber: BPS (2015*). ST2013-STU



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

b. Struktur Biaya Usaha Sapi Potong

Biaya yang dikeluarkan peternak sapi potong terdiri dari biaya pakan, upah tenaga kerja, biaya BBM, biaya listrik, biaya air, biaya pemeliharaan kesehatan, dan pengeluaran lain-lain. Biaya pakan terdiri dari biaya hijauan pakan ternak, pakan buatan pabrik/konsentrat, dan pakan lainnya (jerami, ampas tahu dan lain-lain). Upah tenaga kerja dibedakan menjadi upah tenaga kerja dibayar dan upah tenaga kerja tidak dibayar. Pengeluaran lain-lain mencakup perbaikan kecil barang modal, sewa lahan, sewa kandang, pajak tidak langsung, jasa peternakan, retribusi, bunga atas pinjaman, biaya angkutan, penyusutan barang modal dan lain-lain.

1) Struktur Biaya Riil/Sebenarnya Usaha Sapi Potong

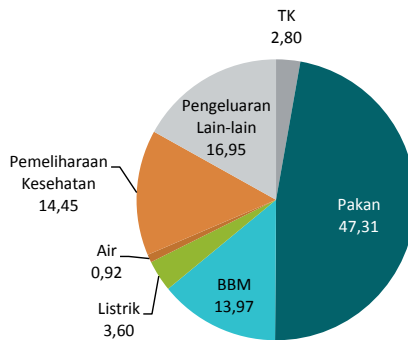
Struktur biaya riil usaha sapi potong per ekor di Indonesia pada tahun 2013 disajikan pada Gambar 6.11. Terlihat bahwa persentase terbesar biaya yang dikeluarkan peternak sapi adalah biaya pakan (47,31%). Diikuti kemudian oleh pengeluaran lain-lain yang ternyata cukup besar (16,95%) karena komponen pengeluaran lain-lain yang harus dikeluarkan peternak sapi juga banyak.

Biaya BBM dan pemeliharaan kesehatan mempunyai porsi yang hampir sama. Biaya BBM tersebut cukup besar. Kemungkinan digunakan untuk mesin pengolah pakan. Padahal apabila kotoran sapi dimanfaatkan secara maksimal untuk produksi biogas, maka biaya BBM bisa dihemat. Biaya kesehatan/obat2an juga tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan banyaknya sapi yang terserang penyakit. Oleh karena itu harus ada perbaikan manajemen dan nutrisi.

Upah tenaga kerja yang dikeluarkan peternak ternyata hanya 2,80%. Persentase ini menempati urutan ke enam setelah pakan, pengeluaran lain-lain, BBM, pemeliharaan kesehatan, dan biaya listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan sapi potong sebagian besar dikerjakan oleh tenaga kerja dalam keluarga yang tidak diupah secara tunai.

Gambar 6.11.

Struktur biaya riil usaha sapi potong per ekor (%) di Indonesia, 2013



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

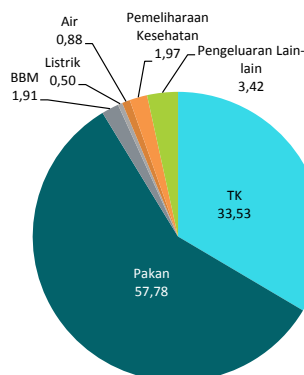
2) Struktur Biaya Seharusnya Usaha Sapi Potong

Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh peternak sapi adalah biaya yang secara riil dibayarkan oleh peternak ditambah dengan nilai input-input yang selama ini tidak dibayar oleh peternak. Input-input tersebut secara riil tidak dihitung karena merupakan milik peternak sendiri atau bisa diambil secara bebas oleh peternak tanpa membayar. Input-input tersebut adalah tenaga kerja dalam keluarga yang tentu saja tidak diupah; pakan/hijauan, pakan lain (jerami, ampas tahu) dan air yang diambil secara bebas sehingga tidak dibayar; serta pengeluaran lain-lain (sewa lahan dan sewa kandang) milik sendiri sehingga juga tidak dibayar.

Dari Gambar 6.12 terlihat bahwa dengan memperhitungkan seluruh input yang digunakan, ternyata persentase terbesar biaya yang dikeluarkan oleh peternak adalah tetap untuk pakan. Bahkan persentasenya naik dari 47,31% menjadi 57,78%. Perubahan terbesar terjadi pada persentase upah tenaga kerja. Persentase biaya tenaga kerja melonjak dari 2,80% menjadi 33,53% atau melonjak dari urutan ke enam menjadi urutan ke dua. Hal ini menegaskan bahwa pemeliharaan sapi potong lebih banyak dikerjakan oleh tenaga kerja dalam keluarga yang tidak diupah.

Gambar 6.12.

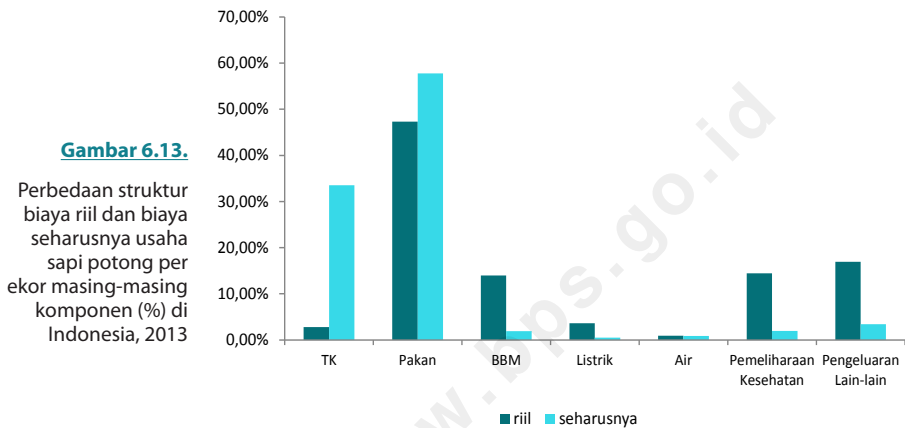
Struktur biaya seharusnya usaha sapi potong per ekor (%) di Indonesia, 2013



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Bila dikaitkan dengan teknis pemeliharaan sapi potong, maka porsi biaya tenaga kerja ini menjadi sangat tinggi. Dengan skala usaha yang sangat kecil (2 – 3 ekor per rumah tangga), maka diduga bahwa penggunaan tenaga kerja tersebut tidak efisien.

Lebih jelas perbedaan struktur biaya riil dan biaya seharusnya usaha sapi potong per ekor masing-masing komponen di Indonesia pada tahun 2013 disajikan pada Gambar 6.13. Terlihat bahwa selain proporsi biaya pakan dan upah tenaga kerja yang naik, maka proporsi biaya lain yang terdiri dari biaya BBM, listrik, air, pemeliharaan kesehatan, dan pengeluaran lain-lain menjadi turun.



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Selisih biaya seharusnya dengan biaya riil terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu mencapai Rp 6.069.690,00 per ekor, sedangkan selisih terendah terjadi di Provinsi Maluku yaitu sebesar Rp 838.210,00 per ekor. Sementara secara nasional, selisih biaya seharusnya dengan biaya riil yang terjadi sebesar Rp3.119.430,00 per ekor.

Besarnya selisih biaya seharusnya dan biaya riil ini menggambarkan besarnya “subsidi” yang diberikan peternak sapi potong kepada konsumen akibat tidak dihitungnya biaya-biaya sebesar selisih tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata peternak sapi potong Indonesia telah mensubsidi konsumen sebesar Rp3 juta per ekor. Subsidi tertinggi diberikan oleh peternak di Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan subsidi terendah diberikan oleh peternak di Provinsi Maluku.

c. Analisis Kelayakan Usaha Sapi Potong

Berdasarkan struktur penerimaan dan struktur biaya seperti diuraikan sebelumnya, maka dapat dilakukan analisis pendapatan dan perhitungan R/C rasio sebagai gambaran kelayakan usaha sapi potong. Analisis pendapatan dan kelayakan tersebut dilakukan berdasar biaya riil maupun berdasar biaya seharusnya.

1) Analisis Pendapatan (Berdasar Biaya Riil Usaha Sapi Potong)

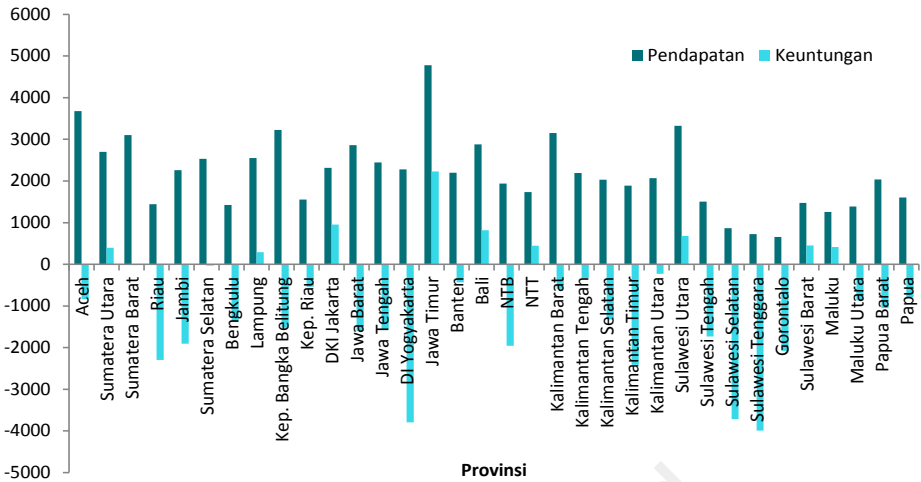
Pendapatan usaha sapi potong adalah penerimaan usaha sapi potong dikurangi dengan biaya riil usaha sapi potong. Pendapatan usaha sapi potong di semua provinsi di Indonesia maupun secara nasional bernilai positif. Pendapatan paling tinggi dinikmati oleh peternak di Provinsi Jawa Timur, yaitu Rp 4.777.420,00 per ekor, sedangkan pendapatan terendah diperoleh peternak di Provinsi Gorontalo, yaitu Rp 659.410,00 per ekor. Rata-rata nasional menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh peternak adalah Rp3.642.220,00 per ekor. Bila pada umumnya sapi potong dipelihara antara 120 – 150 hari, maka pendapatan peternak per ekor per bulan adalah antara Rp700 ribu hingga Rp900 ribu.

2) Analisis Keuntungan (Berdasar Biaya Seharusnya Usaha Sapi Potong)

Keuntungan usaha sapi potong adalah penerimaan usaha sapi potong dikurangi biaya seharusnya usaha sapi potong. Hasilnya, hanya peternak di sembilan provinsi yang usaha sapi potongnya masih menguntungkan. Seperti dapat dilihat pada Gambar 6.14, provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Peternak di 25 provinsi lain mengalami kerugian yang ditunjukkan oleh keuntungan yang negatif. Kerugian terbesar dialami oleh peternak di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu mencapai Rp3.992.310,00 per ekor, sedangkan kerugian terkecil dialami oleh peternak di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar Rp15.730,00 per ekor.

Walaupun demikian, secara nasional usaha sapi potong masih menguntungkan. Hal ini dilihat dari keuntungan yang positif sebesar Rp522.790,00 per ekor. Akan tetapi besarnya keuntungan ini masih kurang memadai mengingat waktu pemeliharaan sapi potong yang umumnya berkisar antara 120 – 150 hari. Dengan keuntungan sekitar Rp500 ribu per ekor maka hal ini berarti bahwa peternak hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp100 ribu – Rp125 ribu per ekor per bulan.

Gambar 6.14.
Pendapatan dan keuntungan per ekor usaha sapi potong per provinsi di Indonesia, 2013



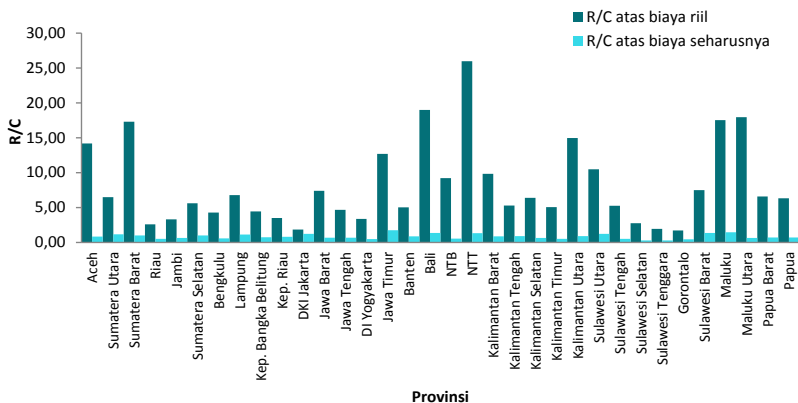
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

3) Perbandingan Kelayakan Usaha Sapi Potong di Indonesia

Berdasar biaya riil maka R/C rasio yang diperoleh seluruhnya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan usaha sapi potong di seluruh provinsi di Indonesia layak diusahakan. Kelayakan usaha paling tinggi adalah yang dilakukan oleh peternak di wilayah NTT (R/C = 25,97), sedangkan kelayakan paling rendah adalah di Provinsi Gorontalo (R/C = 1,71). Secara nasional R/C rasio yang diperoleh sebesar 8,71.

Berdasarkan biaya seharusnya, maka hanya usaha sapi potong di sembilan provinsi yang masih layak karena R/C rasionya masih lebih besar dari 1 yaitu Provinsi Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Usaha sapi potong di Provinsi Jawa Timur paling layak dengan R/C = 1,76 (Gambar 6.15). Usaha sapi potong di 25 provinsi lain menjadi tidak layak lagi diusahakan karena R/C rasio yang diperoleh lebih kecil dari 1. Usaha ternak sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan paling jauh dari kelayakan (R/C = 0,27). Walaupun demikian, secara nasional R/C rasio yang diperoleh masih sebesar 1,15.

Gambar 6.15.
Perbandingan R/C atas biaya riil dan R/C atas biaya seharusnya usaha sapi potong per ekor, 2013



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

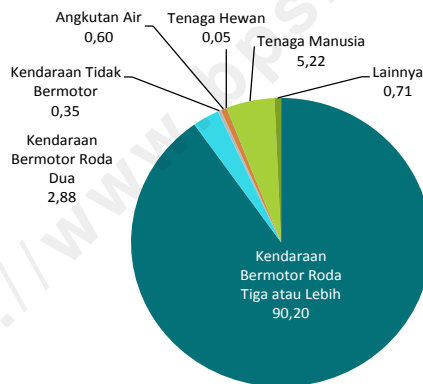
6.3 Pemasaran Ternak

a. Penjualan Hasil

Selama periode 1 Mei 2013 – 30 April 2014, sebagian besar peternak sapi potong (60,41%) ternyata belum pernah menjual hasil ternaknya. Jadi hanya 39,59% atau kurang dari separuh peternak sapi potong melakukan pemasaran hasil. Dari 39,59% peternak yang sudah melakukan pemasaran hasil tersebut, 6,88% peternak menggunakan sarana angkutan, sedangkan 32,71% peternak tidak menggunakan sarana angkutan. Sarana angkutan yang digunakan oleh peternak cukup bervariasi seperti disajikan pada Gambar 6.16. Sarana angkutan tersebut meliputi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan tidak bermotor, angkutan air, tenaga hewan, tenaga manusia, dan lain-lain. Karena produk sapi potong berukuran besar dan pemasaran ada yang dilakukan hingga keluar daerah, maka kebanyakan sarana angkutan yang digunakan adalah kendaraan bermotor roda tiga atau lebih.

Gambar 6.16.

Sarana angkutan yang digunakan untuk pemasaran (%)

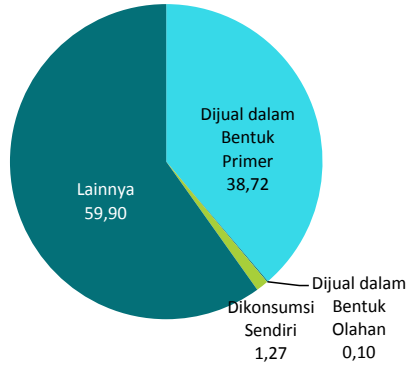


Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Sarana angkutan yang digunakan oleh peternak cukup bervariasi seperti disajikan pada Gambar 6.16. Sarana angkutan tersebut meliputi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan tidak bermotor, angkutan air, tenaga hewan, tenaga manusia, dan lain-lain. Karena produk sapi potong berukuran besar dan pemasaran ada yang dilakukan hingga keluar daerah, maka kebanyakan sarana angkutan yang digunakan adalah kendaraan bermotor roda tiga atau lebih.

Gambar 6.17.

Jenis pemanfaatan sapi potong (%)



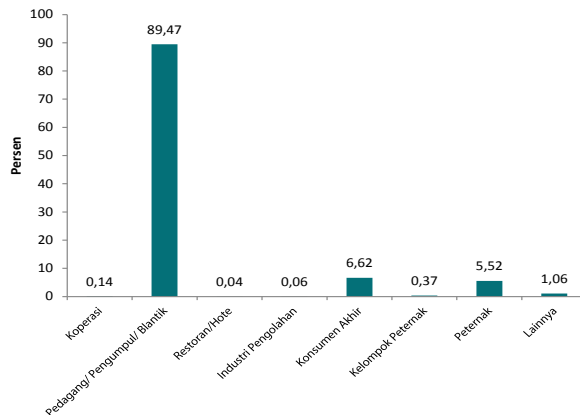
Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Pemanfaatan sapi potong hanya sekitar 40% untuk dijual dalam bentuk primer, dijual dalam bentuk olahan, dan dikonsumsi sendiri. Gambar 6.17 menunjukkan sebagian besar (60%) ternyata adalah untuk manfaat lainnya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sebagian besar peternak memperlakukan sapi potong sebagai “rojo koyo”, sebagai tabungan atau aset, yang baru akan dijual atau dikonsumsi saat ada keperluan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sapi potong di tingkat rumah tangga peternak sebagian besar merupakan stok pasif. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam memperhitungkan ketersediaan daging sapi dari rumah tangga peternak.

Tempat penjualan sapi potong dalam bentuk primer sebagian besar adalah ke pedagang/ pengumpul/ blantik. Walaupun demikian terdapat beberapa pembeli lain dari sapi potong yang dihasilkan peternak. Sebanyak lima sampai enam persen sapi potong dijual peternak ke peternak lain dan konsumen akhir. Restoran/ hotel, industri pengolahan, kelompok peternak, koperasi, dan lain-lain hanya membeli sapi potong dalam persentase yang sangat kecil. Secara rinci disajikan pada Gambar 6.18.

Gambar 6.18.

Tempat penjualan hasil dalam bentuk primer (%)

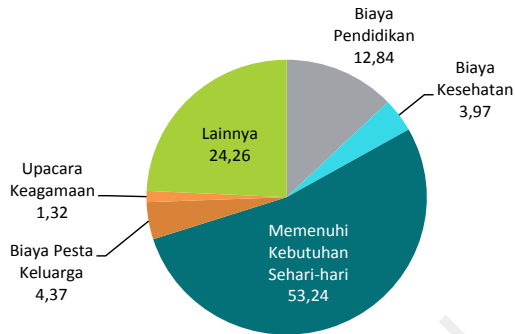


Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Dari penjualan sapi potong yang dilakukan, alasan utama terbanyak adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasan berikutnya secara berturut-turut antara lain adalah biaya pendidikan, biaya pesta keluarga, biaya kesehatan, dan upacara keagamaan.

Gambar 6.19.

Sebaran alasan utama penjualan sapi potong (%)

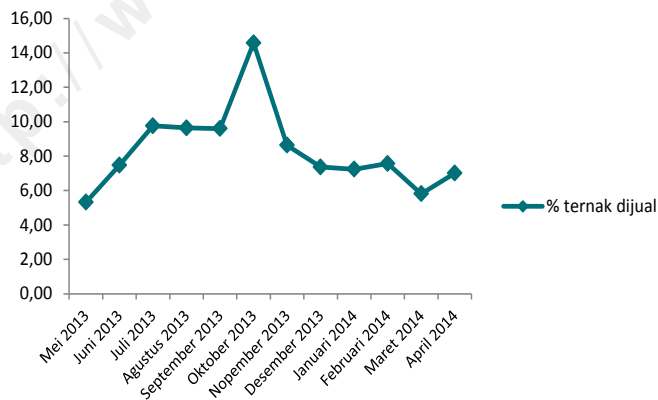


Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Persentase ternak yang dijual oleh peternak berfluktuasi tiap bulannya. Dari bulan Mei 2013 hingga April 2014 terlihat bahwa persentase terendah adalah pada bulan Mei 2013. Berikutnya mengalami peningkatan tiap bulan hingga mencapai yang tertinggi adalah pada bulan Oktober 2013. Hal ini terkait dengan hari Idul Fitri. Setelah itu terlihat persentase penjualan ternak menurun kembali hingga mendekati posisi awal yaitu sekitar persentase yang dijual pada bulan Mei 2013.

Gambar 6.20.

Perkembangan ternak yang dijual pada bulan Mei 2013 – April 2014 (%)

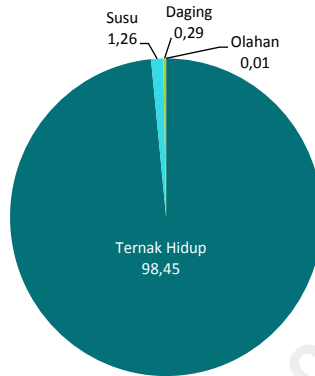


Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

Bentuk produk utama sapi potong yang dijual peternak hampir seluruhnya adalah dalam bentuk ternak hidup. Produk lain berupa daging, hasil olahan, dan susu. Sedikit sekali peternak yang menjual produk sapi dalam bentuk daging apalagi hasil olahan seperti dapat dilihat pada Gambar 6.21.

Gambar 6.21.

Sebaran bentuk produk utama sapi potong yang dijual (%)



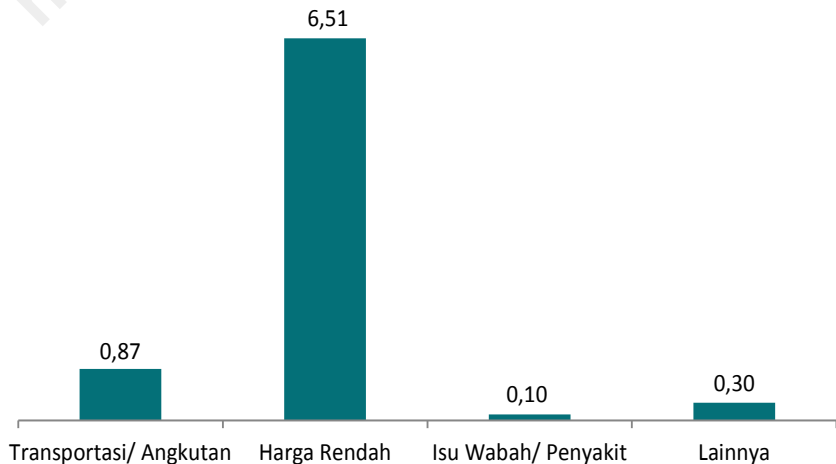
Sumber: BPS (2015*). ST2013-STU

Kesulitan Pemasaran

Sebagian besar peternak (92,22%) tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran. Hanya sebagian kecil peternak saja (7,78%) yang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi peternak bervariasi mulai dari masalah rendahnya harga, transportasi atau angkutan, isu wabah/penyakit, dan lain-lain. Masalah terbesar yang dihadapi peternak adalah rendahnya harga seperti terlihat pada Gambar 6.22.

Gambar 6.22.

Masalah-masalah yang dihadapi peternak dalam pemasaran (%)



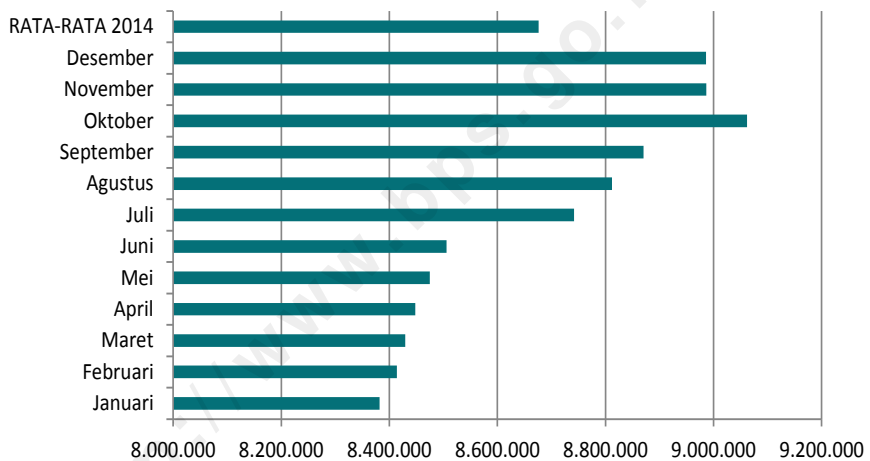
Sumber: BPS (2015*). ST2013-STU

Harga Sapi di Tingkat Produsen

Pada tahun 2014, harga sapi di tingkat produsen rata-rata mencapai hampir Rp8,7 juta per ekor. Harga terendah terjadi pada bulan Januari yang tidak sampai Rp8,4 juta per ekor. Akan tetapi harga tersebut terus menerus naik tiap bulannya hingga mencapai yang tertinggi pada bulan Oktober, yaitu hampir mencapai Rp9,1 juta. Hal ini merupakan kejadian tiap tahun terkait dengan hari Idul Fitri dimana permintaan daging sapi meningkat, sehingga harga daging sapi naik. Kenaikan harga daging sapi mendorong kenaikan harga sapi di tingkat produsen. Pada bulan November dan Desember harga sapi turun kembali. Akan tetapi penurunannya hanya sedikit sehingga di akhir tahun 2014, harga sapi masih lebih mahal dibanding harga di awal tahun.

Gambar 6.23.

Harga sapi di tingkat produsen dengan asumsi berat per ekor: 250 kg (Rp), 2014



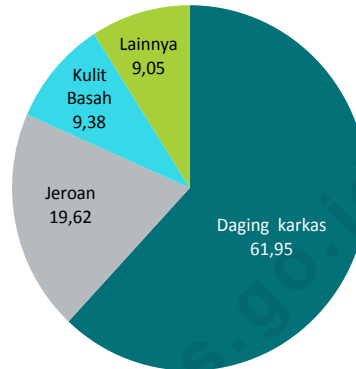
Sumber: BPS (2014), Statistik Harga Produsen

Pemanfaatan Produksi Sapi Potong dan Harganya

Produk utama sapi potong adalah daging karkas. Akan tetapi bagian lain juga bisa dimanfaatkan yaitu jeroan, kulit basah, dan lain-lain seperti disajikan pada Gambar 6.24. Terlihat bahwa daging karkas ternyata hanya 62% dari produksi sapi potong. Sisanya sebanyak 38% adalah jeroan, kulit sapi, dan lain-lain. Oleh karena produksi sapi potong tidak seluruhnya berupa daging, maka penghitungan produksi daging sapi dari populasi sapi potong yang ada harus memperhatikan persentase ini.

Gambar 6.24.

Pemanfaatan produk sapi potong (%), 2014)

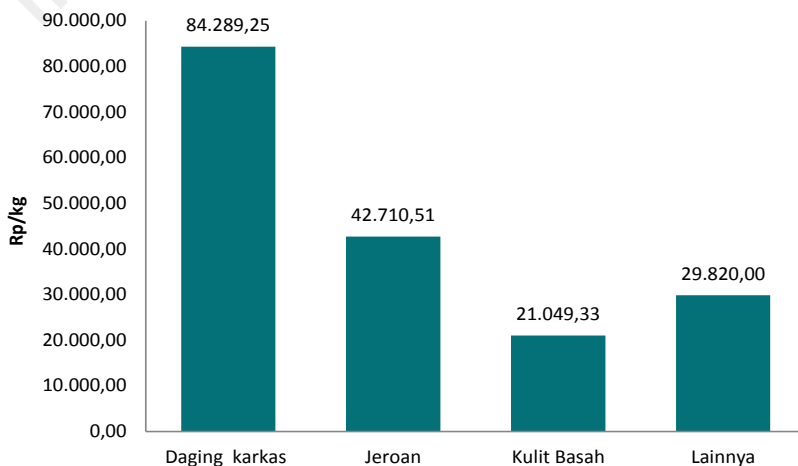


Sumber: Ditjen PKH, 2014

Pada tahun 2014 harga rata-rata masing-masing bagian dapat dilihat pada Gambar 6.25. Harga daging karkas merupakan yang tertinggi yaitu sekitar Rp84 ribu/kg. Harga jeroan kurang lebih separuh harga daging karkas. Harga kulit basah juga kurang lebih separuh harga jeroan, atau seperempat harga daging karkas. Bagian lain-lain produk sapi ternyata mempunyai harga yang cukup tinggi, yaitu hampir Rp30 ribu/kg.

Gambar 6.25.

Harga rata-rata pemanfaatan produk sapi di tingkat produsen, 2014

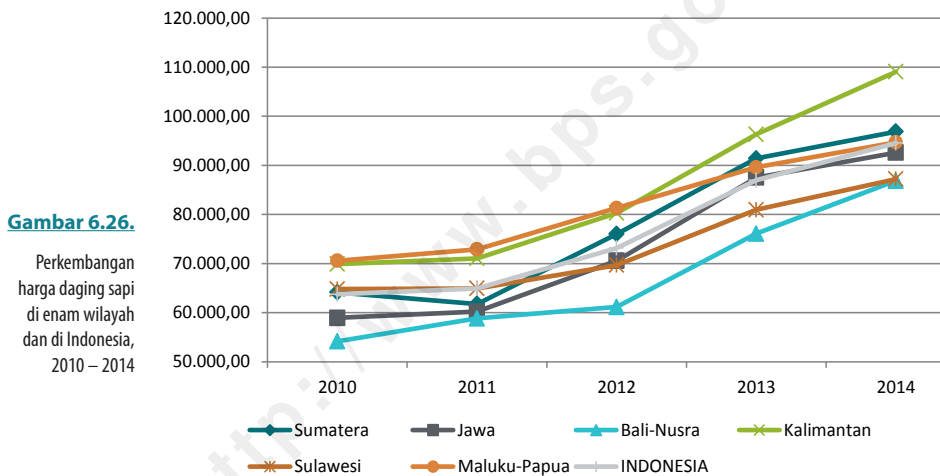


Sumber: Ditjen PKH, 2014

Perkembangan Harga Daging Sapi

Harga daging sapi dari tahun 2010 hingga 2014 di semua wilayah Indonesia cenderung meningkat setiap tahun seperti dapat dilihat pada Gambar 6.26. Bila diperbandingkan antar wilayah, maka secara umum harga daging sapi di Kalimantan adalah yang paling tinggi tiap tahunnya. Bahkan lebih tinggi dari harga rata-rata nasional.

Pada tahun 2014, harga daging sapi di Kalimantan mencapai Rp109.075,92 per kg. Diikuti oleh wilayah Sumatra Rp96.869,17 per kg, kemudian wilayah Maluku dan Papua Rp94.702,67 per kg, serta wilayah Jawa Rp92.606,75 per kg. Harga rata-rata di wilayah Sulawesi serta Bali dan NTT di bawah Rp90.000,00 per kg yaitu masing-masing Rp87.218,08 per kg dan Rp86.858,67 per kg. Sementara itu harga rata-rata secara nasional adalah Rp94,555.21 per kg.



Sumber: BPS (2014), Statistik Harga Produsen

Analisis Efisiensi Pemasaran

Analisis efisiensi pemasaran dilakukan dengan menghitung margin harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer, serta analisis korelasi harga. Analisis korelasi harga ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer. Diharapkan kenaikan harga di tingkat pengecer yang berarti harga yang dibayar konsumen akan dinikmati oleh produsen. Harga daging sapi di tingkat produsen dan di tingkat pengecer per bulan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tahun 2014	Harga di tingkat produsen (Pf)	Harga di tingkat pengecer (Pr)
Januari	52,387.89	93,085.67
Februari	52,586.88	92,948.17
Maret	52,685.46	92,864.83
April	52,800.89	93,097.33
Mei	52,968.92	93,107.83
Juni	53,163.16	93,091.33
Juli	54,635.64	96,293.17
Agustus	55,074.77	96,161.33
September	55,440.21	95,917.50
Oktober	56,637.10	96,063.00
November	56,165.61	95,315.83
Desember	56,163.66	96,716.50
Rata-rata	54,225.85	94,555.21

Tabel 6.1.
Harga daging sapi di tingkat produsen dan di tingkat pengecer, 2014

Sumber: BPS (2014), Statistik Harga Produsen

Dari Tabel 6.1 terlihat bahwa rata-rata harga daging sapi di tingkat produsen adalah Rp54.225,85 per kg sedangkan rata-rata harga daging sapi di tingkat pengecer adalah Rp94.555,21 per kg. Jadi margin yang dinikmati oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran daging sapi ini rata-rata adalah Rp40.329,36 per kg. Margin ini sangat tinggi. Apalagi bila dibandingkan dengan harga yang diterima oleh produsen.

Analisis korelasi harga menggambarkan seberapa jauh perkembangan harga daging pada dua tempat/tingkat yang sama atau berlainan yang saling berhubungan melalui perdagangan. Hasil analisis regresi harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer disajikan pada Tabel 6.2.

Dari hasil analisis terlihat bahwa korelasi harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer cukup erat ($r = 0,914$). Koefisien korelasi yang tinggi ($r=1$) menunjukkan bahwa pembentukan harga antara dua pasar lebih terintegrasi atau menunjukkan struktur pasar lebih bersaing sempurna. Oleh karena koefisien korelasi yang didapat masih lebih kecil dari 1, maka disimpulkan bahwa pembentukan harga di dua pasar belum terintegrasi sempurna. Pasar daging sapi yang terjadi juga belum bersaing sempurna.

Adapun persamaan regresi yang didapat adalah:

$$Pf = -32090,97 + 0,913 Pr$$

Harga di tingkat pengecer berpengaruh sangat nyata terhadap harga di tingkat produsen. Akan tetapi karena b yang diperoleh juga lebih kecil dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pasar dalam pemasaran daging sapi tidak bersaing sempurna. Ada kecenderungan bahwa pasar yang terjadi adalah oligopsonistik atau bahkan monopsonistik.

Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	.914a	.835	.819	689.46921		

ANOVA ^b						
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.412E7	1	2.412E7	50.736	.000a
	Residual	4753677.875	10	475367.788		
	Total	2.887E7	11			

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-32090.968	12119.801		-2.648	.024
	harga di tingkat pengecer	.913	.128	.914	7.123	.000

^a Dependent Variable: harga di tingkat produsen

Tabel 6.2.
Hasil analisis regresi harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer, 2014

Integrasi pasar menjelaskan sejauh mana pembentukan harga daging sapi pada suatu tingkat lembaga tataniaga dipengaruhi oleh harga daging sapi tingkat lembaga lainnya. Analisis transmisi harga adalah analisis yang menggambarkan sejauhmana dampak perubahan hargadaging sapi di suatu tempat/tingkatan terhadap perubahan harga daging sapitersebut di tempat lain.

Elastisitas transmisi yang terjadi adalah sbb:

$$\begin{aligned} E_t &= 1/b. P_f/P_r \\ &= 1/0,913 . 54.225,85/94.555,21 \\ &= 1,0953. 0,5735 \\ &= 0,6282 \end{aligned}$$

Oleh karena elastisitas transmisi kurang dari 1, maka disimpulkan bahwa pemasaran daging sapi belum efisien. Perubahan harga di tingkat pengecer/konsumen hanya diikuti oleh perubahan harga yang lebih kecil di tingkat produsen.

Ketidakefisienan pemasaran daging sapi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Pada umumnya posisi tawar peternak sangat lemah akibat kurangnya informasi harga. Penentu harga dalam pemasaran sapi adalah pedagang/blantik. Apalagi dalam praktik masih terjadi pemasaran sapi dengan sistem "jogrogan" yang hanya menaksir harga sapi berdasar penampilan sapi. Jadi sapi tidak ditimbang. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakteelitian pengukuran bobot sapi yang menyebabkan risiko kerugian bagi peternak.

Selain itu terdapat masalah pada rantai pemasaran. Pemasaran daging sapi yang bermula dari peternak sapi potong, kemudian ke pedagang, selanjutnya ke RPH/TPH, kemudian ke pedagang pengecer, baru kemudian sampai ke konsumen. Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dalam pemasaran daging sapi ini paling tinggi dibandingkan lembaga pemasaran yang lain karena biasanya pedagang yang menanggung biaya transportasi. Pedagang tentu ingin memperoleh keuntungan dalam usahanya. Oleh karena itu, untuk menutupi biaya pemasaran yang sangat tinggi, pedagang juga akan menentukan harga jual yang tinggi. Akibatnya, selisih harga di tingkat peternak dan di tingkat pengecer/konsumen sangat tinggi.

Kondisi ini menyebabkan usaha sapi potong menjadi kurang menarik. Peternak baru dalam usaha sapi potong sangat sedikit karena lebih menguntungkan untuk menjadi pedagang/blantik.

6.4 Kelembagaan, Penyuluhan, dan Jasa Layanan Pendukung

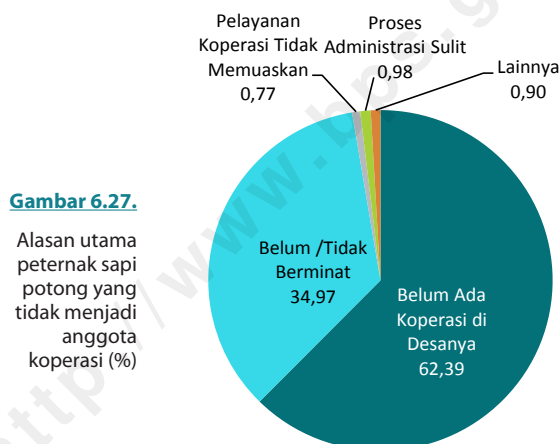
a. Koperasi

Telah disepakati bahwa koperasi akan terus didorong dan dikembangkan menjadi soko guru pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, ke depan koperasi akan menjadi salah satu pintu masuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang bisa dipilih untuk pengembangan agribisnis sapi potong. Koperasi bisa menunjang agribisnis sapi potong dari subsistem hulu hingga hilir melalui unit-unit usaha yang dikelolanya. Di subsistem hulu, koperasi bisa mengelola unit usaha pengadaan bibit ternak dan sapronak. Dalam rangka menambah kebutuhan modal peternak, koperasi bisa mengelola unit usaha perkreditan. Di subsistem on-farm koperasi bisa menyediakan jasa inseminasi buatan (IB) dan kesehatan hewan. Di subsistem hilir koperasi bisa mengelola penjualan bersama produk sapi potong yang dihasilkan peternak.

Bila koperasi tidak ada di desa sehingga peternak tidak bisa menjadi anggota koperasi, maka dalam mengusahakan sapi potongnya, peternak harus memenuhi kebutuhannya dari subsistem hulu hingga hilir secara sendiri-sendiri. Efisiensi pengusahaan sapi potong yang diharapkan dapat ditingkatkan dengan bekerjasama melalui koperasi tidak akan tercapai. Peningkatan kesejahteraan peternak sapi potong melalui koperasi juga tidak akan tercapai.

Disisi lain, rumah tangga usaha peternakan sapi potong di Indonesia hanya 4,49% yang menjadi anggota koperasi, sedangkan sisanya 95,51% tidak menjadi anggota koperasi. Kondisi ini tidak tentu saja menguntungkan dari aspek pemberdayaan ekonomi peternak sapi potong. Sebagian besar peternak belum tersentuh program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang banyak didorong pemerintah secara kelembagaan melalui koperasi. Kondisi ini menjadi catatan penting bahwa percepatan pembangunan koperasi di level peternak sapi potong harus menjadi agenda prioritas dalam program swasembada daging sapi.

Setelah ditelusuri, alasan utama rumah tangga usaha peternakan sapi potong tidak ikut dalam keanggotaan koperasi ternyata cukup beragam. Alasan utama rumah tangga usaha peternakan sapi potong yang tidak menjadi anggota koperasi disajikan pada Gambar 6.27. Dari Gambar 6.27 terlihat bahwa alasan utama terbanyak rumah tangga usaha peternakan sapi potong yang tidak menjadi anggota koperasi adalah karena belum ada koperasi di desanya. Alasan utama kedua terbanyak peternak tidak menjadi anggota koperasi adalah karena belum/tidak berminat. Hal ini menggambarkan bahwa masih cukup banyak peternak yang belum/tidak memahami manfaat koperasi bagi peternak. Selain itu terdapat peternak yang tidak menjadi anggota koperasi dengan alasan utama pelayanan koperasi tidak memuaskan, proses administrasi yang sulit, dan lain-lain. Jadi, walaupun koperasi peternak sudah ada, ternyata kinerjanya tidak memuaskan sehingga peternak anggota merasa tidak puas atas pelayanan koperasinya dan peternak bukan anggota enggan menjadi anggota koperasi. Oleh karena itu upaya peningkatan kinerja koperasi yang ada sangat diperlukan.

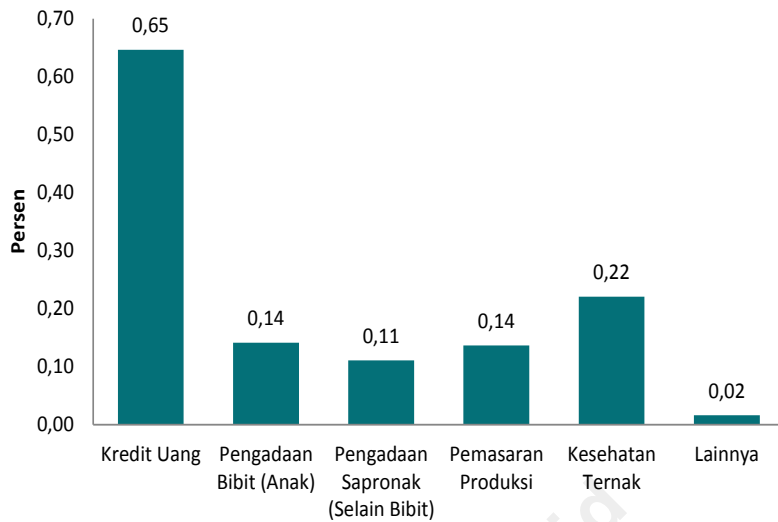


Sumber: BPS (2015⁴). ST2013-STU, diolah

Data lain memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil saja (0,96%) dari rumah tangga usaha peternakan sapi potong yang pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi, sedangkan sisanya sebagian besar peternak (99,04%) tidak pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi. Padahal pelayanan yang diberikan koperasi cukup beragam seperti dapat dilihat pada Gambar 6.28. Terlihat bahwa pelayanan yang diberikan cukup lengkap dari hulu hingga hilir. Dari pengadaan bibit (anak) sapi, pengadaan saponak, kredit uang, kesehatan ternak, pemasaran produksi, dan lainnya. Pelayanan terbanyak adalah pemberian kredit uang, kemudian diikuti terbanyak ke dua adalah pelayanan kesehatan ternak. Pelayanan dalam pengadaan bibit (anak sapi) dan pemasaran hasil yang terkait erat dengan ketersediaan daging sapi perlu ditingkatkan.

Gambar 6.28.

Persentase rumah tangga peternakan yang mendapat pelayanan dari koperasi menurut jenis pelayanan



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

b. Kelompok Peternak

Sejak 20 tahun terakhir berkembang pesat pendekatan kelembagaan dalam pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan peternak (kelompok peternak dan gapoktan) sangat strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing usaha peternakan. Melalui kelompok peternak dapat dibangun aksi kolektif yang memungkinkan terwujudnya sinergi dan tercapainya skala bisnis usaha sapi potong yang lebih layak. Selain itu, kerjasama kemitraan harus terus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan inti-plasma dalam bisnis, termasuk dalam pengadaan sarana produksi, budidaya, pascapanen, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil.

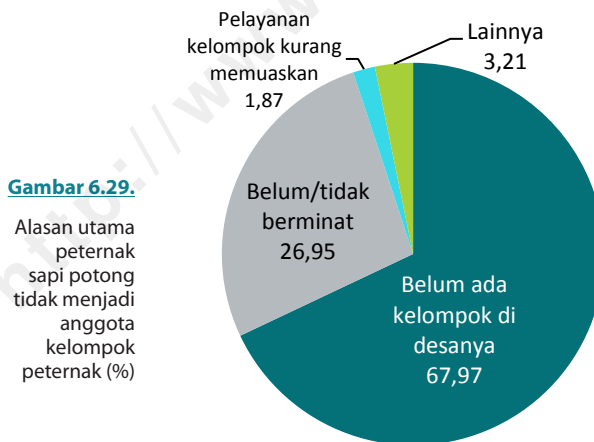
Peran dan fungsi kelembagaan peternak dalam usaha sapi potong rakyat di Indonesiatampaknya masih lemah. Lemahnya kelembagaan peternakan menyulitkan upaya membangun aksi kolektif para peternak. Aksi kolektif para peternak sapi potong sangat diperlukan untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan penerapan manajemen produksi ternak modern.

Persentase peternak sapi potong rakyat yang ikut dalam kelompok sangat rendah, yaitu hanya 5.95%. Sisanya 94.05% tidak menjadi anggota kelompok peternak. Kondisi ini akan menyulitkan pembinaan peternak, termasuk untuk mendorong proses inovasi teknologi melalui kegiatan penyuluhan. Program pemerintah ke depan dalam pembangunan peternakan sapi potong hendaknya memberi prioritas khusus pada penguatan kelembagaan peternak sapi potong. Termasuk program penguatan kelembagaan peternak adalah menginisiasi pembentukan kelompok peternak baru dan melakukan pendampingan untuk penguatan kelembagaan kelompok peternak.

c. Alasan Tidak Ikut Kelompok Peternak

Apabila ditelusuri lebih jauh ternyata alasan peternak tidak ikut dalam kelompok peternak cukup bervariasi. Pada Gambar 6.29 disajikan data persentase alasan peternak tidak ikut kegiatan kelompok. Sebagian besar peternak (67.97%) tidak ikut kelompok karena belum ada kelompok peternak di desanya. Sebanyak 26.95% tidak ikut kelompok karena memang belum/tidak berminat. Kondisi ini senada dengan alasan utama peternak tidak menjadi anggota koperasi. Mengingat manfaat yang dapat diperoleh peternak dengan menjadi anggota kelompok yang juga sama dengan manfaat yang bisa diperoleh dengan menjadi anggota koperasi, maka upaya untuk pembentukan kelompok peternak di desa yang belum terbentuk kelompok dan peningkatan kinerja kelompok yang sudah ada juga sangat diperlukan. Selain itu, sosialisasi atau penyuluhan tentang manfaat kelompok juga perlu digalakkan.

Fenomena yang tergambar dari data di atas mencerminkan bahwa program penguatan kelembagaan peternak melalui pembentukan kelompok peternak dan pendampingan harus menjadi prioritas. Program khusus semacam *community development* dengan menghadirkan tenaga penyuluh pertanian dan relawan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk membentuk kelompok peternak yang diikuti dengan pendampingan. Selain itu, pintu masuk program pemerintah hendaknya dirancang melalui kelompok peternak.

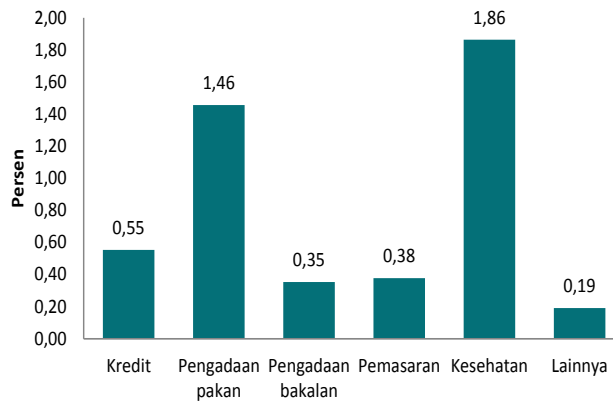


Sumber: BPS (2015⁹). ST2013-STU, diolah

Sebagian besar peternak (96,71%) tidak pernah mendapatkan pelayanan dari kelompok peternak, dan hanya 3,29% peternak saja yang pernah mendapat pelayanan kelompok dengan rincian seperti dapat dilihat pada Gambar 6.30.

Gambar 6.30.

Persentase rumah tangga peternakan yang mendapat pelayanan dari kelompok peternak menurut jenis pelayanan



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

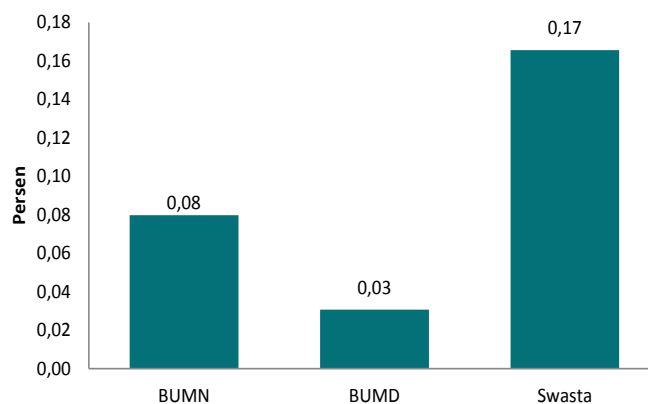
Dari Gambar 6.30 terlihat bahwa jenis pelayanan terbanyak yang diterima peternak dari kelompok peternak adalah pelayanan kesehatan kemudian pengadaan pakan. Hal ini juga hampir senada dengan pelayanan yang dimanfaatkan peternak dari koperasi. Permasalahan dalam pengadaan bakalan dan pemasaran sapi yang banyak terjadi belum banyak ditangani oleh kelompok peternak. Oleh karena itu pelayanan dalam pengadaan bakalan dan pemasaran hasil oleh kelompok ini juga perlu ditingkatkan.

d. Kemitraan

Sedikit sekali rumah tangga peternakan sapi potong yang ikut program kemitraan, yaitu hanya 0,28%, sedangkan 99,72% peternak tidak mengikuti program kemitraan. Kemitraan dilakukan peternak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta. Sebagian besar kemitraan ternyata dilakukan dengan pihak swasta seperti dapat dilihat pada Gambar 6.31.

Gambar 6.31.

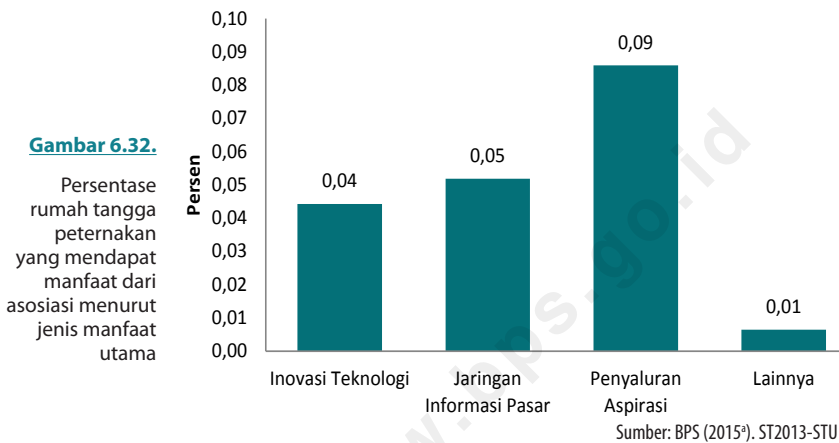
Persentase rumah tangga peternakan yang mengikuti program kemitraan menurut mitra usaha utama



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU

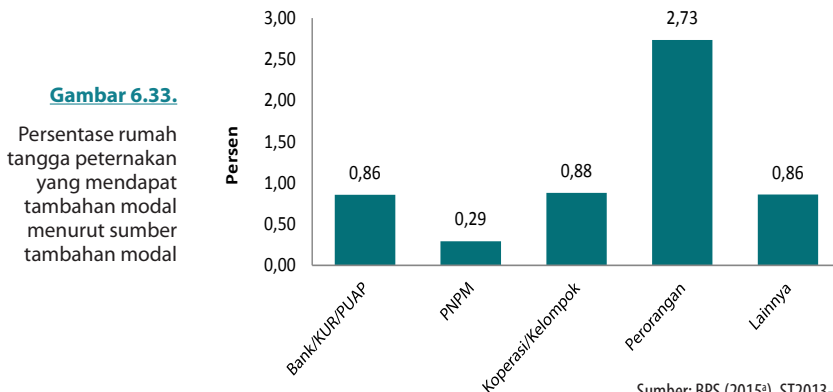
e. Asosiasi Peternak

Peternak yang menjadi anggota asosiasi peternak juga sedikit sekali, yaitu hanya 0,19%. Sebanyak 99,81% tidak menjadi anggota asosiasi peternak. Padahal dengan menjadi anggota asosiasi, peternak bisa memperoleh beberapa manfaat yaitu memperoleh inovasi teknologi, memperoleh jaringan informasi pasar, dapat menyalurkan aspirasi, dan lainnya. Gambar 6.32 menyajikan sebaran manfaat yang diperoleh 0,19% peternak sebagai anggota asosiasi. Dari Gambar tersebut terlihat bahwa manfaat terbesar yang diperoleh peternak adalah penyaluran aspirasi diikuti oleh jaringan informasi pasar.



f. Bantuan Modal

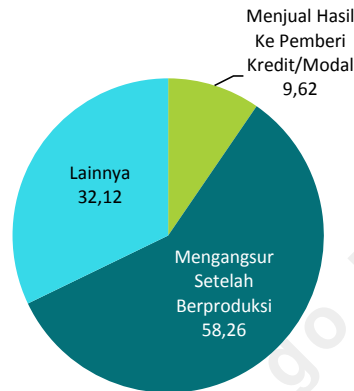
Hanya 5,57% rumah tangga peternakan sapi potong yang mendapat bantuan tambahan modal, sedangkan 94,43% rumah tangga peternakan sapi potong tidak mendapat bantuan tambahan modal. Rumah tangga peternakan sapi potong mendapatkan tambahan modal dari berbagai sumber yaitu bank/KUR/PUAP, PNPM, koperasi/kelompok, perorangan, dan lainnya. Sumber terbanyak ternyata adalah perorangan. Hal ini sejalan dengan kondisi sedikitnya peternak yang menjadi anggota koperasi maupun kelompok. Peternak juga terlihat belum terbiasa dengan lembaga keuangan formal seperti bank. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6.33.



Data cara pembayaran bantuan modal disajikan pada Gambar 6.34. Bantuan modal yang diterima dibayar dengan cara menjual hasil ke pemberi kredit/modal, mengangsur setelah berproduksi, dan lainnya. Cara pembayaran bantuan modal sebagian besar adalah dengan cara mengangsur setelah berproduksi. Menjual hasil ke pemberi kredit atau bantuan modal adalah cara yang terbatas (hanya 9,62%).

Gambar 6.34.

Sebaran cara pembayaran bantuan modal (%)

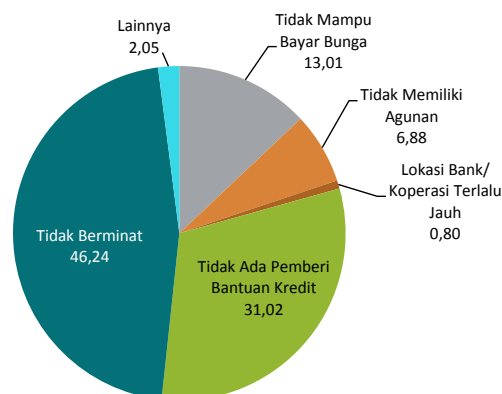


Sumber: BPS (2015⁹). ST2013-STU, diolah

Rumah tangga peternakan sapi potong yang mengandalkan modal sendiri dalam berusaha atau tidak ada tambahan modal dari luar, mempunyai alasan beragam mulai dari tidak mampu membayar bunga, tidak memiliki agunan, lokasi bank/koperasi terlalu jauh, tidak ada pemberi bantuan kredit, tidak berminat, dan lainnya. Secara rinci berbagai alasan ini disajikan pada Gambar 6.35.

Gambar 6.35.

Sebaran alasan utama rumah tangga peternakan sapi potong tidak mengambil tambahan modal (%)

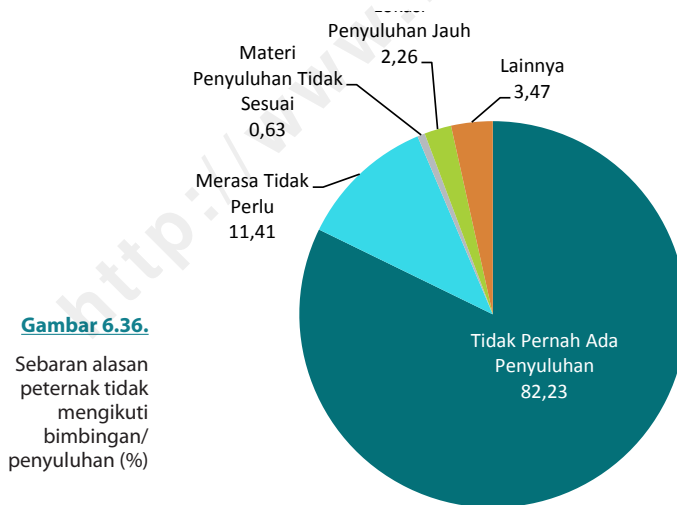


Sumber: BPS (2015⁹). ST2013-STU, diolah

Alasan terbanyak ternyata adalah tidak berminat, diikuti oleh tidak ada pemberi bantuan kredit. Tidak berminat menambah modal menunjukkan bahwa peternak tidak berkeinginan untuk meningkatkan skala usahanya. Tidak ada pemberi bantuan kredit sejalan dengan sedikitnya koperasi dan kelompok peternak yang ada di desa tempat tinggal. Kalaupun ada maka lokasinya jauh sehingga peternak sulit mengaksesnya. Kekhawatiran tidak mampu membayar bunga juga merupakan alasan yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan jiwa kewirausahaan peternak perlu dikembangkan. Oleh karena itu suatu model pembinaan bagi para peternak sapi potong ini juga perlu dirancang.

g. Bimbingan/Penyuluhan

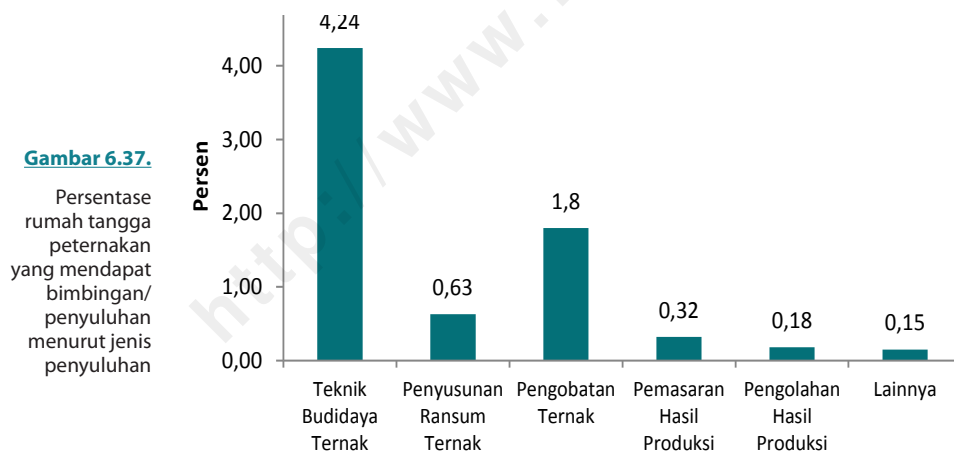
Bimbingan dan penyuluhan hanya dirasakan oleh 5,71% rumah tangga peternakan sapi potong, sedangkan sebagian besar rumah tangga peternakan sapi potong (94,29%) tidak pernah mendapat bimbingan dan penyuluhan. Rumah tangga peternakan sapi potong tidak pernah mendapat bimbingan atau penyuluhan karena tidak pernah ada penyuluhan, merasa tidak perlu, materi penyuluhan tidak sesuai, lokasi penyuluhan terlalu jauh, dan lainnya. Alasan terbanyak adalah tidak pernah ada penyuluhan, kemudian diikuti oleh alasan merasa tidak perlu seperti dapat dilihat pada Gambar 6.36.



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU, diolah

Karena lebih dari 80% peternak tidak mengikuti bimbingan/ penyuluhan dengan alasan tidak pernah ada penyuluhan di desanya, maka hal ini mencerminkan buruknya bimbingan/penyuluhan bagi peternak sapi potong. Ke depan kelembagaan terkait bimbingan/penyuluhan ini perlu diperbaiki kinerjanya.

Sebaran materi bimbingan/penyuluhan yang diberikan cukup beragam (Gambar 6.37). Materi tersebut meliputi teknik budidaya ternak, penyusunan ransum ternak, pengobatan ternak, pemasaran hasil produksi, pengolahan hasil produksi, dan lain-lain. Akan tetapi persentase terbesar adalah tentang teknik budidaya ternak. Materi bimbingan atau penyuluhan ini kemungkinan perlu disesuaikan mengingat adanya peternak yang merasa tidak perlu bimbingan/penyuluhan dan bahkan ada yang menilai bahwa materi bimbingan/penyuluhan tidak sesuai kebutuhan. Materi penyusunan ransum ternak perlu lebih intensif diberikan karena penguasaan peternak tentang hal ini masih kurang. Kebanyakan peternak masih membeli ransum ternak. Materi pengolahan dan pemasaran hasil produksi juga perlu ditingkatkan karena hal ini terkait erat dengan masalah ketersediaan daging sapi.



Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU





7

**Mengejar
Swasembada
Daging**

BAB 7

Mengejar Swasembada Daging

“Swasembada daging sulit dicapai dalam waktu dekat, diperkirakan akan bisa dicapai pada tahun 2023.”



Swasembada daging sapi mengandung makna bahwa kebutuhan daging sapi nasional dapat dipenuhi dari produksi daging sapi dalam negeri. Dalam program swasembada daging sapi tahun 2014 makna tersebut dirumuskan secara lebih moderat lagi, yaitu program swasembada daging sapi dikatakan tercapai jika 90% dari kebutuhan daging sapi dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi daging sapi dalam negeri (PSDS, 2014). Sisanya, terutama produk daging sapi yang berkualitas tinggi dapat diperoleh dari impor. Berlandaskan kepada pemahaman tersebut menjadi jelas bahwa estimasi mengenai kebutuhan daging sapi nasional dan estimasi mengenai produksi daging sapi dalam negeri menjadi hal yang sangat strategis.

Estimasi kebutuhan dan kemampuan produksi daging sapi harus dilakukan dengan cermat. Sampai saat ini sering muncul angka estimasi yang berbeda-beda yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pihak lembaga pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, dan lain-lain. Variasi angka estimasi yang muncul sangat tinggi. Sebagian angka estimasi tersebut bias kepentingan sehingga melahirkan angka yang cenderung *over* atau *under estimate*. Sebagian angka estimasi yang lain cenderung kurang akurat karena masih ada kelemahan dari sisi asumsi, nilai konversi, mengabaikan adanya fluktuasi tahunan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, lembaga yang berkompeten harus segera berinisiatif membangun model yang lebih kuat dan andal sebagai instrumen estimasi kebutuhan dan kemampuan produksi daging sapi nasional. Model tersebut tentunya tidak sederhana karena tingginya dinamika populasi sapi, adanya fluktuasi tahunan, permasalahan *on farm* dan *off farm*,

transportasi, tataniaga, konsistensi kebijakan pemerintah, serta berbagai masalah lainnya yang sangat rumit.

Sebagai bahan makanan daging sapi digunakan untuk berbagai hal terkait dengan konsumsi pangan, yaitu: secara langsung digunakan untuk konsumsi rumah tangga; digunakan untuk bahan baku industri hotel, restoran, dan rumah makan; serta digunakan untuk industri pengolahan makanan. Oleh karena itu perhitungan kebutuhan daging nasional tentu saja harus didasarkan kepada ketiga tujuan penggunaan tersebut. Dalam hal kebutuhan untuk konsumsi langsung rumah tangga, kebutuhan daging tidak didasarkan kepada standar tertentu karena tidak ada standar kecukupan khusus untuk daging. Seperti telah diuraikan pada Bab IV bahwa standar kecukupan konsumsi yang ada adalah standar untuk pangan hewani yang mencakup daging (sapi/kerbau, ayam, babi, dan lainnya), ikan, susu, dan telur. Dengan demikian, kebutuhan daging untuk konsumsi rumah tangga dihitung berdasarkan pada jumlah konsumsi daging yang ada pada pola konsumsi pangan masyarakat.

Ketersediaan daging sapi nasional diperoleh dari produksi sapi dalam negeri, impor sapi hidup, dan impor daging sapi beku. Selama 20 tahun terakhir impor sapi hidup dan impor daging sapi beku selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yang terus meningkat. Volume impor daging sapi beku dan sapi hidup cenderung meningkat dari tahun ke tahun untuk menutupi selisih antara konsumsi dan persediaan daging sapi (defisit) yang semakin melebar. Kebijakan impor sapi hidup atau daging sapi sesungguhnya merupakan suatu pilihan yang harus diambil untuk 5 – 10 tahun ke depan, dalam rangka menghindari pengurasan populasi sapi dalam negeri.

Sama halnya dengan estimasi kebutuhan daging sapi nasional, estimasi ketersediaan daging sapi nasional juga menghadapi kendala yang rumit. Sumber permasalahan antara lain: (a) data populasi yang kurang valid; (b) data struktur populasi sapi yang terlalu kasar (hanya anak, muda, dan dewasa); (c) variasi bobot tubuh sapi yang tinggi; (d) data pemotongan ternak yang tidak akurat dan bahkan ada yang tidak tercatat; (e) sebaran sentra produksi ternak sapi dan penduduk yang tidak sama sehingga ada masalah transportasi, dan lain-lain. Kendala tersebut menyebabkan estimasi ketersediaan daging sapi sulit menemukan akurasi. Oleh karena itu, lembaga yang berkompeten harus segera berinisiatif membangun model yang lebih kuat dan handal sebagai instrumen untuk estimasi ketersediaan daging sapi nasional.

7.1 Perhitungan Konsumsi Daging Sapi Susenas-BPS

Konsumsi pangan rumah tangga merupakan variabel penting untuk menghitung kebutuhan pangan nasional. Untuk menghitung konsumsi pangan rumah tangga dapat digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data Susenas tahun 2013 diketahui bahwa konsumsi energi dari pangan hewani adalah 133,97 kkal/kapita/hari atau baru mencapai 7% dari total konsumsi energi rumah tangga. Dari jumlah energi tersebut kontribusi daging sapi masih sangat kecil yaitu hanya 2% (Badan Pusat Statistik, 2013^c) Kuantitas konsumsi daging segar rumah tangga menurut jenis daging secara nasional dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Jenis daging	Jumlah konsumsi	
	kg/kapita/minggu	kg/kapita/tahun
Daging sapi	0,005	0,27
Daging kerbau	0,000	0,00
Daging kambing	0,000	0,00
Daging babi	0,004	0,22
Daging ayam ras	0,067	3,62
Daging ayam kampung	0,008	0,43
Daging unggas lainnya	0,001	0,05
Daging lainnya	0,001	0,05

Tabel 7.1.
Konsumsi daging rumah tangga menurut jenis daging, tahun 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013^a)

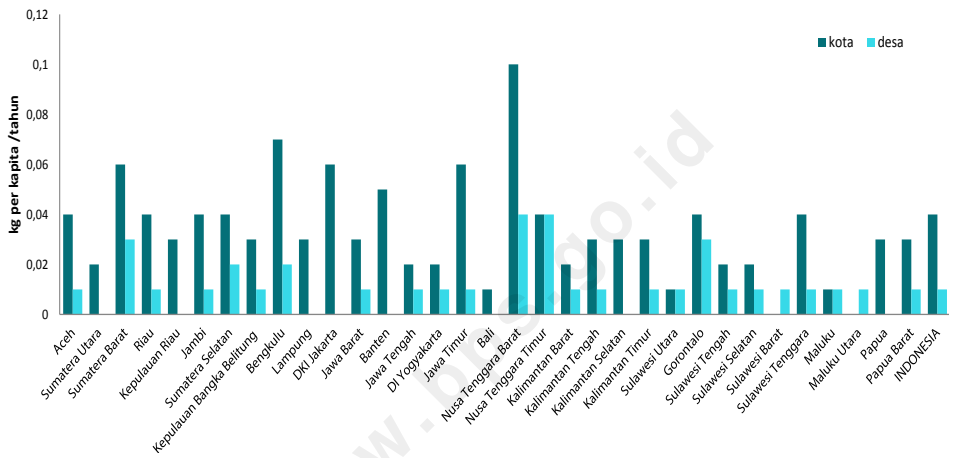
Terlihat dari Tabel 7.1. bahwa rata-rata konsumsi daging sapi segar/kapita/tahun secara nasional adalah 0,27 kg. Konsumsi daging sapi segar yang dimaksud adalah tidak termasuk konsumsi daging sapi dari pangan olahan. Hati dan jeroan sapi juga tidak termasuk dalam daging sapi segar karena wujudnya sudah bukan daging sapi lagi tetapi sudah termasuk *edibel oval* (Pusdatin Deptan, 2014). Berbeda dengan hati dan jeroan, Pusdatin Deptan memasukkan daging bentuk tetelan dan tulang ke dalam kelompok daging segar, sehingga jumlah kedua bentuk daging tersebut ditambahkan ke dalam konsumsi daging segar setelah dikoreksi dengan faktor konversi tertentu (Tabel 7.2).

Pendekatan estimasi konsumsi daging sapi yang digunakan Susenas adalah pendekatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di perkotaan dan di perdesaan serta konsumsi perkapita di perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan Permentan No. 50/Permentan/OT.140/9/2011 yang dimaksud dengan daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi manusia, terdiri dari potongan daging bertulang,

daging tanpa tulang, serta daging variasi berupa daging segar, daging beku, dan daging olahan. Dengan demikian konsumsi daging sapi diperhitungkan dari akumulasi daging segar, daging olahan, dan daging awetan). Faktor konversi untuk tetelan dan tulang sapi ke dalam daging sapi segar dapat dilihat di Tabel 7.2. Konsumsi tetelan dan tulang sapi rumah tangga per kapita per minggu masing-masing adalah 0,001 atau 0,054 kg/kapita/tahun, atau setara 0,01 kg (dari tetelan) dan 0,003 kg (dari tulang) daging sapi segar. Dengan ditambahkannya daging sapi segar dari tetelan dan tulang maka konsumsi daging sapi segar rumah tangga Indonesia adalah 0,283 kg/kapita/tahun.

Gambar 7.1.

Konsumsi daging sapi rumah tangga di Indonesia per provinsi menurut wilayah desa dan kota (kg/kapita/tahun), tahun 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013a)

Tabel 7.2.

Konversi berbagai jenis pangan ke bentuk daging segar

Jenis pangan olahan	Koefisien konversi ke daging segar
Abon	2,00
Daging dalam kaleng	1,00
Daging awetan	0,50
Tetelan	0,20
Tulang	0,05
Soto/gule/sop/rawon	0,20
Sate/tongseng	1,00
Mie Bakso	0,13
Daging goreng/bakar	1,00

Sumber: Buletin Konsumsi Pangan Vol 5(2) 2014. Pusdatin. Deptan.

Pusdatin Deptan tahun 2014 menghitung total konsumsi daging sapi dari data Susenas dengan menjumlahkan konsumsi daging sapi (dalam bentuk daging sapi segar, olahan, dan awetan) pada tingkat rumah tangga perdesaan dan perkotaan Indonesia. Data tersebut untuk tahun 2002 – 2013 dan angka prediksi untuk tahun 2014 – 2016 disajikan pada Tabel 7.3. Dari Tabel tersebut tampak jelas bahwa perbedaan konsumsi daging antara kawasan perdesaan dan perkotaan sangat tinggi. Pada tahun 2015 diprediksi konsumsi daging/kapita/tahun sebesar 1,29 kg/kapita/tahun untuk kawasan perdesaan dan 3,24 kg/kapita/tahun untuk kawasan perkotaan. Perbedaan konsumsi daging antara perdesaan dan perkotaan tersebut dimana perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan, terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, Gambar 7.1 menunjukkan hal tersebut.

Tabel 7.3.
Konsumsi daging sapi/kapita/tahun rumah tangga perdesaan, perkotaan dan total konsumsi, tahun 2010-2016

Tahun	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)		
	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan + Perkotaan
2010	1,18	3,43	2,30
2011	1,35	3,48	2,43
2012	1,15	3,06	2,63
2013	1,11	3,10	2,14
2014*	1,26	3,13	2,34
2015*	1,29	3,24	2,31
2016*	1,32	3,11	2,27

*) Angka prediksi Pusdatin Kementan.
Sumber: Susenas BPS, diolah Pusdatin.

Pada Tabel 7.3 tampak bahwa angka konsumsi daging sapi/kapita/tahun cukup berfluktuasi dan menurun tajam pada tahun 2013. Pada tahun 2015 angka konsumsi daging sapi/kapita/tahun diprediksi mencapai 2,31 kg. Dilihat dari fluktuasi angka konsumsi yang cukup tajam, terdapat indikasi bahwa angka estimasi tersebut masih banyak kelemahan. Karena itu, metode estimasi dengan menggunakan data Susenas masih membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut.

7.2 Perhitungan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi UGM – Apfindo

Universitas Gajah Mada (UGM) dan Asosiasi Pengusaha Feedlotter Indonesia (APFINDO) menyajikan proyeksi konsumsi daging sapi/kapita/hari yang lebih progresif. Beberapa asumsi digunakan dalam perhitungan UGM-APFINDO, antara lain:

- Jumlah penduduk tahun 2014 adalah 251.490.091 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,43% per tahun.
- Estimasi rata-rata laju pertumbuhan populasi sapi dan kerbau 2,30% per tahun.
- Rataan laju pertumbuhan konsumsi daging sapi per kapita per tahun 6,1%
- Jumlah sapi betina dewasa 45% dari populasi (PSPK, 2011)
- Calf crop 60% (jantan : betina = 1 : 1)
- Persentase karkas 50% serta daging dan offal 45% dari bobot potong.

Dari pendekatan perhitungan yang digunakan UGM-APFINDO diperoleh prediksi ketersediaan dan konsumsi daging sapi seperti yang disajikan pada Tabel 7.4.

Tahun	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Selisih	Kontribusi produksi dalam negeri (%)
2014	435086.19	593516.62	-158.430,43	73,31
2015	446180.61	639857.57	-193.676,96	69,73
2016	457275.03	684884.27	-227.609,24	66,77
2017	468369.45	729910.96	-261.541,51	64,17
2018	479463.87	774937.66	-295.473,79	61,87
2019	490558.29	819964.36	-329.406,07	59,83
2020	501652.71	864991.05	-363.338,34	58,00
2021	512747.13	910017.75	-397.270,62	56,34
2022	523841.55	955044.45	-431.202,90	54,85
2023	534935.97	1000071.14	-465.135,17	53,49
2024	546030.39	1045097.84	-499.067,45	52,25

Tabel 7.4.

Proyeksi Produksi dan konsumsi daging sapi tahun 2014-2024

Sumber: Tim Peneliti UGM (2015)

Pada Tabel 7.4 terlihat bahwa kontribusi produksi daging sapi dalam negeri cenderung semakin menurun. Pola penurunan kontribusi produksi daging dalam negeri yang semakin besar lebih disebabkan asumsi pertumbuhan populasi yang sangat kecil, yaitu 2,30% per tahun. Hal ini kembali lagi mengingatkan bahwa upaya memacu laju pertumbuhan populasi sapi merupakan faktor kunci kesuksesan program swasembada daging sapi. Ke depan pemerintah harus lebih fokus kepada pengembangan industri perbibitan sapi potong.

7.3 Perhitungan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi di Kemenko Perekonomian

Variasi angka estimasi produksi dan konsumsi daging sapi nasional yang dikeluarkan oleh berbagai sumber sangat tinggi. Padahal angka-angka tersebut sangat penting untuk perumusan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pada bulan Agustus 2015 Kementerian Koordinator Perekonomian mengambil inisiatif untuk mengajak *stakeholders* untuk merumuskan bersama angka kesepakatan produksi dan konsumsi daging sapi nasional. Beberapa kesepakatan yang dicapai, adalah:

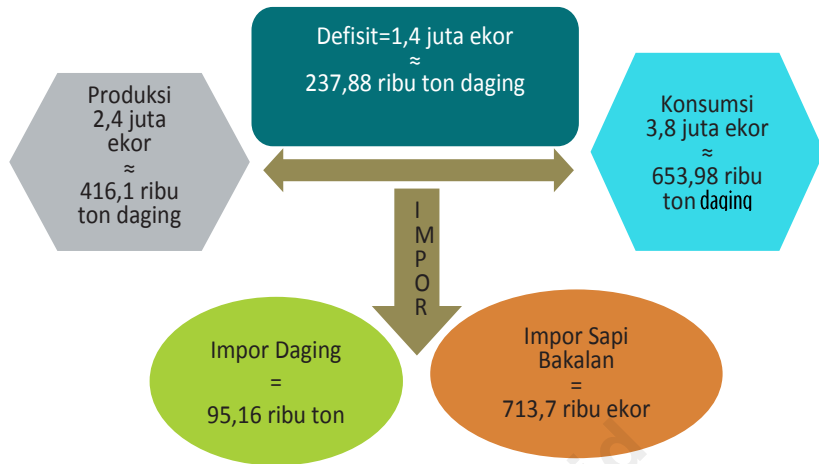
- a. Perhitungan produksi daging sapi dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung, yaitu dari perkiraan potensial stok dari populasi sapi potong.
- b. Data potensial stok: BPS 2,8 juta ekor; Kementan 2,4 juta ekor; Kemendag 2,0 juta ekor; dan Apfindo 2,3 juta ekor. Angka yang disepakati 2,4 juta ekor.
- c. Data kebutuhan/konsumsi daging sapi:

BPS: konsumsi daging sapi terkoreksi berasal dari: rumah tangga (Susenas) 0,36 kg/kapita/tahun; industri (survai IBS dan IMK) 0,08 kg/kapita/tahun; serta Horeka dan lainnya 2,12 kg/kapita/tahun. Dengan demikian total konsumsi daging sapi per kapita per tahun (tahun 2015) adalah 2,56 kg, setara dengan 3,8 juta ekor sapi atau 653,98 ribu ton daging.

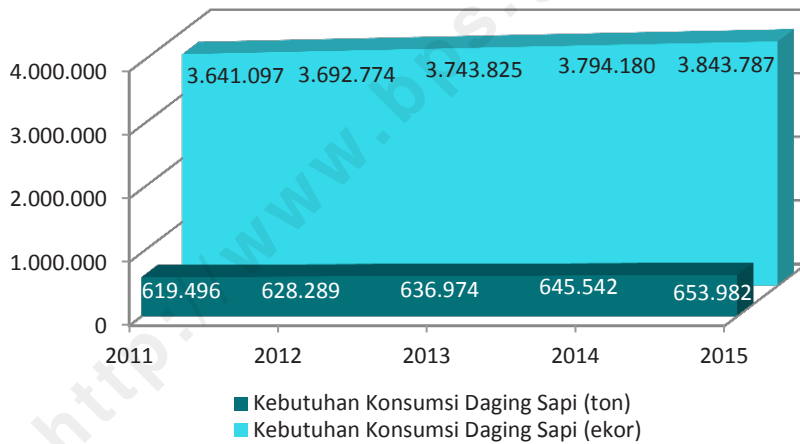
Kementan: konsumsi daging sapi 1,7 kg/kapita/tahun, setara dengan 2,7 juta ekor atau 454,70 ribu ton daging.

Kemendag: konsumsi daging sapi 2,0 kg/kapita/tahun, setara dengan 3 juta ekor atau 510,9 ribu ton daging.

Berdasarkan beberapa ketentuan perhitungan tersebut di atas, disepakati satu angka nasional terkait produksi dan konsumsi daging sapi tahun 2015 seperti dapat dilihat pada Gambar 7.2. Secara keseluruhan perhitungan konsumsi daging sapi dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 7.2. Pada Gambar 7.2 tampak bahwa jumlah defisit pada tahun 2015 sangat besar, yaitu 1,4 juta ekor sapi atau setara 237,88 ribu ton daging sapi. Kontribusi produksi dalam negeri berarti hanya 63,2% dari kebutuhan. Data ini kembali lagi mengingatkan semua pihak bahwa percepatan pengembangan agribisnis sapi potong sudah menjadi agenda nasional yang mendesak.



Gambar 7.2.
Kesepakatan angka produksi dan konsumsi daging sapi.



Gambar 7.3.
Kebutuhan daging sapi nasional 2011-2015

Sumber: data diolah dari sumber BPS, 2015; dengan asumsi:
 1. Total kebutuhan daging sapi dikonversi menjadi satuan ekor sapi dengan asumsi bobot 170.14 kg daging/1 ekor sapi (Ditjen PKH, 2014).
 2. Pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun periode 2000-2010 (1.43%/th), 2010 -2020 sebesar 1,40%/tahun (BPS Indonesia, 2015)

7.4 Perhitungan Berbasis Dinamika Populasi

Penawaran daging sapi sangat ditentukan oleh kemampuan produksi dan produktivitas sapi dan kerbau. Produktivitas sapi nasional sangat terkait dengan ketersediaan dan harga bibit, ketersediaan dan harga pakan (termasuk hijauan makan ternak/HMT), teknologi (genetika, pakan, dan logistik), air bersih, ketersediaan dan harga energi, serta regulasi yang kondusif (insentif, pasar, kredit, *sanitary standard*, *land ownership*, ketenagakerjaan, dan lingkungan).

Potensi produksi daging sapi nasional dapat diestimasi menggunakan pendekatan dinamika populasi. Pendekatan dinamika populasi dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan parameter mutasi ternak (BPS Indonesia, 2014^d). Definisi operasional parameter dalam survei ini adalah proporsi setiap komponen mutasi ternak terhadap stok awal ternak yang dipelihara di rumah tangga selama setahun yang lalu. Dinamika Populasi ternak pada tingkat rumah tangga dapat diestimasi berdasarkan informasi pergerakan mutasi ternak selama setahun. Formula penentuan estimasi populasi ternak yang diusahakan rumah tangga dapat dihitung melalui pergerakan mutasi ternak selama satu tahun, sebagai berikut:

$$P_t = P_0(1 - Sl - Am - Dt - Rd + By + Br + Ad)$$

(Sumber: BPS Indonesia, 2014^d)

Keterangan:

P_t	= Populasi ternak tahun ke-(t+1)
P_0	= Populasi ternak tahun ke-t (populasi ternak stok awal)
Sl	= Parameter penjualan
Am	= Parameter pemotongan
Dt	= Parameter kematian
Rd	= Parameter pengurangan lain
By	= Parameter pembelian
Br	= Parameter kelahiran
Ad	= Parameter penambahan lain.

Kondisi mutasi ternak sapi potong nasional tahun 2014 disajikan oleh Tabel 7.5.

Tabel 7.5.

Persentase Mutasi Sapi Potong terhadap Stok Awal Nasional, 2014

Penjualan (Sl)	Pemotongan (Am)	Kematian (Dt)	Pengurangan lain (Rd)	Pembelian (By)	Kelahiran (Br)	Penambahan lain (Ad)
17.14	1.04	3.69	1.27	4.68	25.92	0.47

Sumber: BPS Indonesia, 2014^d

Data yang digunakan dalam melakukan estimasi *supply and demand* bersumber dari:

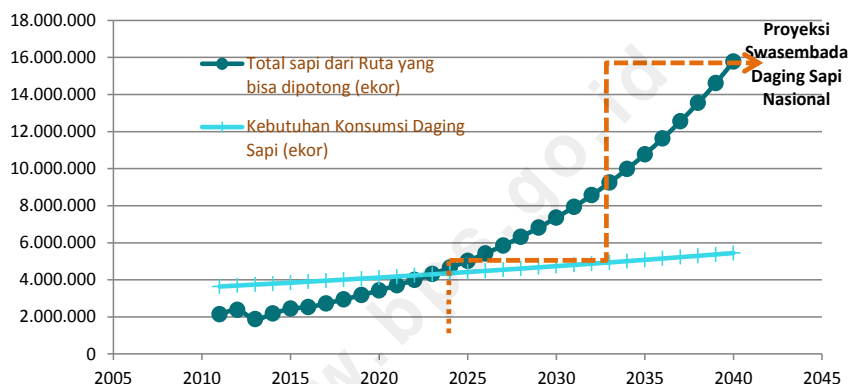
1. Sensus Pertanian 2013
2. Laporan Triwulanan Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan (RPH/TPH) (Statistik Pemotongan Ternak, 2014)
3. Survei Peternakan Nasional (SPN) 2008
4. Survei Estimasi Parameter Mutasi Ternak (EPT)2013
5. Survei Konsumsi Bahan Pokok (Susenas, 2013)
6. Statistik Indonesia, 2015
7. PSPK, 2011.
8. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), 2014 (Rata-rata meat yield per ternak adalah 170,14 Kg).

Adapun batasan dalam perhitungan ini adalah tidak melakukan disagregasi wilayah yang sebenarnya cenderung heterogen. Estimasi populasi sapi potong belum didisagregasikan berdasarkan wilayah dan sistem pemeliharaan yang berbeda, dalam hal ini intensif untuk Pulau Jawa, Bali dan Lampung dan semi intensif untuk daerah daerah lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk melihat perilaku perilaku penawaran dari peternakan domestik yang terdiri dari peternakan rakyat dan industri peternakan rakyat. Jika dilakukan disagregasi pola perusahaan, maka disagregasi wilayah tidak dapat dilakukan, karena keterbatasan data. Ketersediaan data tahunan jumlah sapi yang dipelihara oleh industri peternakan tingkat wilayah sulit ditelusuri, yang ada hanya tingkat nasional. Seandainya pun akan ditelusuri, jumlah sapi yang diproduksi atau ditawarkan oleh suatu wilayah belum tentu dikonsumsi oleh wilayah yang sama. Berdasarkan hasil proyeksi populasi, gambaran perkembangan populasi sapi nasional dapat diperoleh sampai tahun 2040 seperti terlihat pada Gambar 7.4.

Sementara itu proyeksi permintaan daging sapi didekati dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan konsumsi rata-rata daging sapi per kapita nasional. Asumsi pertumbuhan penduduk dan jumlah konsumsi daging sapi per kapita per tahun menggunakan angka kesepakatan pada pertemuan Rakortas BPS dengan stakeholders peternakan pada tanggal 27 Agustus 2015 dan Rakornis Lanjutan pada tanggal 31 Agustus 2015. Pertumbuhan penduduk dihitung dengan asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1.14% per tahun. Angka konsumsi daging sapi sebesar 3,09 kg per kapita per tahun.

Berdasarkan rumus-rumus tersebut, data proyeksi produksi dan konsumsi daging sapi diperoleh seperti disajikan pada Gambar 7.4.

Gambar 7.4.
Proyeksi produksi dan konsumsi serta tercapainya swasembada daging sapi nasional



Sumber: data diolah dari berbagai sumber

*) data populasi 2011 dan 2013 merupakan angka resmi dari BPS, hasil PSPK2011 dan ST2013

Asumsi perhitungan:

1. Proporsi populasi sapi jantan dan sapi betina menggunakan hasil PSPK 2011 (33:77%); Sapi siap potong jantan dewasa (30,81%), betina afkir (10,56%)
2. Estimasi jumlah populasi menggunakan formula $P_t = P_0 (1 - SI - Am - Dt - Rd + By + Br + Ad)$
3. Konsumsi daging sapi per kapita penduduk menggunakan kesepakatan nasional sebesar 2,56 kg/kap/tahun (Rakortas pada tanggal 27 Agustus 2015 dan Rakornis Lanjutan pada tanggal 31 Agustus 2015). Total kebutuhan daging sapi dikonversi menjadi satuan ekor sapi dengan asumsi bobot 170.14 kg daging/ekor sapi.
4. Pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun periode 2000-2010 (1.43%/th), 2010-2020 sebesar 1,40%/tahun
5. Jantan siap potong diasumsikan sebesar 30,8% dari populasi sapi jantan. Proporsi sapi jantan sebesar 33% dari total populasi sapi Rusa. Betina siap potong adalah betina afkir, diasumsikan sebesar 10,56% dari populasi sapi betina. Proporsi sapi betina sebesar 77% dari total populasi sapi Rusa.

Berdasarkan proyeksi produksi dan kebutuhan daging sapi nasional, kondisi pencapaian keseimbangan antara produksi dan kebutuhan akan terwujud pada tahun 2023. Hal ini dimungkinkan dengan asumsi proyeksi populasi sapi, dan ketersediaan sapi siap potong berada pada kondisi asumsi-asumsi tersebut di atas. Masalah teknis di lapangan yang sangat mungkin terjadi adalah bahwa kepastian jumlah sapi siap potong belum tentu menjadi sapi yang benar-benar dipotong. Keberadaan sapi bagi rumah tangga peternakan seringkali ditujukan untuk ketersediaan dana cepat bagi rumah tangga. Sapi berfungsi sebagai alat transaksi yang paling cepat dicairkan pada saat rumah tangga memerlukan dana mendesak. Begitupun, pada situasi petani memiliki sejumlah dana yang cukup, pilihan membeli sapi sebagai tabungan banyak dilakukan. Kondisi ini, lebih lanjut menyebabkan perputaran sapi di kalangan rumah tangga, cukup tinggi. Akibatnya, sapi dengan kualifikasi siap potong belum pasti dapat dimobilisasi sebagai sapi potong.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ardiyati (2011) tentang perilaku penawaran daging sapi nasional. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi daging sapi dalam negeri adalah populasi ternak dan jumlah feedloter. Perubahan harga daging sapi, produksi peternakan rakyat dan lag dari produksi daging sapi memiliki tanda parameter dugaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, nilai parameter dugaan yang negatif pada harga daging sapi dalam negeri terjawab dengan adanya perilaku di kalangan peternak yang apabila merasa belum memperoleh keuntungan wajar yang harus mereka terima akibat adanya selisih harga daging dan harga ternak, maka peternak akan mengurangi penawaran sapi ke pasar. Kondisi ini merupakan dampak dari tidak berimbangannya margin keuntungan yang dinikmati oleh pedagang mulai dari tingkat desa/*blantik* sampai bandar/*jagal* di kota. Untuk mengatasi masalah ini perlu keberadaan pusat informasi harga yang akurat, sehingga kenaikan harga dapat dinikmati peternak sapi secara wajar.

Peningkatan produktivitas sapi pada tingkat *on farm* (rumah tangga) peternak penting dilakukan dengan konsep *integrated farming* melalui *scaling up* secara komunitas. Rumah tangga peternakan sapi potong memegang peran sangat penting dalam memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Populasi sapi nasional yang berada pada level rumah tangga mencapai 93%. Rumah tangga peternak merupakan entitas utama yang menjadi fokus pengembangan populasi ternak sapi. Penguatan rumah tangga peternak hanya dapat dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien melalui jejaring kelompok peternak rakyat. Melalui kelembagaan kelompok peternak secara bersama akan dapat meningkatkan akses teknologi dan modal. Penguatan kelompok peternak menjadi pintu awal mewujudnya agribisnis sapi potong yang kuat pada level perdesaan. Selanjutnya akan menjadi cikal bakal pengembangan komoditas unggulan di suatu wilayah.

Pada sisi lain, sebagian sapi siap potong berada di tangan pedagang besar sapi. Pada tingkatan pedagang sapi skala kecil dan sedang, keterbatasan dana akan membantu mempercepat mobilisasi sapi siap potong. Namun, bagi pedagang sapi yang memiliki modal cukup besar akan memiliki kapasitas dalam mengatur jumlah sapi siap potong. Diperlukan pengendalian jumlah ketersediaan sapi potong yang melibatkan segenap *stakeholders*, baik asosiasi pedagang sapi, *feedloter*, hingga RPH secara sistematis untuk memastikan jumlah sapi siap potong dapat terealisasi menjadi daging sapi.

Selain itu, pemerintah penting melakukan komunikasi yang konstruktif dengan pelaku usaha peternakan. Pelaku usaha penggemukan (*Feedloter*), importer, trader, dan asosiasi peternak sapi, serta pemerintah harus bersatu membangun konsesus penguatan produksi sapi nasional. Hal tersebut tentu tidak sederhana. Pemerintah memegang peran sentral sebagai regulator untuk terus membangun dan mewujudkan kemandirian produksi dalam negeri. Pentingnya menyusun *road map* yang jelas dan terukur pada masa depan melalui konsensus yang mengikat masing-masing pelaku usaha peternakan secara nasional dengan memberikan ruang kontribusi kepada secara signifikan.

Berdasarkan populasi sapi nasional yang ada pada tahun 2010 sampai dengan 2014 (Dit. PKH, 2014; PSPK 2011) dapat dihitung jumlah populasi yang siap dipotong, selanjutnya dapat dibandingkan dengan jumlah sapi yang dipotong, seperti yang terlihat pada Tabel 7.6.

Tabel 7.6.
Perbandingan jumlah sapi nasional yang siap dipotong tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah sapi yang siap dipotong (ekor)	Jumlah sapi yang dipotong (ekor)	Persentase pemotongan (%)
2010	2.145.420	1.324.154	61,72
2011	2.375.130	1.519.178	63,96
2012	1.879.701	1.421.319	75,61
2013	2.177.887	1.326.395	60,90
2014	2.445.577	1.088.140	44,49

Sumber data: Disnakkeswan (2014) dan BPS (2011)

Dari Tabel 7.6. terlihat bahwa dari jumlah sapi yang siap dipotong ternyata hanya berjumlah sekitar 60 persen yang benar-benar dipotong. Hal tersebut menunjukkan beberapa hal: (a) sapi yang ada pada rumah tangga peternakan tidak seluruhnya siap untuk dipotong, hal ini terjadi karena pada sebagian besar rumah tangga sapi potong bukan usaha komersial melainkan usaha sambilan dan sapi yang dimiliki lebih dianggap sebagai investasi, (b) data jumlah pemotongan sapi kurang akurat, banyak pemotongan sapi yang tidak tercatat.



8

**Percepatan
Pengembangan
Sapi Rakyat**

BAB 8

Percepatan Pengembangan Sapi Rakyat

“Pengembangan usaha pembibitan sapi di Indonesia harus digalakkan untuk meningkatkan populasi sapi dalam jangka panjang.”



8.1 Mutu SDM, Kelembagaan, dan Regulasi

a. Peningkatan Mutu SDM

Kapasitas SDM pelaku usaha serta kualitas dan integritas SDM aparatur sangat menentukan kinerja pembangunan usaha peternakan sapi potong. Kebijakan pembangunan usaha peternakan sapi potong ke depan harus memberi prioritas tinggi kepada peningkatan mutu dan kinerja SDM. Peningkatan mutu SDM peternak sapi potong dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan lapang. Peningkatan mutu dan kinerja SDM aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan berjenjang, studi lanjut, studi banding, dan lain-lain. Dukungan SDM yang berkualitas secara langsung akan meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan dan kinerja agribisnis sapi potong.

b. Penguatan Kelembagaan Peternak

Sejak 20 tahun terakhir berkembang pesat pendekatan ekonomi kelembagaan dalam pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan peternak (kelompok peternak, gapoktan, dan koperasi peternak) sapi potong sangat strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing agribisnis. Melalui kelompok peternak sapi potong dapat dibangun aksi kolektif yang memungkinkan terwujudnya sinergi dan tercapainya skala bisnis yang lebih layak.

Selain itu, kerjasama kemitraan harus terus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan inti – plasma dalam agribisnis (termasuk pengadaan sarana produksi, budidaya, pascapanen, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil). Kerjasama kemitraan agribisnis sangat diperlukan untuk membangun sistem agribisnis yang efisien.

c. Kebijakan dan Regulasi

Pada situasi kompetisi global yang semakin ketat, peran kebijakan dan regulasi sangat menentukan kemampuan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha merumuskan kebijakan dan menetapkan regulasi yang mampu mendorong tumbuhnya agribisnis peternakan sapi potong yang berdaya saing. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan hendaknya meningkatkan motivasi dan keyakinan pengusaha untuk meningkatkan kinerja agribisnisnya. Rangkaian kebijakan dan regulasi sangat diperlukan untuk mendorong pematangan sub sistem input produksi, efisiensi proses produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil.

Kebijakan dan regulasi diperlukan untuk mendukung pengembangan agribisnis sapi potong. Formulasi kebijakan juga harus disusun berdasarkan kajian lapang yang komprehensif, sehingga mudah diimplementasikan di lapang. Selama ini, kebijakan dan regulasi belum memadai dari sisi jumlah dan juga belum efektif dari sisi implementasi. Ke depan dukungan kebijakan dan regulasi harus ditangani dengan cermat untuk mengurangi berbagai distorsi yang terjadi pada setiap subsistem agribisnis (saprodi, budidaya, pascapanen/pengolahan, dan pemasaran hasil).

8.2 Akselerasi Peningkatan Populasi Sapi

Swasembada daging sapi merupakan permasalahan multi dimensi dan sangat dinamis, karena memiliki keterkaitan yang luas dengan banyak aspek. Namun, salah satu inti persoalan swasembada daging sapi di Indonesia adalah pada ukuran populasi sapi nasional yang sangat kecil. Total populasi sapi potong sebanyak 14.824.373 ekor pada tahun 2011 merupakan jumlah yang sangat kecil untuk negara besar seperti Indonesia. Peningkatan jumlah populasi sapi potong secara regular yang selama ini yang hanya berkisar 2 – 4% per tahun sangat sulit untuk mengejar laju peningkatan pertumbuhan konsumsi daging sapi nasional.

Percepatan peningkatan populasi sapi potong nasional merupakan prasyarat mutlak menuju swasembada daging. Mencermati bahwa 97.97% sapi potong berada di rumah tangga usaha peternakan maka basis upaya percepatan peningkatan populasi sapi potong harus bertumpu kepada usaha peternakan sapi potong rakyat. Beberapa hal berikut perlu menjadi prioritas dalam percepatan peningkatan populasi sapi potong:

Peningkatan Jumlah dan Mutu Bibit Sapi Potong

Seperti diketahui bahwa bibit adalah *core* bisnis pertanian. Suatu usaha pertanian berpeluang besar memenangkan pasar jika pada kegiatan produksinya menggunakan bibit atau benih yang unggul. Karena itu pula, negara-negara yang sukses dalam pembangunan pertaniannya biasanya meletakkan pengembangan bibit bermutu sebagai prioritas utama, yang diwujudkan dalam bentuk investasi pembangunan yang besar.

Perbibitan merupakan komponen penting dalam program peningkatan populasi ternak sapi potong. Aspek perbibitan dan reproduksi ternak harus dibangun lebih cepat untuk meningkatkan populasi sapi potong. Pembangunan aspek perbibitan mencakup kebijakan perbibitan, pemuliaan ternak (seleksi dan persilangan), inovasi teknologi reproduksi, serta pengadaan dan penyebaran bibit ternak unggul.

Selama ini kegiatan perbibitan sapi potong di Indonesia lebih bertumpu kepada produksi rumah tangga usaha peternakan (RTUP). Padahal RTUP diketahui memiliki skala usaha kecil, yaitu sekitar 2 – 3 ekor (BPS ST2013-STU) dengan praktik budidaya ternak yang kurang profesional. Profil usaha seperti itu, sulit diharapkan untuk menyediakan sapi bakalan yang berkualitas dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha penggemukan sapi. Akibatnya agribisnis sapi potong di Indonesia selalu mengalami kesulitan dalam memperoleh sapi bakalan, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Pengembangan usaha perbibitan ternak di Indonesia harus segera dipercepat. Merujuk kepada data ST2013 (Tabel 8.1), jumlah perusahaan peternakan yang bergerak pada usaha perbibitan sapi potong di seluruh Indonesia tahun 2013 hanya 34 perusahaan. Pada sisi lain, jumlah perusahaan peternakan yang berberak pada usaha penggemukan sapi potong mencapai 109 perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa investor swasta lebih tertarik berinvestasi pada usaha penggemukan sapi dari pada usaha perbibitan sapi. Kondisi ini tidak kondusif untuk meningkatkan populasi sapi, bahkan dalam jangka panjang secara perlahan dapat menguras populasi sapi nasional.

Provinsi	Usaha perbibitan		Usaha penggemukan	
	Sapi potong	Ternak lainnya	Sapi potong	Ternak lainnya
Sumatera Utara	2	1	7	6
Sumatera Barat	3	-	3	1
Riau	1	1	-	-
Bengkulu	1	-	2	-
Lampung	4	-	10	-
Jawa Barat	9	1	37	3
Jawa Tengah	3	-	15	6
Yogyakarta	-	-	1	1
Jawa Timur	1	-	3	9
Banten	4	-	10	-
Bali	-	-	-	2
Nusa Tenggara Barat	1	-	5	-
Nusa Tenggara Timur	2	-	2	2
Kalimantan Barat	-	1	-	1
Kalimantan Selatan	-	-	3	-
Sulawesi Utara	-	1	-	2
Sulawesi Selatan	1	-	7	-
Sulawesi Tenggara	1	-	2	-
Lainnya	1	-	2	1
Jumlah	34	5	109	34

Tabel 8.1.
Jumlah perusahaan di bidang perbibitan dan penggemukan sapi potong tahun 2013

Sumber: BPS, Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 2013 (2014⁴)

Untuk mendorong tumbuhnya usaha perbibitan sapi potong diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pengembangan industri perbibitan sapi potong. Insentif khusus perlu segera dirancang untuk menarik banyak investor masuk ke industri perbibitan sapi potong. Insentif khusus untuk mendorong tumbuhnya industri perbibitan sapi potong antara lain dapat meliputi aspek berikut, yaitu: perizinan usaha, skema kredit lunak berjangka panjang, keringanan pajak, penetapan kawasan sentra perbibitan, infrastruktur pendukung termasuk pos kesehatan hewan, balai inseminasi buatan, dan lain-lain.

Peningkatan jumlah dan mutu bibit sapi potong hendaknya lebih memilih menggunakan sumber daya genetik sapi lokal, termasuk Sapi Bali, Sapi Peranakan Ongol (PO), Sapi Sumba Ongol (SO), Sapi Madura, Sapi Pesisir, dan Sapi Aceh. Program tersebut harus dirancang berjangka panjang dengan menggunakan sistem persilangan dan seleksi (*breeding*) yang ketat, sehingga dapat dijaring bibit ternak sapi potong unggul lokal. Dengan mutu pakan yang baik, bibit unggul sapi potong lokal akan mampu bersaing dengan sapi bakalan impor, yang saat ini lebih digemari oleh perusahaan penggemukan besar.

a. Peningkatan Program Reproduksi Ternak

Aspek reproduksi ternak merupakan faktor kunci suksesnya program peningkatan populasi ternak sapi potong. Reproduksi sapi potong dilakukan melalui kawin alam dan inseminasi buatan (IB). Reproduksi melalui kawin alam dan/atau inseminasi buatan sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya mengembangkan infrastruktur inseminasi buatan dan menambah tenaga inseminator.

Peningkatan program reproduksi ternak berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah kelahiran. Program peningkatan reproduksi ternak sapi potong harus terus diperluas secara bertahap menuju kondisi ideal satu induk menghasilkan satu anak dalam satu tahun. Penambahan jumlah pejantan unggul menuju rasio ideal 1 jantan : 10 betina produktif serta intensifikasi program inseminasi buatan menggunakan semen berkualitas harus dicapai, sehingga tidak ada sapi betina yang tertunda kawin atau beranak.

Pengembangan reproduksi dengan IB terbukti efektif dan ampuh untuk mengatasi kendala sebaran wilayah yang luas. Terkait dengan pendekatan ini, data penyebaran *straw* sapi di provinsi/kabupaten/kota dapat menggambarkan aktivitas IB di daerah tersebut. Untuk meningkatkan keberhasilan program IB maka di provinsi/kabupaten/kota setiap tahun harus diprogramkan pelatihan kepada para tenaga inseminator dan penyediaan anggaran yang diperlukan.

b. Pengendalian Laju Pemotongan Ternak Sapi

Dalam situasi populasi ternak sapi potong nasional yang masih sangat kecil, yaitu hanya 14.824.373 ekor pada tahun 2011, maka pengendalian laju pemotongan ternak lokal adalah sesuatu yang sangat strategis. Pemotongan ternak lokal harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga tidak mengganggu program peningkatan populasi. Lebih-lebih ternak betina produktif, yang menjadi basis peningkatan jumlah kelahiran anak sapi. Kebijakan impor sapi dapat menjadi pilihan yang bijaksana apabila dilakukan dalam kerangka melindungi populasi sapi nasional. Sesungguhnya laju pemotongan ternak lokal dapat dikurangi dengan meningkatkan bobot potong sapi hasil penggemukan, sehingga produksi daging per ekor sapi dapat lebih tinggi.

Penyelamatan sapi betina produktif harus menjadi program prioritas, karena sapi ini merupakan wujud industri biologis penghasil anak sapi (pedet). Perangkat hukum untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif sudah tersedia, namun pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Ke depan hal ini harus diawasi dengan ketat.

c. Pengelolaan Kesehatan Ternak

Sejak semakin maraknya kasus penyakit ternak yang berimplikasi luas kepada produksi ternak dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), kesehatan hewan (keswan) dan kesmavet menjadi isu strategis dunia. Pengembangan agribisnis peternakan sapi potong harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keswan dan kesmavet. Program pengelolaan keswan dan kesmavet harus berhasil mendorong peningkatan produktivitas ternak, mewujudkan produk ternak yang ASUH, dan menghindari penyebaran penyakit zoonosis. Dalam kaitan ini, upaya deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan pemberantasan penyakit ternak harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan kesehatan ternak merupakan aspek yang sangat strategis untuk memacu pertumbuhan populasi ternak sapi potong. Data rumah tangga usaha peternakan memperlihatkan bahwa kejadian penyakit kembung perut (*bloat*) cukup dominan pada kasus-kasus penyakit yang menyerang ternak sapi potong. Kasus penyakit kembung perut sering berakhir dengan kematian, sehingga secara langsung menghambat pertumbuhan populasi ternak. Selain itu, penyakit cacingan merupakan jenis penyakit yang juga dominan. Penyakit cacingan tidak langsung berpengaruh terhadap populasi, tetapi berpengaruh langsung terhadap bobot potong sapi.

8.3 Peningkatan Produktivitas Sapi Potong

Peningkatan produktivitas sapi potong merupakan upaya penting lain yang terkait langsung dengan swasembada daging sapi. Sapi potong lokal yang dihasilkan oleh rumah tangga usaha peternakan memiliki bobot hidup yang relatif kecil menjelang dipotong. Selain karena rendahnya mutu genetik, bobot potong yang rendah tersebut dipengaruhi oleh mutu pakan, cekaman lingkungan, penyakit parasit, dan lain-lain.

a. Peningkatan Mutu Pakan

Produksi ternak sapi potong sangat dipengaruhi oleh masukan zat-zat nutrisi melalui pakan. Kontribusi pakan bahkan dapat mencapai 70% dari biaya produksi sapi potong. Peningkatan mutu pakan dan ransum sangat strategis untuk mendorong peningkatan kinerja agribisnis sapi potong. Aspek pengelolaan pakan yang strategis untuk dikembangkan mencakup inovasi teknologi produksi hijauan pakan, teknologi pemanfaatan biomasa hasil sisa usaha pertanian dan agroindustri, teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan, dan formulasi ransum berkualitas berbasis sumberdaya lokal, dan lain-lain.

Permasalahan pakan ternak sapi potong pada level rumah tangga usaha peternakan yang perlu dicermati dengan serius adalah kecukupan energi dan protein untuk menunjang produksi dan reproduksi ternak. Berbagai temuan hasil riset teknologi pakan dan optimasi fermentasi rumen harus terus didorong implementasinya pada usaha peternakan sapi potong rakyat. Hal tersebut menjadi semakin penting karena semakin unggul jenis ternak maka tuntutan akan kecukupan pasokan nutrisi semakin tinggi.

Selain itu, pemerintah perlu memperbanyak bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk pengolahan dan pengawetan pakan ternak sapi potong. Kekurangan alsintan menyebabkan peternak tidak mampu menggunakan sumber daya hijauan pakan atau jerami padi untuk disimpan sebagai silase, sehingga kelangkaan pakan pada musim kemarau selalu menjadi permasalahan yang berulang setiap tahun. Kehadiran mesin pencacah rumput (*chopper*) akan sangat membantu petani dalam membuat silase.

b. Inovasi Teknologi Budidaya

Teknologi budidaya ternak terus berkembang, termasuk perhatian publik terhadap aspek kesejahteraan ternak. Aspek budidaya ternak juga sangat strategis untuk diperhatikan guna peningkatan kinerja agribisnis sapi potong. Pembangunan aspek budidaya ternak mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan rancangan kandang ternak yang nyaman, pengelolaan ransum, pemanfaatan limbah kandang, pengendalian penyakit ternak, dan lain-lain.

Pengaruh cekaman panas pada ternak di lingkungan tropis harus menjadi perhatian serius, karena dapat mengakibatkan pemborosan penggunaan energi yang berasal dari pakan. Pada kondisi cekaman panas (*heat stress*) maka sebagian energi asal pakan akan digunakan ternak untuk menetralkan pengaruh cekaman panas.

8.4. Pembiayaan Usaha Ternak Sapi Potong

Sumber pembiayaan merupakan aspek lain yang sangat menentukan kinerja suatu usaha peternakan sapi potong. Kelemahan yang ada saat ini adalah bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan populasi dan produksi ternak terlalu bertumpu pada sumber pembiayaan dari pemerintah. Untuk masa yang akan datang, sumber pembiayaan non-pemerintah perlu dipacu untuk mendukung pembangunan usaha peternakan sapi potong. Pengembangan pola kemitraan usaha dan pengucuran modal pinjaman dari bank melalui pola kredit yang disalurkan oleh bank BUMN dan swasta harus terus didorong.

Pembiayaan usaha peternakan merupakan aspek strategis yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan peternakan sapi potong. Selama ini pembiayaan usaha masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi peternak sapi potong. Dengan demikian, pengembangan skema kredit pembiayaan usaha peternakan sapi potong harus dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif lembaga keuangan. Skema kredit yang dikembangkan hendaknya terdapat subsidi bunga, prosedur administrasi yang sederhana, dan waktu proses yang singkat. Skema subsidi hendaknya dialihkan dari subsidi saprodi (sarana produksi) menuju subsidi bunga bank. Asuransi kredit khusus untuk usaha peternakan sapi potong juga perlu dikembangkan.

8.5. Peningkatan Jasa Layanan Pendukung Agribisnis Sapi

a. Pemasaran Hasil

Hasil beberapa kajian dan pengamatan lapang memperlihatkan bahwa aspek pemasaran merupakan masalah besar yang dihadapi peternak sapi potong. Penanganan aspek pemasaran ternak sapi potong sungguh sangat strategis. Dalam rantai tataniaga sapi potong yang ada saat ini, posisi peternak rakyat sangat lemah dan peran belantik sapi sangat kuat. Masih dengan mudah dijumpai transaksi penjualan ternak sapi potong tidak menggunakan timbangan bobot tubuh, tetapi menggunakan metode taksiran terhadap postur tubuh ternak sapi. Kebijakan dan regulasi dalam pembangunan peternakan hendaknya secara langsung menimbulkan kepercayaan peternak/publik terhadap pemasaran produk. Penanganan masalah pemasaran produk mencakup kelayakan harga, jaminan sertifikasi produk, dan lain-lain.

b. Penyuluhan Pertanian

Kinerja penyuluhan pertanian di Indonesia cenderung semakin menurun sejak era reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh makin terbatasnya jumlah penyuluh dan makin menurunnya kapasitas penyuluh yang ada. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi program penyuluhan pertanian. Keterbatasan tenaga penyuluh sesungguhnya dapat diatasi dengan mengembangkan *cyber extension*. Namun, *cyber extension* masih menghadapi kendala karena infrastruktur ICT di daerah terpencil belum mendukung.

Daftar Pustaka

Abidin, Z. 2007. Kesejahteraan Petani dalam Sistem Agribisnis: Suatu Telaah Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia. Dalam: Mungkinkah Petani Sejahtera? Konperensi Nasional ke XV Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, 3—4 Agustus 2007. Surakarta

Ardiyati, Alisa. (2011). Penawaran Daging Sapi Di Indonesia (Analisis Proyeksi Swasembada Daging Sapi 2014). Tesis. FE Universitas Indonesia

Badan Pusat Statistik. 2015^a. Sensus Pertanian 2013: Angka Nasional Hasil Survei ST2013-Subsektor Rumah Tangga Usaha Peternakan 2014. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2015^b. Statistik Indonesia 2015. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014^a. Sensus Pertanian 2013: Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014^b. Sensus Pertanian 2013: Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014^c. Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014^d. Parameter Mutasi Ternak 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2013^a. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2013^b. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2013^c. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan provinsi 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2011. Pendataan Sapi Perah, Sapi Potong, dan Kerbau 2011. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Dahri dan Parulian Hutagaol. 2014. Peningkatan aksesibilitas terhadap kredit program KKPE menuju pemberdayaan petani: Kasus peternak di Boyolali, Jawa Tengah. Prosiding Konferensi Nasional XVII dan Kongres XVI Tahun 2014 Perhimpunan Ekonomi Pertanian

Indonesia (PERHEPI). IPB Convention Center, Bogor. 28—29 Agustus 2014. Hal 563—578

Dwiyanto, K. 2008. Pemanfaatan sumber daya lokal dan inovasi teknologi dalam mendukung pengembangan sapi potong di Indonesia. *Pengembangan Inovasi Pertanian*. 1(3): 173-188.

Hasyim, A. I. 2012. *Tataniaga Pertanian*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Ekowati, T. 2012. Analisis Usaha Ternak Sapi Potong dan Optimalisasi Usaha Peternakan Berbasis Sistem Agribisnis di Jawa Tengah. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.

Emhar, A., J.M.M. Aji, T. Agustina. Analisis Rantai Pasokan Daging Sapi Di Kabupaten Jember. *Berkala Ilmiah PERTANIAN Volume 1 Nomor 3, Februari 2014*, hlm 53-61.

Ensminger, M.E., J.E. Oldfield, and W.W. Heinemann. 1990. *Feed and Nutrition*. Sec. Ed. The Ensminger Publishing Company. California.

Erwanto, W.A. Zakaria, and M. Prayuwidayati. 2011. The Use of Ammoniated Zeolite to Improve Rumen Metabolism in Ruminant. *Animal Production* 13(3):138-142

FGD. 2014. Road Map Pengembangan Industri Sapi Potong di Indonesia. Kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan APFINDO.

Harmini, R.W. Asmarantaka, dan J. Atmakusuma. 2011. Model dinamis ketersediaan daging sapi nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12 No. 1: 128-146.

Ilham, N. 2009. Kebijakan pengendalian harga daging sapi nasional. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 7 No. 3. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian

Indriani, Y. 2013. *Gizi dan Pangan*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandar Lampung.

Lubis, Adrian Darmawan dan Amzul Rifin. 2014. Indonesia memerlukan impor bakalan sapi bukan impor daging sapi. *Prosiding Konferensi Nasional XVII dan Kongres XVI Tahun 2014 Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)*. IPB Convention Center, Bogor. 28—29 Agustus 2014. Hal 275-288

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014.

Priyanti, A., IGAP Mahendri, dan U. Kusnadi. 2011. *Dinamika Produksi Daging Sapi Di Wilayah Sentra Usaha Sapi Potong Di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor. Hlm 573-589.

Rosiana, Nia dan Feryanto. 2014. *Evaluasi kebijakan swasembada sapi potong di Indonesia*. Prosiding Konferensi Nasional XVII dan Kongres XVI Tahun 2014 Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). IPB Convention Center, Bogor. 28—29 Agustus 2014. Hal 219-227.

Soejosopoetro, B. 2011. *Studi tentang pemotongan sapi betina produktif di RPH Malang*. J. Ternak Tropika Vol. 12, No. 1: 22-26.

Tawaf, R. dan H. Arief. 2011. *Strategi pendekatan ketersediaan daging nasional di Indonesia*. Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan III. Fak. Peternakan Unpad. 2 Nopember 2011.

Saragih, B. 1998. *Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian (Kumpulan Pemikiran)*. Percetakan CV. Nasional. Jakarta. 286 hlm.

Sodiq, A. dan M. Budiono. 2012. *Produktivitas Sapi Potong Pada Kelompok Tani Ternak Di Perdesaan*. Jurnal Agripet Volume 12 No 1. hlm 28-33.

Soedjana, T.D., U. Bamualim, U. Umiyasih, dan A. Semali. 1995. *Studi transportasi ernak potong dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur ke Jakarta*. Jurnal Penelitian No. 2. Puslitbang Peternakan. Badan Litbang Pertanian.

Soekartawi. 2000. *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudono, A., P.S. Hardjosworo, dan H.M. Eidman. 1989. *Peranan bahan Makanan Hewani Guna Mencapai Kecukupan Gizi*. Makalah Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1988. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Tim Peneliti UGM. 2015. *Roadmap Pengembangan Industri Sapi di Indonesia*. Kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan APFINDO. UGM. Yogyakarta.

Winarso, B. 2014. *Peran angkutan laut dalam meningkatkan distribusi ternak sapi potong dari daerah produsen ke wilayah konsumen*. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 14(2):83-96.

Proyeksi Penduduk 2010-2035 diakses melalui www.bps.go.id



The background is a vibrant teal color with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue and green. A prominent white graphic element consists of a thick white line that curves from the bottom left towards the top right, ending in a solid white circle. The word "Lampiran" is written in a clean, white, sans-serif font, centered horizontally and positioned below the white circle.

Lampiran

Lampiran 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan menurut Provinsi dan Status Pengelolaan

	Milik Sendiri	Bagi Hasil	Menerima Upah	Milik Sendiri dan Bagi hasil	Milik Sendiri dan Menerima Upah	Bagi Hasil dan Menerima Upah	Milik Sendiri, Bagi Hasil dan Menerima Upah
Aceh	200.986	56.154	486	11.722	156	126	35
Sumatera Utara	496.970	37.895	1.196	11.971	650	146	327
Sumatera Barat	216.695	79.646	375	9.526	39	27	195
Riau	110.651	13.399	452	2.851	87	36	15
Jambi	98.194	14.295	483	3.182	84	18	3
Sumatera Selatan	180.077	21.660	875	3.418	112	44	27
Bengkulu	61.283	15.057	115	2.957	23	11	1
Lampung	472.952	94.638	578	29.704	193	88	43
Kep. Bangka Belitung	14.636	236	45	41	6	1	1
Kep. Riau	20.114	1.594	96	692	12	1	13
DKI Jakarta	3.449	191	32	16	2	2	
Jawa Barat	1.042.848	135.232	6.064	52.615	1.032	334	378
Jawa Tengah	2.468.953	188.355	2.892	64.857	925	195	208
DI Yogyakarta	367.105	43.247	208	11.671	67	8	7
Jawa Timur	2.970.640	417.012	4.092	126.972	1.519	464	227
Banten	146.350	25.287	406	3.986	127	103	267
Bali	273.245	62.696	256	17.661	3	6	
Nusa Tenggara Barat	231.709	48.898	860	17.699	296	108	781
Nusa Tenggara Timur	591.548	18.824	2.748	7.307	1.171	148	127
Kalimantan Barat	166.900	9.715	308	3.548	82	62	43
Kalimantan Tengah	78.426	3.412	280	1.338	48	24	44
Kalimantan Selatan	113.428	9.812	191	3.429	36	13	11
Kalimantan Timur	53.877	3.879	188	1.408	45	12	
Kalimantan Utara	17.316	1.273	36	394	14	1	
Sulawesi Utara	79.113	3.656	310	1.116	82	12	23
Sulawesi Tengah	146.329	15.358	242	7.842	62	13	15
Sulawesi Selatan	409.906	72.993	1.102	47.583	202	110	78
Sulawesi Tenggara	131.375	11.616	66	7.878	33	3	6
Gorontalo	53.001	18.356	114	6.918	35	31	14
Sulawesi Barat	72.030	19.385	193	7.278	61	29	4
Maluku	57.160	1.111	40	639	19	3	6
Maluku Utara	39.490	1.823	56	655	15	2	3
Papua Barat	31.412	1.356	28	1.339	10	1	1
Papua	252.528	3.264	576	1.635	143	6	56
INDONESIA	11.670.696	1.451.325	25.989	471.848	7.391	2.188	2.959

Sumber: BPS (2014⁹). ST2013-L

Lampiran 2. Jumlah Ruta Usaha Peternakan dan Rute Usaha Utama Sapi Potong menurut Provinsi, 2013

	Peternakan	Sapi Potong	Persentase (%)
Aceh	254.166	109.679	43,15
Sumatera Utara	534.625	99.946	18,69
Sumatera Barat	280.250	129.571	46,23
Riau	124.605	41.031	32,93
Jambi	112.863	38.020	33,69
Sumatera Selatan	200.836	62.457	31,10
Bengkulu	75.794	30.738	40,55
Lampung	555.238	207.937	37,45
Kep. Bangka Belitung	14.895	1.494	10,03
Kep. Riau	21.680	4.117	18,99
DKI Jakarta	3.637	125	3,44
Jawa Barat	1.191.663	113.617	9,53
Jawa Tengah	2.612.448	784.996	30,05
DI Yogyakarta	383.555	156.962	40,92
Jawa Timur	3.339.411	1.852.572	55,48
Banten	171.083	3.659	2,14
Bali	315.747	209.922	66,48
Nusa Tenggara Barat	286.410	186.765	65,21
Nusa Tenggara Timur	600.865	181.238	30,16
Kalimantan Barat	176.777	44.214	25,01
Kalimantan Tengah	81.190	14.062	17,32
Kalimantan Selatan	123.314	29.086	23,59
Kalimantan Timur	57.437	18.148	31,60
Kalimantan Utara	18.358	3.622	19,73
Sulawesi Utara	82.881	30.078	36,29
Sulawesi Tengah	163.202	68.875	42,20
Sulawesi Selatan	493.306	239.954	48,64
Sulawesi Tenggara	141.872	54.750	38,59
Gorontalo	72.857	59.954	82,29
Sulawesi Barat	90.413	24.388	26,97
Maluku	58.315	14.984	25,69
Maluku Utara	41.064	17.999	43,83
Papua Barat	32.794	10.101	30,80
Papua	255.659	14.380	5,62
INDONESIA	12.969.210	4.859.441	37,47

Sumber: BPS (2014^b). ST2013-L

Lampiran 3. Populasi Sapi Potong menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 1 Mei 2013

Provinsi	Sapi Potong (Beef Cattle)				
	Jantan	(%)	Betina	(%)	Jumlah
Aceh	148.308	36,69	255.913	63,31	404.221
Sumatera Utara	157.708	30,13	365.685	69,87	523.393
Sumatera Barat	100.866	30,88	225.808	69,12	326.674
Riau	55.189	31,52	119.901	68,48	175.090
Jambi	42.704	35,89	76.278	64,11	118.982
Sumatera Selatan	76.266	35,33	139.597	64,67	215.863
Bengkulu	32.681	30,83	73.334	69,17	106.015
Lampung	217.499	37,94	355.733	62,06	573.232
Kep. Bangka Belitung	3.500	42,68	4.701	57,32	8.201
Kep. Riau	5.692	32,58	11.779	67,42	17.471
DKI Jakarta	2.031	96,35	77	3,65	2.108
Jawa Barat	215.549	55,61	172.025	44,39	387.574
Jawa Tengah	506.376	33,76	993.701	66,24	1.500.077
DI Yogyakarta	81.759	29,98	190.939	70,02	272.698
Jawa Timur	1.110.267	30,95	2.476.488	69,05	3.586.755
Banten	34.785	75,50	11.286	24,50	46.071
Bali	185.489	38,79	292.657	61,21	478.146
Nusa Tenggara Barat	201.900	31,12	446.980	68,88	648.880
Nusa Tenggara Timur	247.936	30,86	555.501	69,14	803.437
Kalimantan Barat	59.602	42,52	80.588	57,48	140.190
Kalimantan Tengah	18.303	35,21	33.674	64,79	51.977
Kalimantan Selatan	37.307	32,32	78.108	67,68	115.415
Kalimantan Timur	27.541	34,82	51.554	65,18	79.095
Kalimantan Utara	4.388	31,34	9.615	68,66	14.003
Sulawesi Utara	35.651	33,67	70.228	66,33	105.879
Sulawesi Tengah	80.639	32,26	169.332	67,74	249.971
Sulawesi Selatan	278.917	28,34	705.119	71,66	984.036
Sulawesi Tenggara	60.491	26,26	169.872	73,74	230.363
Gorontalo	49.201	28,14	125.657	71,86	174.858
Sulawesi Barat	20.470	25,06	61.209	74,94	81.679
Maluku	22.891	30,98	50.999	69,02	73.890
Maluku Utara	25.077	38,02	40.885	61,98	65.962
Papua Barat	16.158	33,55	32.001	66,45	48.159
Papua	27.119	34,08	52.455	65,92	79.574
INDONESIA	4.190.260	33,02	8.499.679	66,98	12.689.939

Sumber: BPS (2014¹), ST2013-L

Lampiran 4. Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan yang Tidak Menjadi Anggota Kelompok Peternak Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Menjadi Anggota Kelompok Peternak

Provinsi	Alasan Utama				Jumlah
	Belum ada kelompok di desanya	Belum / Tidak Berminat	Pelayanan Kelompok Kurang memuaskan	Lainnya	
Aceh	71,40	23,20	3,15	2,24	100,00
Sumatera Utara	71,93	23,72	3,64	0,71	100,00
Sumatera Barat	45,51	47,52	3,68	3,29	100,00
Riau	52,72	35,58	4,39	7,30	100,00
Jambi	71,81	24,53	0,92	2,74	100,00
Sumatera Selatan	77,26	19,30	1,97	1,47	100,00
Bengkulu	38,97	45,13	8,53	7,37	100,00
Lampung	77,02	21,48	0,79	0,71	100,00
Kep. Bangka Belitung	54,49	38,14	0,00	7,37	100,00
Kep. Riau	59,80	35,12	4,58	0,50	100,00
DKI Jakarta	51,35	48,65	0,00	0,00	100,00
Jawa Barat	59,51	33,33	1,19	5,96	100,00
Jawa Tengah	71,06	25,05	0,94	2,95	100,00
DI Yogyakarta	44,20	47,09	2,71	6,00	100,00
Jawa Timur	78,86	18,92	0,78	1,44	100,00
Banten	83,89	12,57	0,37	3,17	100,00
Bali	29,94	61,84	2,07	6,15	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,99	32,90	4,88	14,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	48,70	44,87	5,12	1,31	100,00
Kalimantan Barat	75,20	16,63	5,51	2,66	100,00
Kalimantan Tengah	60,99	31,82	3,35	3,85	100,00
Kalimantan Selatan	70,43	23,85	0,97	4,74	100,00
Kalimantan Timur	46,09	50,90	1,55	1,46	100,00
Kalimantan Utara	37,11	51,98	5,22	5,69	100,00
Sulawesi Utara	60,43	32,27	1,97	5,33	100,00
Sulawesi Tengah	51,89	36,61	5,02	6,48	100,00
Sulawesi Selatan	69,98	22,98	2,68	4,36	100,00
Sulawesi Tenggara	72,74	19,21	2,71	5,34	100,00
Gorontalo	43,09	43,69	3,16	10,06	100,00
Sulawesi Barat	62,91	26,27	4,22	6,59	100,00
Maluku	61,82	29,75	4,09	4,34	100,00
Maluku Utara	61,60	31,15	3,34	3,91	100,00
Papua Barat	71,95	21,49	3,65	2,91	100,00
Papua	70,16	23,86	5,30	0,68	100,00
INDONESIA	67,97	26,95	1,87	3,21	100,00

Sumber: BPS (2015*). ST2013-STU, diolah

Lampiran 5. Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Provinsi dan Bentuk Produksi Utama yang Dijual

Provinsi	Bentuk Produk Utama Yang Dijual					Jumlah
	Ternak Hidup	Susu	Telur	Daging	Olahan	
Aceh	89,63	10,36	0,00	0,01	0,00	100,00
Sumatera Utara	99,36	0,55	0,00	0,08	0,00	100,00
Sumatera Barat	99,33	0,57	0,00	0,11	0,00	100,00
Riau	99,15	0,30	0,00	0,54	0,00	100,00
Jambi	97,81	0,99	0,00	1,17	0,04	100,00
Sumatera Selatan	97,28	0,45	0,00	2,27	0,00	100,00
Bengkulu	99,35	0,24	0,00	0,40	0,00	100,00
Lampung	98,36	0,86	0,00	0,75	0,02	100,00
Kep. Bangka Belitung	94,21	0,00	0,00	5,79	0,00	100,00
Kep. Riau	95,62	0,00	0,00	4,38	0,00	100,00
DKI Jakarta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Barat	98,22	1,40	0,00	0,39	0,00	100,00
Jawa Tengah	98,91	0,90	0,00	0,19	0,00	100,00
DI Yogyakarta	99,26	0,66	0,00	0,08	0,00	100,00
Jawa Timur	98,68	1,27	0,00	0,05	0,00	100,00
Banten	97,47	0,00	0,00	0,00	2,53	100,00
Bali	98,31	1,17	0,00	0,52	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	98,36	1,36	0,00	0,20	0,07	100,00
Nusa Tenggara Timur	98,20	1,54	0,00	0,26	0,00	100,00
Kalimantan Barat	95,23	1,13	0,00	3,64	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	98,52	1,07	0,00	0,41	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	99,44	0,34	0,00	0,22	0,00	100,00
Kalimantan Timur	98,10	1,11	0,00	0,78	0,00	100,00
Kalimantan Utara	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	97,13	1,32	0,00	1,55	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	96,67	2,13	0,00	1,20	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	98,49	1,01	0,00	0,50	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	97,85	1,00	0,00	1,16	0,00	100,00
Gorontalo	99,47	0,37	0,00	0,16	0,00	100,00
Sulawesi Barat	99,89	0,11	0,00	0,00	0,00	100,00
Maluku	99,59	0,33	0,00	0,09	0,00	100,00
Maluku Utara	97,70	1,31	0,00	1,00	0,00	100,00
Papua Barat	97,66	0,91	0,00	1,43	0,00	100,00
Papua	99,39	0,00	0,00	0,61	0,00	100,00
INDONESIA	98,45	1,26	0,00	0,29	0,01	100,00

Sumber: BPS (2015^a). ST2013-STU, diolah

Lampiran 6. Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Provinsi dan Kesulitan Utama yang Dihadapi

Provinsi	Jenis Kesulitan					Tidak mengalami kesulitan	Jumlah
	Transportasi/ Angkutan	Harga Rendah	Isu Wabah/ Penyakit	Lainnya	Jumlah		
Aceh	0,52	8,59	0,00	0,93	10,04	89,96	100,00
Sumatera Utara	0,04	3,07	0,19	0,76	4,06	95,94	100,00
Sumatera Barat	0,32	2,80	0,12	0,20	3,43	96,57	100,00
Riau	0,33	3,62	0,15	1,21	5,32	94,68	100,00
Jambi	0,69	3,51	0,00	1,22	5,42	94,58	100,00
Sumatera Selatan	0,02	3,55	0,00	0,88	4,45	95,55	100,00
Bengkulu	0,15	5,08	0,00	1,17	6,40	93,60	100,00
Lampung	0,27	3,30	0,28	0,00	3,86	96,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,00	2,89	0,00	0,43	3,33	96,67	100,00
Kep. Riau	3,64	3,91	0,00	1,28	8,82	91,18	100,00
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Jawa Barat	1,28	5,56	0,00	0,29	7,13	92,87	100,00
Jawa Tengah	0,07	4,34	0,00	0,03	4,45	95,55	100,00
DI Yogyakarta	0,09	5,35	0,11	0,08	5,63	94,37	100,00
Jawa Timur	0,87	4,64	0,05	0,23	5,79	94,21	100,00
Banten	2,53	1,04	0,00	0,00	3,57	96,43	100,00
Bali	1,20	8,26	0,03	0,29	9,78	90,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,38	22,97	0,00	0,00	23,35	76,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,38	22,32	0,61	0,30	28,61	71,39	100,00
Kalimantan Barat	0,38	2,57	0,00	6,67	9,62	90,38	100,00
Kalimantan Tengah	2,50	11,62	0,16	0,29	14,57	85,43	100,00
Kalimantan Selatan	0,56	3,72	0,47	0,20	4,96	95,04	100,00
Kalimantan Timur	0,03	1,39	0,16	0,88	2,47	97,53	100,00
Kalimantan Utara	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	95,01	100,00
Sulawesi Utara	0,17	8,95	0,00	0,00	9,12	90,88	100,00
Sulawesi Tengah	0,40	6,44	0,56	0,12	7,52	92,48	100,00
Sulawesi Selatan	0,75	3,83	0,20	0,45	5,23	94,77	100,00
Sulawesi Tenggara	0,77	8,47	0,18	0,11	9,53	90,47	100,00
Gorontalo	1,57	7,51	0,00	0,60	9,68	90,32	100,00
Sulawesi Barat	0,94	1,87	0,00	0,36	3,16	96,84	100,00
Maluku	0,47	18,26	0,74	0,00	19,47	80,53	100,00
Maluku Utara	2,72	3,23	0,49	0,38	6,82	93,18	100,00
Papua Barat	2,28	5,21	0,00	0,00	7,49	92,51	100,00
Papua	0,21	2,97	0,00	0,55	3,73	96,27	100,00
INDONESIA	0,87	6,51	0,10	0,30	7,78	92,22	100,00

Sumber: BPS (2015⁴). ST2013-STU, diolah

Lampiran 7. Neraca Proyeksi Produksi dan Konsumsi Daging Sapi Nasional

Tahun	Populasi Sapi Ruta	Jumlah Sapi Jantan bisa dipotong	Jumlah Sapi Betina afkir	Total sapi dari Ruta yang bisa dipotong	Kebutuhan Konsumsi DS (ekor)	Defisit/ Surplus Sapi	Kebutuhan Konsumsi DN (ton)
2011	14.824.373	1.454.713	1.208.522	2.663.235	3.641.097	-977.862	619.496
2012	16.034.600	1.630.469	1.304.750	2.935.219	3.692.774	-757.555	628.289
2013	12.689.939	1.290.369	1.032.592	2.322.961	3.743.825	-1.420.864	636.974
2014	14.703.000	1.495.066	1.196.397	2.691.463	3.794.180	-1.102.718	645.542
2015	15.868.948	1.612.920	1.283.004	2.895.924	3.951.259	-1.055.335	672.267
2016	17.127.355	1.740.824	1.384.747	3.125.571	4.114.842	-989.271	700.099
2017	18.485.555	1.878.872	1.494.557	3.373.429	4.285.196	-911.767	729.083
2018	19.951.459	2.027.866	1.613.075	3.640.942	4.462.603	-821.661	759.267
2019	21.533.610	2.188.676	1.740.992	3.929.668	4.647.355	-717.686	790.701
2020	23.241.225	2.362.238	1.879.053	4.241.291	4.839.755	-598.464	823.436
2021	25.084.254	2.549.564	2.028.062	4.577.626	5.040.121	-462.496	857.526
2022	27.073.436	2.751.744	2.188.887	4.940.631	5.248.782	-308.151	893.028
2023	29.220.359	2.969.957	2.362.466	5.332.423	5.466.082	-133.659	929.999
2024	31.537.534	3.205.475	2.549.810	5.755.285	5.692.378	62.907	968.501
2025	34.038.460	3.459.669	2.752.010	6.211.679	5.928.042	283.636	1.008.597
2026	36.737.710	3.734.021	2.970.244	6.704.265	6.173.463	530.802	1.050.353
2027	39.651.010	4.030.129	3.205.784	7.235.913	6.429.044	806.868	1.093.838
2028	42.795.336	4.349.718	3.460.003	7.809.721	6.695.207	1.114.514	1.139.123
2029	46.189.006	4.694.651	3.734.381	8.429.032	6.972.388	1.456.643	1.186.282
2030	49.851.794	5.066.936	4.030.518	9.097.454	7.261.045	1.836.409	1.235.394
2031	53.805.041	5.468.744	4.350.138	9.818.882	7.561.653	2.257.229	1.286.540
2032	58.071.781	5.902.416	4.695.103	10.597.519	7.874.705	2.722.814	1.339.802
2033	62.676.873	6.370.477	5.067.425	11.437.903	8.200.718	3.237.185	1.395.270
2034	67.647.149	6.875.656	5.469.272	12.344.928	8.540.228	3.804.701	1.453.034
2035	73.011.568	7.420.896	5.902.985	13.323.881	8.893.793	4.430.088	1.513.190
2036	78801385,35	8.009.373	6.371.092	14.380.465	9.261.996	5.118.469	1.575.836
2037	85050335,21	8.644.516	6.876.320	15.520.836	9.645.443	5.875.393	1.641.076
2038	91794826,79	9.330.026	7.421.612	16.751.638	10.044.764	6.706.874	1.709.016
2039	99074156,55	10.069.897	8.010.146	18.080.043	10.460.617	7.619.426	1.779.769
2040	106930737,2	10.868.440	8.645.350	19.513.790	10.893.687	8.620.103	1.853.452

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

*) Data Populasi 2011 dan 2013 merupakan angka resmi dari BPS, hasil PSPK2011 dan ST2013

Asumsi perhitungan:

- Proporsi populasi sapi jantan dan sapi betina menggunakan hasil PSPK 2011 (33;77%); Sapi siap potong jantan dewasa (30,81%), betina afkir (10,56%)
- Estimasi umlah populasi menggunakan formula $P_t = P_o (1 - SI - Am - Dt - Rd + By + Br + Ad)$
- Konsumsi daging sapi per kapita penduduk menggunakan kesepakatan nasional sebesar 2,56 kg/kap/th Rakortas pada tanggal 27 Agustus 2015 dan Rakornis Lanjutan pada tanggal 31 Agustus 2015. Total kebutuhan daging sapi dikonversi menjadi satuan ekor sapi dengan asumsi bobot 170.14 kg daging/1 ekor sapi
- Pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun sebesar 1,14%/tahun
- Jantan siap potong diasumsikan sebesar 30,8% dari populasi sapi jantan. Proporsi sapi jantan sebesar 33% dari total populasi sapi Ruta
- Betina siap potong adalah betina afkir, diasumsikan sebesar 10,56% dari populasi sapi betina. Proporsi sapi betina sebesar 77% dari total populasi sapi Ruta

Lampiran 8. Pemotongan Sapi Betina Menurut Provinsi Dan Alasan Pemotongan Di RPH/TPH Tahun 2014 (ekor)

Provinsi	Tidak Produktif	Positif Brucellosis	Lainnya	Jumlah
Aceh	1.593	3	1.066	2.662
Sumatera Utara	480	-	4.000	4.480
Sumatera Barat	8.775	47	796	9.618
Riau	2.230	-	341	2.571
Jambi	1.557	70	335	1.962
Sumatera Selatan	3.150	14	224	3.388
Bengkulu	1.950	-	366	2.316
Lampung	4.367	-	604	4.971
Kep. Bangka Belitung	40	-	-	40
Kep. Riau	1	-	-	1
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	42.599	8	2.318	44.925
Jawa Tengah	27.661	426	4.476	32.563
DI Yogyakarta	4.152	-	5	4.157
Jawa Timur	33.209	284	5.252	38.745
Banten	12.595	-	641	13.236
Bali	18.121	2.282	6.981	27.384
Nusa Tenggara Barat	4.015	50	1.031	5.096
Nusa Tenggara Timur	18.404	12	197	18.613
Kalimantan Barat	437	-	72	509
Kalimantan Tengah	835	-	1.454	2.289
Kalimantan Selatan	1.037	68	677	1.782
Kalimantan Timur	4.114	11	172	4.297
Kalimantan Utara	164	-	214	378
Sulawesi Utara	522	-	94	616
Sulawesi Tengah	1.095	6	818	1.919
Sulawesi Selatan	11.452	234	14.585	26.271
Sulawesi Tenggara	4.076	-	199	4.275
Gorontalo	1.616	-	213	1.829
Sulawesi Barat	232	-	99	331
Maluku	740	5	245	990
Maluku Utara	144	-	141	285
Papua Barat	1.038	-	28	1.066
Papua	1.919	-	92	2.011
INDONESIA	214.320	3.520	47.736	265.576

Sumber: BPS (2014*), Statistik Pemotongan Ternak.

Lampiran 9. Konsumsi Daging Sapi menurut Provinsi

Provinsi	Rata-rata Kota-desa (kg/kap/th)	Konsumsi Daging Sapi (ton)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	0,12	542,8	550,4	558,1	565,9	573,8	600,24
Sumatera Utara	0,12	1563,4	1585,3	1607,5	1630,0	1652,9	1672,536
Sumatera Barat	0,48	2335,3	2368,0	2401,2	2434,8	2468,9	2494,224
Riau	0,24	1338,0	1356,7	1375,7	1395,0	1414,5	1522,656
Jambi	0,36	1118,7	1134,4	1150,3	1166,4	1182,7	1224,756
Sumatera Selatan	0,24	1795,6	1820,7	1846,2	1872,1	1898,3	1932,552
Bengkulu	0,36	620,0	628,6	637,4	646,4	655,4	674,964
Lampung	0,24	1832,2	1857,8	1883,8	1910,2	1936,9	1948,152
Kep. Bangka Belitung	0,36	442,9	449,1	455,4	461,7	468,2	494,208
Kep. Riau	0,12	203,1	206,0	208,9	211,8	214,8	236,76
DKI Jakarta	0,72	6941,1	7038,3	7136,8	7236,7	7338,0	7328,088
Jawa Barat	0,36	15561,8	15779,6	16000,5	16224,5	16451,7	16815,456
Jawa Tengah	0,36	3847,9	3901,8	3956,4	4011,8	4067,9	4303,872
DI Yogyakarta	0,12	3893,3	3947,8	4003,0	4059,1	4115,9	4052,892
Jawa Timur	0,24	832,2	843,9	855,7	867,6	879,8	883,008
Banten	0,36	13523,7	13713,0	13905,0	14099,7	14297,1	13985,136
Bali	0,12	468,9	475,5	482,1	488,9	495,7	498,336
Nusa Tenggara Barat	0,72	3251,6	3297,1	3343,3	3390,1	3437,5	3481,632
Nusa Tenggara Timur	0,48	2259,0	2290,6	2322,7	2355,2	2388,2	2457,648
Kalimantan Barat	0,24	1058,7	1073,6	1088,6	1103,8	1119,3	1149,504
Kalimantan Tengah	0,12	266,5	270,2	274,0	277,8	281,7	299,4
Kalimantan Selatan	0,12	437,1	443,2	449,4	455,7	462,1	478,776
Kalimantan Timur	0,24	858,3	870,3	882,5	894,8	907,3	976,464
Kalimantan Utara	0,12	273,3	277,2	281,0	285,0	289,0	289,452
Sulawesi Utara	0,36	952,6	965,9	979,4	993,1	1007,0	1035,612
Sulawesi Tengah	0,12	967,2	980,8	994,5	1008,4	1022,6	1022,436
Sulawesi Selatan	0,12	269,2	273,0	276,8	280,7	284,6	299,94
Sulawesi Tenggara	0,12	125,4	127,1	128,9	130,7	132,5	135,984
Gorontalo	0,12	139,8	141,7	143,7	145,7	147,7	153,864
Sulawesi Barat	0,12	185,0	187,6	190,2	192,9	195,6	202,38
Maluku	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Maluku Utara	0,12	91,8	93,1	94,4	95,7	97,1	104,58
Papua Barat	0,12	342,8	347,6	352,5	357,4	362,4	377,928
Papua	0,24	57244,5	58045,9	58858,6	59682,6	60518,2	61310,808
INDONESIA	11.670.696	1.451.325	25.989	471.848	7.391	2.188	2.95911

Sumber: Susenas dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

Lampiran 10. Banyaknya Unit Usaha Pemelihara Ternak menurut Jenis dan Provinsi pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Jenis Unit Usaha Pemelihara Ternak				Jumlah
	Rumah Tangga Pemelihara	Perusahaan Berbadan Hukum	Pedagang	Lainnya	
Aceh	128045	4	185	12	128246
Sumatera Utara	113806	15	250	20	114091
Sumatera Barat	143381	6	302	29	143718
Riau	40952	10	105	11	41078
Jambi	40986	-	153	14	41153
Sumatera Selatan	83643	9	183	7	83842
Bengkulu	32152	1	65	6	32224
Lampung	271523	15	745	31	272314
Kep. Bangka Belitung	1649	4	45	7	1705
Kep. Riau	4378	-	6	14	4398
DKI Jakarta	168	-	3	3	174
Jawa Barat	130282	59	1036	145	131522
Jawa Tengah	966242	24	1859	79	968204
DI Yogyakarta	198142	6	330	13	198491
Jawa Timur	2265150	12	2800	78	2268040
Banten	4118	10	75	8	4211
Bali	248116	4	149	10	248279
Nusa Tenggara Barat	198034	5	327	8	198374
Nusa Tenggara Timur	186856	9	76	27	186968
Kalimantan Barat	52155	-	111	8	52274
Kalimantan Tengah	17435	7	52	15	17509
Kalimantan Selatan	36732	9	152	10	36903
Kalimantan Timur	24963	4	65	14	25046
Sulawesi Utara	37383	-	98	14	37495
Sulawesi Tengah	68669	-	143	30	68842
Sulawesi Selatan	239464	17	488	35	240004
Sulawesi Tenggara	51945	1	73	11	52030
Gorontalo	62804	-	71	5	62880
Sulawesi Barat	22874	-	18	2	22894
Maluku	16874	-	21	14	16909
Maluku Utara	18894	-	27	1	18922
Papua Barat	9988	1	4	10	10003
Papua	18350	1	19	19	18389
INDONESIA	5736153	233	10036	710	5747132

Sumber: BPS (2011), PSPK2011

Lampiran 11. Persentase Unit Usaha Pemeliharaan Ternak menurut Jenis dan Provinsi pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Jenis Unit Usaha Pemelihara Ternak				
	Rumah Tangga Pemelihara	Perusahaan Berbadan Hukum	Pedagang	Lainnya	Jumlah
Aceh	99,84	0,00	0,14	0,01	100
Sumatera Utara	99,75	0,01	0,22	0,02	100
Sumatera Barat	99,77	0,00	0,21	0,02	100
Riau	99,69	0,02	0,26	0,03	100
Jambi	99,59	-	0,37	0,03	100
Sumatera Selatan	99,76	0,01	0,22	0,01	100
Bengkulu	99,78	0,00	0,20	0,02	100
Lampung	99,71	0,01	0,27	0,01	100
Kep. Bangka Belitung	96,72	0,23	2,64	0,41	100
Kep. Riau	99,55	-	0,14	0,32	100
DKI Jakarta	96,55	-	1,72	1,72	100
Jawa Barat	99,06	0,04	0,79	0,11	100
Jawa Tengah	99,80	0,00	0,19	0,01	100
DI Yogyakarta	99,82	0,00	0,17	0,01	100
Jawa Timur	99,87	0,00	0,12	0,00	100
Banten	97,79	0,24	1,78	0,19	100
Bali	99,93	0,00	0,06	0,00	100
Nusa Tenggara Barat	99,83	0,00	0,16	0,00	100
Nusa Tenggara Timur	99,94	0,00	0,04	0,01	100
Kalimantan Barat	99,77	-	0,21	0,02	100
Kalimantan Tengah	99,58	0,04	0,30	0,09	100
Kalimantan Selatan	99,54	0,02	0,41	0,03	100
Kalimantan Timur	99,67	0,02	0,26	0,06	100
Sulawesi Utara	99,70	-	0,26	0,04	100
Sulawesi Tengah	99,75	-	0,21	0,04	100
Sulawesi Selatan	99,78	0,01	0,20	0,01	100
Sulawesi Tenggara	99,84	0,00	0,14	0,02	100
Gorontalo	99,88	-	0,11	0,01	100
Sulawesi Barat	99,91	-	0,08	0,01	100
Maluku	99,79	-	0,12	0,08	100
Maluku Utara	99,85	-	0,14	0,01	100
Papua Barat	99,85	0,01	0,04	0,10	100
Papua	99,79	0,01	0,10	0,10	100
INDONESIA	99,81	0,00	0,17	0,01	100

Sumber: BPS (2011), PSPK2011

Lampiran 12. Persentase Ternak Sapi Potong di Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Pemeliharaan pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Dikandangan	Dikandangan dan Dilepas	Dilepas Sama Sekali	Jumlah
Aceh	13,90	81,40	4,70	100
Sumatera Utara	19,88	72,62	7,50	100
Sumatera Barat	40,31	56,83	2,86	100
Riau	24,73	60,50	14,77	100
Jambi	35,23	59,01	5,76	100
Sumatera Selatan	25,83	72,07	2,10	100
Bengkulu	40,13	52,28	7,59	100
Lampung	35,50	63,72	0,78	100
Kep. Bangka Belitung	65,15	30,99	3,86	100
Kep. Riau	18,52	75,76	5,73	100
DKI Jakarta	95,58	4,29	0,13	100
Jawa Barat	59,09	39,16	1,75	100
Jawa Tengah	57,30	42,65	0,04	100
DI Yogyakarta	80,01	19,98	0,01	100
Jawa Timur	82,64	17,25	0,11	100
Banten	36,84	61,03	2,13	100
Bali	74,89	13,72	11,39	100
Nusa Tenggara Barat	36,36	36,26	27,37	100
Nusa Tenggara Timur	10,47	54,23	35,30	100
Kalimantan Barat	44,84	48,18	6,97	100
Kalimantan Tengah	52,39	34,28	13,33	100
Kalimantan Selatan	29,12	62,63	8,25	100
Kalimantan Timur	25,03	63,80	11,17	100
Sulawesi Utara	5,17	16,93	77,90	100
Sulawesi Tengah	18,14	42,66	39,20	100
Sulawesi Selatan	10,55	70,89	18,56	100
Sulawesi Tenggara	9,60	39,19	51,21	100
Gorontalo	6,96	27,30	65,75	100
Sulawesi Barat	13,36	30,53	56,10	100
Maluku	6,53	21,15	72,32	100
Maluku Utara	2,68	12,26	85,05	100
Papua Barat	3,60	14,78	81,62	100
Papua	16,34	37,38	46,28	100
INDONESIA	50,89	38,77	10,34	100

Sumber: : BPS (2011), PSPK2011

Lampiran 13. Banyaknya Ternak Sapi Potong yang Dipelihara Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tujuan Pemeliharaan pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Tujuan Pemeliharaan				Jumlah
	Pengembangbiakkan	Penggemukan	Pembibitan	Perdagangan	
Aceh	359327	93677	5705	2547	461256
Sumatera Utara	476363	46505	1670	2328	526866
Sumatera Barat	262239	56397	4423	874	323933
Riau	142491	12306	2111	481	157389
Jambi	96989	18640	2399	521	118549
Sumatera Selatan	195662	44853	3033	639	244187
Bengkulu	86567	10201	1299	155	98222
Lampung	551382	106475	10958	3093	671908
Kep. Bangka Belitung	4300	1887	317	49	6553
Kep. Riau	15634	1311	110	167	17222
DKI Jakarta	43	1391	-	103	1537
Jawa Barat	196814	136672	10494	3234	347214
Jawa Tengah	1358690	529376	24258	5579	1917903
DI Yogyakarta	257843	87072	27336	1019	373270
Jawa Timur	3299327	1254557	128972	8344	4691200
Banten	8362	3848	186	168	12564
Bali	344682	233372	56436	232	634722
Nusa Tenggara Barat	582414	95223	6124	447	684208
Nusa Tenggara Timur	657246	104090	14098	656	776090
Kalimantan Barat	100588	46963	3129	1120	151800
Kalimantan Tengah	43983	6908	1369	275	52535
Kalimantan Selatan	114720	16548	2824	1394	135486
Kalimantan Timur	79901	5457	2263	1290	88911
Sulawesi Utara	75394	25882	2958	442	104676
Sulawesi Tengah	204891	21539	2397	495	229322
Sulawesi Selatan	868304	93405	6984	1697	970390
Sulawesi Tenggara	199781	10437	2673	114	213005
Gorontalo	169516	12003	1651	150	183320
Sulawesi Barat	66659	5388	345	84	72476
Maluku	71487	1221	854	44	73606
Maluku Utara	47851	8849	3714	194	60608
Papua Barat	33867	4167	2905	211	41150
Papua	70819	7104	2820	343	81086
INDONESIA	11044136	3103724	336815	38489	14523164

Sumber: : BPS (2011), PSPK2011

Lampiran 14. Persentase Ternak Sapi Potong yang Dipelihara Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tujuan Pemeliharaan pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Tujuan Pemeliharaan				Jumlah
	Pengembangbiakkan	Penggemukan	Pembibitan	Perdagangan	
Aceh	77,90	20,31	1,24	0,55	100
Sumatera Utara	90,41	8,83	0,32	0,44	100
Sumatera Barat	80,95	17,41	1,37	0,27	100
Riau	90,53	7,82	1,34	0,31	100
Jambi	81,81	15,72	2,02	0,44	100
Sumatera Selatan	80,13	18,37	1,24	0,26	100
Bengkulu	88,13	10,39	1,32	0,16	100
Lampung	82,06	15,85	1,63	0,46	100
Kep. Bangka Belitung	65,62	28,80	4,84	0,75	100
Kep. Riau	90,78	7,61	0,64	0,97	100
DKI Jakarta	2,80	90,50	-	6,70	100
Jawa Barat	56,68	39,36	3,02	0,93	100
Jawa Tengah	70,84	27,60	1,26	0,29	100
DI Yogyakarta	69,08	23,33	7,32	0,27	100
Jawa Timur	70,33	26,74	2,75	0,18	100
Banten	66,56	30,63	1,48	1,34	100
Bali	54,30	36,77	8,89	0,04	100
Nusa Tenggara Barat	85,12	13,92	0,90	0,07	100
Nusa Tenggara Timur	84,69	13,41	1,82	0,08	100
Kalimantan Barat	66,26	30,94	2,06	0,74	100
Kalimantan Tengah	83,72	13,15	2,61	0,52	100
Kalimantan Selatan	84,67	12,21	2,08	1,03	100
Kalimantan Timur	89,87	6,14	2,55	1,45	100
Sulawesi Utara	72,03	24,73	2,83	0,42	100
Sulawesi Tengah	89,35	9,39	1,05	0,22	100
Sulawesi Selatan	89,48	9,63	0,72	0,17	100
Sulawesi Tenggara	93,79	4,90	1,25	0,05	100
Gorontalo	92,47	6,55	0,90	0,08	100
Sulawesi Barat	91,97	7,43	0,48	0,12	100
Maluku	97,12	1,66	1,16	0,06	100
Maluku Utara	78,95	14,60	6,13	0,32	100
Papua Barat	82,30	10,13	7,06	0,51	100
Papua	87,34	8,76	3,48	0,42	100
INDONESIA	76,04	21,37	2,32	0,27	100

Sumber : BPS (2011), PSPK2011

Lampiran 15. Banyaknya Ternak Sapi Potong yang Dipelihara oleh Rumah Tangga, Perusahaan, dan Pedagang Menurut Provinsi pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Rumah Tangga Pemelihara	Perusahaan Berbadan Hukum	Pedagang	Lainnya	Jumlah
Aceh	461256	146	1111	327	462840
Sumatera Utara	526866	12161	2265	406	541698
Sumatera Barat	323933	692	2170	218	327013
Riau	157389	1264	964	238	159855
Jambi	118549	-	1111	228	119888
Sumatera Selatan	244187	877	1085	146	246295
Bengkulu	98222	268	332	126	98948
Lampung	671908	45423	24797	648	742776
Kep. Bangka Belitung	6553	361	530	289	7733
Kep. Riau	17222	-	65	51	17338
DKI Jakarta	1537	-	7	147	1691
Jawa Barat	347214	66488	6590	2697	422989
Jawa Tengah	1917903	3449	14300	1899	1937551
DI Yogyakarta	373270	232	2197	145	375844
Jawa Timur	4691200	13168	19471	3459	4727298
Banten	12564	33078	1053	205	46900
Bali	634722	121	1716	914	637473
Nusa Tenggara Barat	684208	104	1426	72	685810
Nusa Tenggara Timur	776090	859	610	1074	778633
Kalimantan Barat	151800	-	1450	70	153320
Kalimantan Tengah	52535	977	809	326	54647
Kalimantan Selatan	135486	1189	1806	210	138691
Kalimantan Timur	88911	182	1037	618	90748
Sulawesi Utara	104676	-	468	81	105225
Sulawesi Tengah	229322	-	1129	231	230682
Sulawesi Selatan	970390	9523	3446	626	983985
Sulawesi Tenggara	213005	181	352	198	213736
Gorontalo	183320	-	401	147	183868
Sulawesi Barat	72476	-	48	298	72822
Maluku	73606	-	158	212	73976
Maluku Utara	60608	-	189	43	60840
Papua Barat	41150	35	122	157	41464
Papua	81086	110	198	402	81796
INDONESIA	14523164	190888	93413	16908	14824373

Sumber: BPS (2011), PSPK2011

Lampiran 16. Persentase Ternak Sapi Potong yang Dipelihara oleh Rumah Tangga, Perusahaan, dan Pedagang Menurut Provinsi pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Rumah Tangga Pemelihara	Perusahaan Berbadan Hukum	Pedagang	Lainnya	Jumlah
Aceh	99,66	0,03	0,24	0,07	100
Sumatera Utara	97,26	2,24	0,42	0,07	100
Sumatera Barat	99,06	0,21	0,66	0,07	100
Riau	98,46	0,79	0,60	0,15	100
Jambi	98,88	-	0,93	0,19	100
Sumatera Selatan	99,14	0,36	0,44	0,06	100
Bengkulu	99,27	0,27	0,34	0,13	100
Lampung	90,46	6,12	3,34	0,09	100
Kep. Bangka Belitung	84,74	4,67	6,85	3,74	100
Kep. Riau	99,33	-	0,37	0,29	100
DKI Jakarta	90,89	-	0,41	8,69	100
Jawa Barat	82,09	15,72	1,56	0,64	100
Jawa Tengah	98,99	0,18	0,74	0,10	100
DI Yogyakarta	99,32	0,06	0,58	0,04	100
Jawa Timur	99,24	0,28	0,41	0,07	100
Banten	26,79	70,53	2,25	0,44	100
Bali	99,57	0,02	0,27	0,14	100
Nusa Tenggara Barat	99,77	0,02	0,21	0,01	100
Nusa Tenggara Timur	99,67	0,11	0,08	0,14	100
Kalimantan Barat	99,01	-	0,95	0,05	100
Kalimantan Tengah	96,14	1,79	1,48	0,60	100
Kalimantan Selatan	97,69	0,86	1,30	0,15	100
Kalimantan Timur	97,98	0,20	1,14	0,68	100
Sulawesi Utara	99,48	-	0,44	0,08	100
Sulawesi Tengah	99,41	-	0,49	0,10	100
Sulawesi Selatan	98,62	0,97	0,35	0,06	100
Sulawesi Tenggara	99,66	0,08	0,16	0,09	100
Gorontalo	99,70	-	0,22	0,08	100
Sulawesi Barat	99,52	-	0,07	0,41	100
Maluku	99,50	-	0,21	0,29	100
Maluku Utara	99,62	-	0,31	0,07	100
Papua Barat	99,24	0,08	0,29	0,38	100
Papua	99,13	0,13	0,24	0,49	100
INDONESIA	97,97	1,29	0,63	0,11	100

Sumber : BPS (2011), PSPK2011

Lampiran 17. Harga Sapi dan Daging Sapi di tingkat Produsen dan Pengecer, 2014

Bulan	Harga sapi di tingkat produsen, 2014 (Asumsi berat per ekor 250 kg)* (Rp)	Harga daging di tingkat produsen (Rp/kg) asumsi per ekor 170 kg daging (Pf)	Harga daging di tingkat pengecer (Rp/kg)** (Pr)
JANUARI	9.245.114	54.383,02	93.085,67
FEBRUARI	9.258.304	54.460,61	92.948,17
MARET	9.280.308	54.590,05	92.864,83
APRIL	9.314.320	54.790,12	93.097,33
MEI	9.363.578	55.079,87	93.107,83
JUNI	9.440.546	55.532,62	93.091,33
JULI	9.561.574	56.244,55	96.293,17
AGUSTUS	9.616.046	56.564,98	96.161,33
SEPTEMBER	9.737.968	57.282,16	95.917,50
OKTOBER	9.780.224	57.530,73	96.063,00
NOVEMBER	9.752.145	57.365,56	95.315,83
DESEMBER	9.825.643	57.797,90	96.716,50
Rata-rata 2014	9.514.647	55.968,51	94.555,21

Sumber: BPS (2014), Statistik Harga Produsen Pertanian.

Lampiran 18. Jumlah Ternak yang Dipotong di Rumah Potong Hewan dan di Luar Rumah Potong Hewan yang Dilaporkan Menurut Jenis Ternak, 2014

Tahun	Sapi
2004	1.351.711
2005	1.303.575
2006	1.042.579
2007	1.218.560
2008	1.154.167
2009	1.286.305
2010	1.324.154
2011	1.519.178
2012	1.421.319
2013	1.326.395
Triw I	322.221
Triw II	336.361
Triw III	354.423
Triw IV	313.390
2014	1.088.140
Triw I	250.461
Triw II	275.251
Triw III	306.589
Triw IV	255.839

Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2014)

Lampiran 19. Estimasi Populasi Sapi Indonesia 2015-2040

Tahun	Populasi (ekor)
2015	15.868.948
2016	17.127.355
2017	18.485.555
2018	19.951.459
2019	21.533.610
2020	23.241.225
2021	25.084.254
2022	27.073.436
2023	29.220.359
2024	31.537.534
2025	34.038.460
2026	36.737.710
2027	39.651.010
2028	42.795.336
2029	46.189.006
2030	49.851.794
2031	53.805.041
2032	58.071.781
2033	62.676.873
2034	67.647.149
2035	73.011.568
2036	78.801.385
2037	85.050.335
2038	91.794.827
2039	99.074.157
2040	106.930.737

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

*) data populasi 2011 dan 2013 merupakan angka resmi dari BPS, hasil PSPK2011 dan ST2013

Lampiran 20. Pemotongan Sapi Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Triwulan, 2014

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II	
	Jantan	Betina	Jantan	Betina
Aceh	1416	673	1969	651
Sumatera Utara	3873	1232	4314	953
Sumatera Barat	5167	2102	5427	2580
Riau	2998	548	3159	511
Jambi	749	499	1027	766
Sumatera Selatan	3538	719	1076	502
Bengkulu	1192	445	1059	772
Lampung	1583	1012	1630	1577
Kep. Bangka Belitung	1528	21	1808	1
Kep. Riau	161	-	183	-
DKI Jakarta	3888	-	5648	-
Jawa Barat	23348	9391	30723	12869
Jawa Tengah	29454	6986	31522	8898
DI Yogyakarta	1843	913	1931	1128
Jawa Timur	47819	9170	50919	10169
Banten	17684	3650	17745	3435
Bali	3937	5232	2699	7139
Nusa Tenggara Barat	6622	1201	7482	1353
Nusa Tenggara Timur	1722	4162	1753	4499
Kalimantan Barat	2470	226	2836	86
Kalimantan Tengah	2692	577	2684	582
Kalimantan Selatan	4719	412	4740	336
Kalimantan Timur	8281	933	8965	1334
Kalimantan Utara	249	83	325	149
Sulawesi Utara	1254	108	588	200
Sulawesi Tengah	3011	616	2730	568
Sulawesi Selatan	4925	6411	5667	6727
Sulawesi Tenggara	1666	1017	1706	1166
Gorontalo	305	455	380	409
Sulawesi Barat	247	82	288	64
Maluku	724	283	679	250
Maluku Utara	515	75	665	87
Papua Barat	454	324	378	50
Papua	389	480	416	519
INDONESIA	190423	60038	205121	70130

Triwulan III		Triwulan IV		Tahun 2014	
Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
2720	671	2219	667	8324	2662
4398	856	3732	1439	16317	4480
6093	2754	4563	2182	21250	9618
4184	578	2865	934	13206	2571
810	454	706	243	3292	1962
4028	1320	4040	847	12682	3388
1458	765	1483	334	5192	2316
1960	1771	2933	811	8106	4971
2431	6	2255	12	8022	40
298	1	185	-	827	1
9779	-	7187	-	26502	-
34873	12472	26619	10193	115563	44925
35582	8811	28059	7868	124617	32563
1971	1197	2489	919	8234	4157
52981	10496	47213	8910	198932	38745
21028	3801	14538	2350	70995	12236
2443	7245	4245	7768	13324	27384
8168	1360	7637	1182	29090	5096
1928	5197	1996	4755	7399	18613
2754	129	2416	68	10476	509
2951	564	2707	566	11034	2289
4585	531	3670	503	17714	1782
9904	1182	7489	848	34639	4297
352	86	351	60	1277	378
1195	92	646	216	3683	616
3493	528	393	207	9627	1919
6479	6975	6260	6158	23331	26271
1929	1043	1642	1049	6943	4275
413	488	384	477	1482	1829
279	78	236	107	1050	331
816	232	801	225	3020	990
510	60	320	63	2010	285
571	470	399	285	1802	1066
515	560	463	452	1783	2011
233879	72710	193141	62698	822564	265576

Sumber: BPS (2014), Statistik Pemotongan Ternak

Lampiran 21. Banyaknya Ternak Sapi Potong Bali Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Umur pada Tanggal 1 Juni 2011

Provinsi	Jantan			
	Anak	Muda	Dewasa	Sub Jumlah
Aceh	1611	2311	3068	6990
Sumatera Utara	2798	2605	2373	7776
Sumatera Barat	6045	5917	3586	15548
Riau	15654	15034	12985	43673
Jambi	8619	10222	6140	24981
Sumatera Selatan	7387	8387	8127	23901
Bengkulu	9843	9899	6427	26169
Lampung	19931	19587	11445	50963
Kepulauan Bangka Belitung	349	396	538	1283
Kepulauan Riau	1405	1565	1704	4674
DKI Jakarta	1	64	239	304
Jawa Barat	9110	11961	9955	31026
Jawa Tengah	2272	3579	1638	7489
DI Yogyakarta	88	139	86	313
Jawa Timur	5647	8393	7198	21238
Banten	156	214	415	785
Bali	60267	95868	82086	238221
Nusa Tenggara Barat	64856	78469	69259	212584
Nusa Tenggara Timur	54626	76096	85828	216550
Kalimantan Barat	5347	5917	7528	18792
Kalimantan Tengah	2973	4085	4312	11370
Kalimantan Selatan	9663	10137	8671	28471
Kalimantan Timur	7430	8269	11913	27612
Sulawesi Utara	1541	1811	3026	6378
Sulawesi Tengah	7194	7716	8203	23113
Sulawesi Selatan	92827	93041	88398	274266
Sulawesi Tenggara	24071	20497	14732	59300
Gorontalo	7579	7570	8509	23658
Sulawesi Barat	7764	5915	4221	17900
Maluku	8358	7010	5937	21305
Maluku Utara	4519	3983	5569	14071
Papua Barat	5221	4645	3946	13812
Papua	5809	6891	5997	18697
INDONESIA	460961	538193	494059	1493213

Sumber: BPS-PSPK, 2011

Lampiran 21. (Lanjutan)

Provinsi	Betina						Jumlah
	Anak	Muda	Dewasa	Dewasa	Dewasa	Sub Jumlah	
			2 < umur ≤ 4	4 < umur ≤ 6	umur > 6		
Aceh	1460	2396	3849	3921	1127	12753	19743
Sumatera Utara	2924	3678	5265	4947	2073	18887	26663
Sumatera Barat	5871	8587	10802	10925	4067	40252	55800
Riau	14958	19143	30454	23315	8042	95912	139585
Jambi	7870	11521	17132	11301	4169	51993	76974
Sumatera Selatan	7679	11298	14857	12250	4429	50513	74414
Bengkulu	9433	12191	16556	16381	6518	61079	87248
Lampung	22155	26216	30986	39569	16823	135749	186712
Kepulauan Bangka Belitung	284	730	1329	624	140	3107	4390
Kepulauan Riau	1316	1677	2737	2309	1135	9174	13848
DKI Jakarta	2	1	1	0	2	6	310
Jawa Barat	9093	13060	17087	19556	7861	66657	97683
Jawa Tengah	3100	5789	5062	4183	1125	19259	26748
DI Yogyakarta	117	184	307	194	63	865	1178
Jawa Timur	6790	12826	17008	12931	5048	54603	75841
Banten	140	211	454	315	115	1235	2020
Bali	60568	80831	96433	107486	53924	399242	637463
Nusa Tenggara Barat	69972	86286	87228	129779	86623	459888	672472
Nusa Tenggara Timur	65595	94188	99872	141795	65928	467378	683928
Kalimantan Barat	5604	8228	12983	9009	3402	39226	58018
Kalimantan Tengah	2941	5436	8608	4336	1461	22782	34152
Kalimantan Selatan	10105	13281	16825	18887	6794	65892	94363
Kalimantan Timur	7855	12357	19395	14963	4677	59247	86859
Sulawesi Utara	1585	2205	3615	4087	2560	14052	20430
Sulawesi Tengah	7745	10805	13832	15110	6269	53761	76874
Sulawesi Selatan	96483	112713	129968	192866	148605	680635	954901
Sulawesi Tenggara	25122	27378	34052	40637	26363	153552	212852
Gorontalo	8287	11618	16753	16630	10315	63603	87261
Sulawesi Barat	7523	8401	11611	13417	8894	49846	67746
Maluku	8982	9565	14239	14071	5740	52597	73902
Maluku Utara	4328	5165	6476	8264	3492	27725	41796
Papua Barat	5002	5141	5856	7992	3616	27607	41419
Papua	5878	7549	8985	10079	4740	37231	55928
INDONESIA	486767	630655	760617	912129	506140	3296308	4789521

Sumber: BPS-PSPK, 2011

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsq@bps.go.id

ISBN 978-979-064-869-2



9 789790 648692